



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005-2025**

One Team One Vision One Goal



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005-2025**

One Team One Vision One Goal

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. bahwa Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663)
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005 – 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kabupaten/Kota, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan I Tahun 2005-2008, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan II Tahun 2009-2013, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan III Tahun 2014-2018, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan IV Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan RPJM Nasional;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJMD Provinsi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
- (2) Rincian dari program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada RPJP Nasional;

Pasal 4

- (1) RPJPD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (2) RPJPD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJPD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
- (2) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJMD Provinsi.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RJPJD Provinsi Sumatera Selatan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;
- (3) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten/Kota yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


SYAHRIL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


MUSYRIF SUWARDI



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005-2025**

One Team One Vision One Goal

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Pengantar	<i>1 - 1</i>
1.2. Pengertian	<i>1 - 1</i>
1.3. Maksud dan Tujuan.....	<i>1 - 2</i>
1.4. Landasan Hukum	<i>1 - 2</i>
1.5. Hubungan RPJP Provinsi Sumatera Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	<i>1 - 3</i>
1.6. Tata Urut	<i>1 - 4</i>

Bab 2

Kondisi Umum Daerah

2.1. Kondisi Provinsi Sumatera Selatan Saat Ini	<i>II - 1</i>
2.2. Tantangan	<i>II - 82</i>
2.3. Modal Dasar	<i>II - 96</i>

Bab 3

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2005-2025	<i>III - 1</i>
-----------------------	----------------

Bab 4

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

4. 1. Agenda Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi dan Penegasan Arah Pembangunan Ekonomi	IV - 2
4. 2. Agenda Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan	IV - 6
4. 3. Agenda Pembangunan yang Berorientasi pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan	IV - 10
4. 4. Agenda Pembangunan Pemerintahan yang Jujur, Adil, Bersih dan Bertanggungjawab	IV - 28
4. 4. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 32

Bab 5

Penutup	V - 1
---------------	-------

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	II
- 2		
Tabel 2. 2.	Penggunaan Lahan Eksisting Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004	II - 6
Tabel 2. 3.	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2001 – 2004	II - 9
Tabel 2. 4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin	II - 9
Tabel 2. 5.	Perkembangan UMUR dan KFM/KHM di Sumatera Selatan (Rp)	II - 10
Tabel 2. 6.	Pendapatan per Kapita Sumsel Tahun 2000 - 2004 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp)	II - 33
Tabel 2. 7.	Neraca Perdagangan Daerah Sumsel Tahun 2004 (000 US \$) .	II - 35
Tabel 2. 8.	Incremental Capital Output Ratio Tahun 2001 – 2004	II - 37
Tabel 2. 9.	Sistem dan Kedudukan Kawasan di Sumatera Selatan	II - 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Kedudukan RPJP Provinsi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I - 4
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan	II - 3
Gambar 2. 2. Peta Arahana Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan	II - 14

Bab 1

Pendahuluan

*Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah*



Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

BAB. I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan semangat reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, maka pembangunan yang berkualitas adalah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pembangunan yang betul-betul sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Lahirnya proses pembangunan yang partisipatif, pemerintahan yang bersih, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat reformasi itu sendiri.

I.1.

PENGANTAR

Dalam hal peningkatan kualitas pembangunan ini, salah satu yang menjadi tugas pemerintah adalah menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan di daerah sejak awal yakni dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasinya. Sehingga apa yang diharapkan dari setiap pembangunan mampu tercapai dengan baik. Dalam arti, apa yang menjadi tujuan dan dampak yang diharapkan dari diselenggarakannya pembangunan di daerah betul-betul sejalan dengan harapan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, telah disusun satu pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Melalui undang-undang ini, diharapkan seluruh pembangunan yang diselenggarakan baik itu yang sifatnya tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah terintegrasi dalam suatu sistem perencanaan yang utuh.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai Perencanaan Nasional dan Daerah, serta dengan mengacu kepada periodisasi pembangunan jangka panjang Nasional, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang meliputi kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2025.

I.2.

PENGERTIAN

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 ini disusun dengan tujuan:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar hukum penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);

*I.3.
MAKSUD
DAN
TUJUAN*

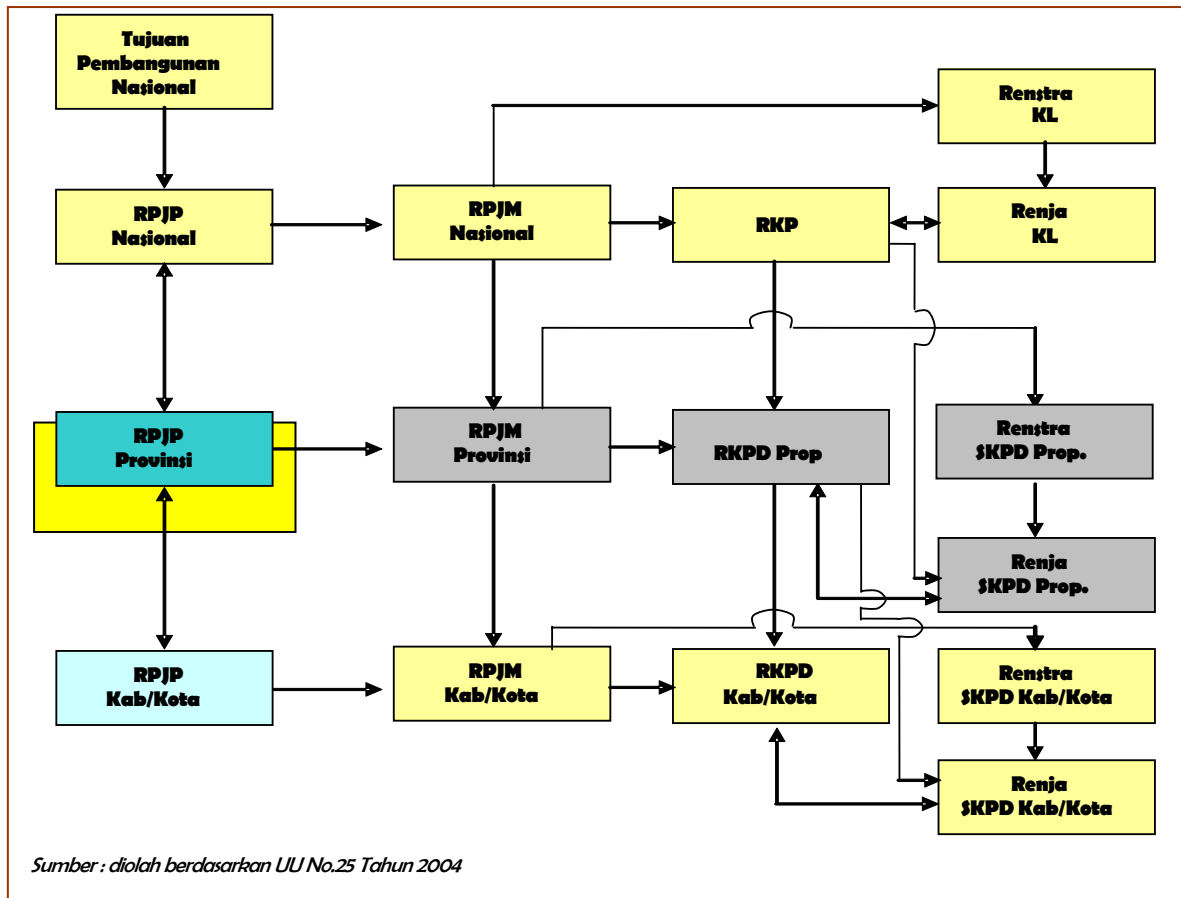
*I.4.
LANDASAN
HUKUM*

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

Untuk melaksanakan ketentuan perundangan tersebut, maka ada sejumlah dokumen perencanaan yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah sebagai dokumen induk (*master plan*) perencanaan pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Dengan demikian, seluruh perencanaan pembangunan lainnya, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan serta Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Tahunan SKPD Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya harus mengacu kepada dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1.

**I.5.
HUBUNGAN
RPJPD
PROVINSI
SUMATERA
SELATAN
DENGAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
LAINNYA**



Gambar 1. 1

Kedudukan RPJP Provinsi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

Bab IV : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Darah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

Bab V : Penutup

I.6.
TATA URUT

Bab 2

Kondisi Umum Daerah

*Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah*



Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

BAB. II

KONDISI UMUM DAERAH



II.1. KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan hingga saat ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan dan berkelanjutan dari kegiatan pembangunan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, telah menunjukkan beberapa kemajuan dan keberhasilan di dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tingkat pencapaian pembangunan di Sumatera Selatan hingga saat ini secara nyata telah lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lebih baik tersebut dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan baik dalam bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Namun pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan selama ini masih menghadapi banyak tantangan, kendala dan masalah yang belum sepenuhnya dapat teratasi dengan baik. Beberapa persoalan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut diantaranya adalah masalah kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan degradasi lingkungan.

Menilik dan memahami isu-isu di atas maka diperlukan upaya untuk mengatasinya melalui perencanaan yang lebih baik, terstruktur, dan bertahap. Dalam konteks ini, maka perencanaan jangka panjang bagi Sumatera Selatan menjadi bagian yang penting.

A. Kondisi Fisik

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang mempunyai luas wilayah $\pm 8.701.742$ Ha, yang terletak pada $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} - 106^{\circ}$ Bujur Timur dengan batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- Sebelah Utara : Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung.
- Sebelah Selatan : Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu.

II.1. KONDISI PROVINSI SUMATERA SELATAN SAAT INI

A.1. Posisi Geografis Provinsi Sumatera Selatan

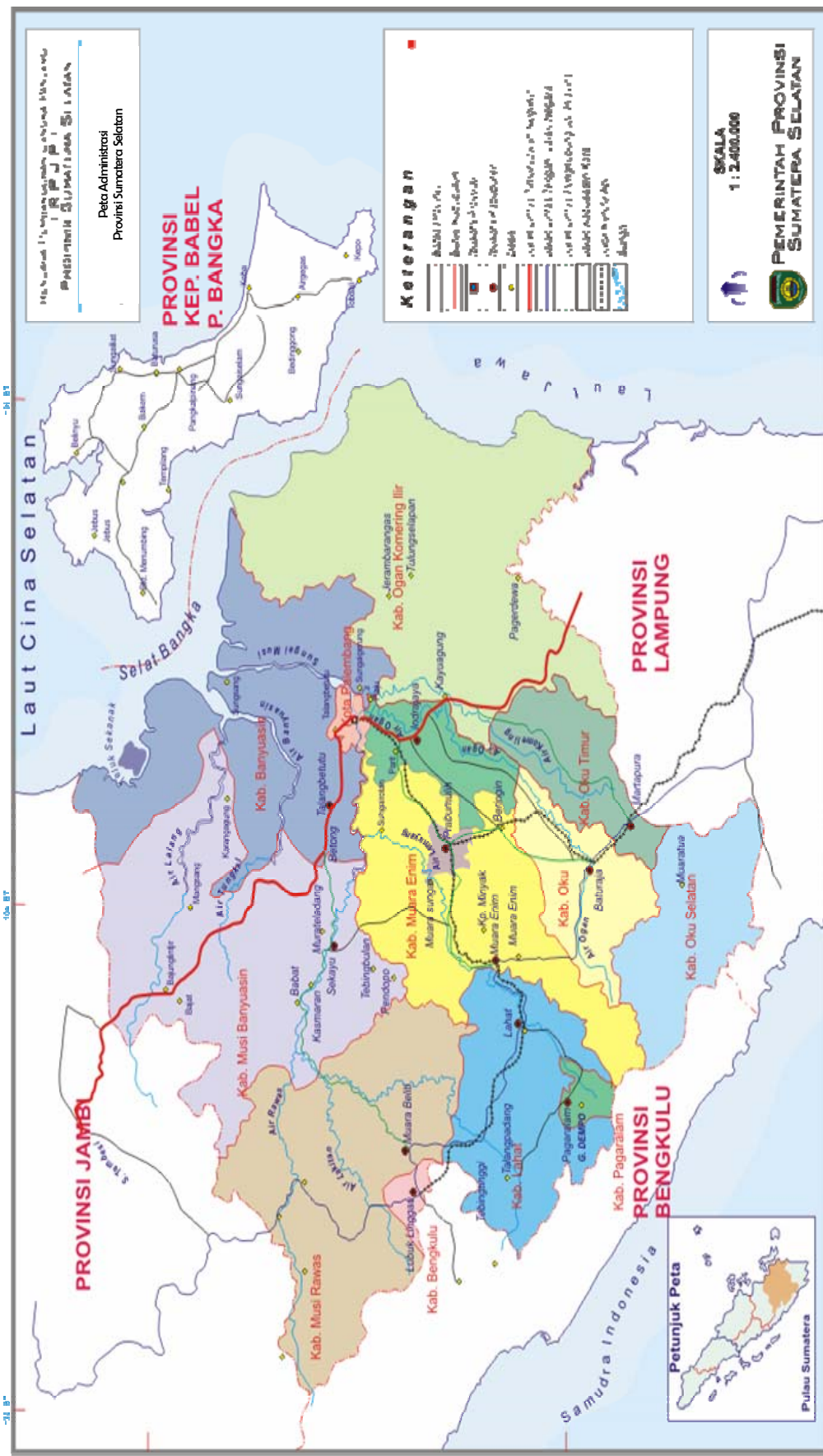
Sejak Tahun 2001, wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan yang semula terdiri atas 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota mengalami pemekaran. Saat ini terdiri dari 14 kabupaten/kota seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	%
1	Ogan Komering Ulu (OKU)	444.100	5,10
2	OKU Selatan	548.900	6,31
3	OKU Timur	337.000	3,87
4	Ogan Komering Ilir (OKI)	1.528.199	17,56
5	Ogan Ilir	266.607	3,06
6	Muara Enim	858.794	9,87
7	Lahat	663.250	7,62
8	Musi Rawas	1.213.457	13,94
9	Musi Banyuasin	1.447.700	16,64
10	Banyuasin	1.214.274	13,95
11	Palembang	37.403	0,43
12	Prabumulih	42.162	0,48
13	Pagar Alam	57.916	0,67
14	Lubuk Linggau	41.980	0,48
Jumlah		8.701.742	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan, 2004

A.2. Wilayah Administrasi



Gambar 2. 1
 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, Sumatera Selatan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti itu terjadi tiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember.

A.3. *Musim*

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dimana sepanjang tahun 2004 variasi curah hujan antara 36,9/2 hingga 413,6/24 mm (curah hujan/hari). Setiap bulannya curah hujan bervariasi, dengan bulan Nopember merupakan bulan dengan curah hujan terbesar. Sedangkan suhu udara bervariasi antara 26,4 °C - 31,6 °C, sedangkan tingkat kelembabannya antara 75 - 87 R.h.

A.4. *Iklim*

Morfologi wilayah Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah Barat - Timur dengan ketinggian antara 400 - 1.700 m dpl. Daerah dengan ketinggian antara 400 - 500 m dpl mencakup areal seluas 37 %, wilayah Barat merupakan wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 900 - 1.200 m dpl, sedangkan ke arah Timur morfologi lahannya berbukit dan bergelombang. Pegunungan Bukit Barisan ini terdiri atas Puncak Gunung Seminung (1.964 m dpl), Gunung Dempo (3.159 m dpl), Gunung Patah (1.107 m dpl), dan Gunung Bungkok (2.125 m dpl). Di sebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng. Pada lembah daerah Bukit Barisan terdapat daerah-daerah perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian terutama kopi, teh, dan sayuran.

A.5. *Morfologi*

Bentang alam yang terlihat sekarang ini pada prinsipnya merupakan hasil dari proses geologi sepanjang Tersier (*Tertiary*) hingga Kuartar (*Quaternary*). Dalam konteks sumberdaya energi, wilayah Sumatera Selatan yang menempati cekungan sedimen belakang busur telah dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Sedangkan wilayah Sumatera Selatan yang berada di busur gunung api aktif (*volcanic arc*) dikenal sebagai daerah yang mempunyai potensi sumberdaya energi non-fosil seperti panas bumi (*geothermal*).

A.6. *Geologi*

Pembentukan struktur lipatan, sesar, dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumberdaya minyak bumi, gas alam, batubara, dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk antiklinorium telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon.

Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil dan nonfosil di daerah ini.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Sungai Lematang. Persediaan air di daerah Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Sungai-sungai utama tersebut merupakan sumber air domestik. Selain itu, Sumatera Selatan diperkirakan juga memiliki air dalam (air tanah).

A.7. Hidrologi

Keadaan jenis tanah di Sumatera Selatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

A.8. Jenis Tanah

- Organosol, terdapat di sepanjang pantai dan dataran rendah.
- Litosol, tersebar di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dengan patahan di sepanjang Bukit Barisan.
- Alluvial, penyebaran jenis tanah ini terdapat di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan punggung Bukit Barisan.
- Hidromorf, terdapat di dataran rendah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim.

Pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi lahan sawah, permukiman, tegalan/ladang, padang rumput, rawa-rawa, tambak/kolam, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan areal penggunaan lain.

A.9. Pola Penggunaan Lahan

Areal penggunaan hutan ini merupakan penggunaan lahan terluas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 53,21%, sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah tambak/kolam sebesar 0,07% (Tabel 2. 2.).

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan Eksisting
Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	Perkampungan	142.066	1,63
2	Persawahan	659.748	7,58
3	Tegalan / Ladang	252.338	2,90
4	Kebun Campuran	197.984	2,28
5	Perkebunan Rakyat	1.866.273	21,45
6	Perkebunan Besar	388.948	4,47
7	Tambak	5.846	0,07
8	Pertambangan	9.619	0,11
9	Semak / Alang-Alang	109.236	1,26
10	Hutan	4.630.717	53,21
11	Danau / Rawa	293.659	3,37
12	Lain-lain (sungai, jalan)	145.445	1,66
Jumlah		8.701.742	100,00

Sumber : Buku Profil Provinsi Sumatera Selatan, 2004

B. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2003 berjumlah 6, 518 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk tahun 2004 adalah 6.628 jiwa atau meningkat 1,68 % dari tahun 2003. Dengan jumlah tersebut, pada tahun 2004, Sumatera Selatan merupakan provinsi ke-8 terbesar penduduknya. Proporsi penduduk Sumatera Selatan mencapai 3% dari seluruh penduduk Indonesia.

*B.1.1.
Jumlah
Penduduk*

Selama periode Tahun 2001 – 2004, Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,35 % per tahun. Semua daerah mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar dari periode 1980 - 1990 ke periode 1990 - 2004. Selain karena faktor alamiah berupa menurunnya tingkat fertilitas, beberapa kabupaten diduga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk khususnya melalui program transmigrasi. Sebagaimana diketahui, kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan merupakan daerah sasaran utama Program Transmigrasi.

*B.1.2.
Laju
Pertumbuhan
Penduduk*

Meskipun telah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,15 persen (periode 1980-1990) menjadi 1,5 persen (1990-2000), tetapi pertambahan penduduk secara absolut terus meningkat. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah pasangan usia subur.

Angka kelahiran kasar di Sumatera Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, sedangkan untuk angka Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Selatan masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan angka nasional. Penurunan TFR terjadi karena meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi.

Pada 20 tahun ke depan (2025), penduduk di Sumatera Selatan di estimasi sebesar 8.875.800 orang. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan tahun 2005-2010 diperkirakan sebesar 1,58 dan tahun 2010-2015 sebesar 1,42. Sedangkan untuk periode 2015-2020, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan akan turun menjadi 1,32 dan pada tahun 2020-2025 menjadi 1,18.

Proporsi penduduk umur produktif (15-64 tahun) pada tahun 2010 diestimasi sebesar 67 % dan akan terus meningkat menjadi 68,6 % (2015) dan 69,1 % (2020). Sedangkan pada tahun 2025 proporsi penduduk umur produktif tersebut mencapai 69,0 %.

Urbanisasi, yang merupakan persentase penduduk perkotaan, di Sumatera Selatan pada tahun 2010 akan mencapai 42,9 %. Pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkat menjadi 47,0 % dan di tahun 2020 menjadi 50,9 %. Sedangkan pada tahun 2025 diprediksikan akan mencapai 54,6 %.

Peningkatan jumlah penduduk Sumatera Selatan dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Akan mendorong perkembangan ekonomi bila penambahan penduduk memperbesar jumlah tenaga kerja yang meningkatkan pertumbuhan produksi dan perluasan pasar yang akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi.

Dampak tidak menguntungkan dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh daerah yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Implikasinya penambahan penggunaan tenaga kerja tidak menimbulkan pertumbuhan output ataupun pertumbuhan tersebut sangat lambat dibanding pertumbuhan penduduk.

Peserta Keluarga Berencana (KB) baru di Sumatera Selatan pada tahun 2004 mencapai 229.014 orang, melampaui target yang ditetapkan sebesar 122.510 orang atau naik 102,92 %. Saat ini belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. Disamping itu, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang.

*B.1.3.
Kondisi
Keluarga
Berencana*

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah yaitu 1,3 persen. Hal ini disebabkan keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap dalam aspek kesetaraan dan keadilan gender.

Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Program Keluarga Berencana dapat berhasil karena ditopang oleh kemajuan pendidikan, peningkatan mobilitas penduduk, bertambahnya wanita dalam angkatan kerja, dan lain-lain. Namun demikian masalah internalisasi motivasi melaksanakan KB tampaknya belum optimal.

Peningkatan kualitas penduduk merupakan langkah yang penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan.

*B.1.4.
Sistem
Administrasi
Kependudukan*

Dalam rangka membangun sistem pembangunan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, penataan sistem administrasi dan sistem informasi kependudukan memegang peranan penting. Kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk miskin sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada informasi dan data yang akurat tentang penduduk miskin.

2. Ketenagakerjaan

Tingkat pertumbuhan tenaga kerja di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 5,80 persen menjadi 7,23, seperti terlihat dari Tahun 2003 – 2004. Hal ini berarti bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini dapat memperjelas bahwa peningkatan pertumbuhan tenaga kerja dan angkatan kerja mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

*B.2.1.
Laju
Pertumbuhan
Angkatan
Kerja*

Tabel 2.3

Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2001 – 2004

No	Jenis Kelamin	2001	2002	2003.	2004	Tingkat Pertumbuhan
Tenaga Kerja						
1	Laki-laki	2.115.792	2.161.676	2.202.363	2.383.677	8,23
2	Perempuan	2.081.364	2.160.610	2.213.728	2.288.337	3,37
3	Total	4.197.156	4.322.286	4.416.091	4.672.014	5,80
Angkatan Kerja						
1	Laki-laki	1.751.048	1.859.670	1.906.024	2.085.549	9,24
2	Perempuan	1.073.663	1.216.639	1.240.488	1.288.446	3,87
3	Total	2.824.711	3.076.309	3.146.512	3.373.995	7,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2004

Di Sumatera Selatan belum semua sektor-sektor ekonomi yang ada mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Hal ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor Pertanian, di mana 64,63 persen tenaga kerja di wilayah tersebut ditampung oleh sektor Pertanian dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2003 yaitu sebesar 66,02 persen.

B.2.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 2.4.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Per Sektor	2003	2004
Sektor Primer (A)		
Pertanian	66,02	64,63
Sektor Sekunder (M)		
Pertambangan	0,78	0,54
Industri	4,6	3,96
Listrik, Gas, Air	0,09	0,12
Bangunan	4,07	3,16
Sektor Tersier (S)		
Perdagangan	12,6	14,81
Angkutan/Komunikasi	4,06	3,70
Keuangan	0,43	0,86
Jasa – jasa	7,29	8,19
Lainnya	0,04	0,02
Jumlah	100	100
N	2.842.963	2.727.134

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2004

Diketahui bahwa Sektor Pertambangan yang memberikan kontribusi besar pada PDRB tidak mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sektor pertanian. Hal ini terjadi karena sektor pertanian adalah sektor yang relatif padat tenaga kerja sementara sektor pertambangan adalah sektor yang termasuk padat kapital (pertambangan besar).

Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMR) merupakan kebijakan Pemerintah setempat. Di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dan telah melampaui Kebutuhan Fisik Minimum maupun Kebutuhan Hidup Minimum (KFM/KHM) yang ditetapkan. Pada Tahun 2004, UMR Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 460.000, sedangkan nilai KFM/KHM sebesar Rp. 496.265. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mempunyai kepedulian yang cukup baik terhadap masalah ketenagakerjaan.

B.2.3. Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.5.

Perkembangan UMR dan KFM/KHM di Sumsel (Rp)

Tahun	UMR	KFM/KHM	Persentase
2001	255.000	298.863,	85,32
2002	331.500	331.536,26	90,09
2003	403.500	403.252	100,06
2004	460 000	496.265	92,69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumsel 2004

Dengan menggunakan konsep baru, dimana menganggur didefinisikan sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum bekerja, maka angka pengangguran di Sumatera Selatan tahun 2004 sebesar 8,37%.

Permasalahan tenaga kerja yang secara umum dialami Indonesia juga terjadi di Sumatera Selatan, yaitu semakin besarnya angka pengangguran terutama di perkotaan. Tahun 2004, angka pengangguran terbuka di Sumatera Selatan sebesar 9,15 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun persentase ini menunjukkan angka yang masih cukup besar yaitu 303.000 orang.

B.2.4. Angka Pengangguran Terbuka

Di perkotaan jumlah penganggur terbuka lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan. Selain itu, berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) yaitu 36,4 persen, diikuti

lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 39,19 persen dan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 18,73 persen. Sedangkan lulusan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 5,86 persen. Berdasarkan tingkat umur, penganggur terbuka terbesar terdapat pada kelompok usia muda (15-19 tahun) yaitu 34,7 persen.

Akibatnya semakin banyaknya jumlah pekerja yang bekerja disektor informal menyebabkan sektor ini menjadi kurang produktif dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan pekerja rawan terjatuh dibawah garis kemiskinan (*near poor*). Disamping itu terjadi fenomena dimana semakin meningkatnya jumlah setengah pengangguran khususnya di sektor informal dan sektor Pertanian.

Kualitas pekerja di Sumatera Selatan antara lain dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan angkatan kerja Sumatera Selatan pada tahun 2004, sebagian besar adalah tamatan SMU ke bawah yaitu sebesar 89 persen. Sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) hanya sebesar 2,55 persen.

B.2.5. Kualitas Pekerja

Rendahnya kualitas pekerja di Sumatera Selatan tidak hanya terjadi pada pekerja yang berpendidikan menengah ke bawah tetapi terjadi pula pada pekerja yang berpendidikan diploma atau sarjana. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran tamatan pendidikan tinggi memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 4,06 persen untuk tamatan diploma dan 3,51 persen untuk yang bergelar sarjana. Kondisi ini membuka peluang bagi pekerja asing untuk merebut pasar kerja di wilayah Sumatera selatan.

3. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan pilar terpenting dalam pembangunan ekonomi, karena secara langsung pendidikan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja disamping itu pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain variabel kesehatan dan ekonomi. Pembangunan sektor Pendidikan tidak hanya diarahkan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri serta relevansi dengan kebutuhan pasar kerja dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Dalam orientasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produksi, peran SDM biasanya lebih dianggap sebagai instrumen atau salah satu faktor produksi saja. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai alat untuk memaksimalkan kepuasan maupun memaksimalkan keuntungan. Konsekuensinya, peningkatan SDM terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, *link and match*, dan sebagainya. Dengan demikian kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi demi memenuhi tuntutan masyarakat industrial yang cenderung individualistis.

Mutu pendidikan di Sumatera Selatan maupun secara nasional pada umumnya selama ini selalu menuai kritik mengenai masih rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan ini antara lain dilihat dari tingkat pengangguran terdidik yang semakin tinggi, rendahnya keterampilan para lulusan SMU sehingga tidak terserap dalam dunia pekerjaan serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki para lulusan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, proses belajar mengajar yang belum berkualitas, sarana dan prasarana penunjang PBM yang belum memadai, kurikulum yang sarat dengan beban dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai.

Gambaran mengenai keseimbangan murid dan guru yang tersedia selama tahun 2003/2004 ditunjukkan dengan rasio murid guru di mana rasio murid-guru TK sebesar 13,92, SD sebesar 21,22, SMP sebesar 16,12, dan SMU sebesar 15,99. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa rasio tersebut semakin baik untuk kondisi pendidikan.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pendidikan termasuk program wajib belajar 9 tahun. Tetapi hingga kini hasilnya belum maksimal. Belum maksimalnya pencapaian target pendidikan antara lain diukur dari beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka putus sekolah, dan angka melek huruf.

Hingga tahun 2004 APS di Sumatera Selatan untuk usia 7-12 tahun sebesar 97,24 naik sedikit dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 96,70. Untuk usia 13-15 tahun mengalami kenaikan, dari 78,65 pada tahun 2003 menjadi 83,58 pada tahun 2004 sedangkan untuk usia 16-18 tahun naik dari 44,57 tahun 2003 menjadi 51,06 pada tahun 2004.

B.3.1. Mutu Pendidikan

B.3.2. Angka Partisipasi Sekolah

Meskipun terjadi perbaikan indikator pencapaian tingkat pendidikan tetapi secara umum hal ini masih dianggap rendah. Program wajib belajar 9 tahun misalnya masih belum dianggap berhasil sebab angka Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara rata-rata baru mencapai 76,08. Faktor penyebabnya antara lain karena faktor ekonomi, geografis, daya tampung dan kultur yang kurang mendukung.

*B.3.3.
Angka
Partisipasi
Kasar*

Disamping itu, APK untuk sekolah menengah umum (SMU) masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 51,06 di tahun 2004. Hal ini berarti bahwa hanya setengah dari jumlah penduduk usia sekolah SMU yang sedang mengenyam pendidikan SMU, sisanya tidak melanjutkan sekolah dengan berbagai macam alasan. Dilihat dari persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan, pada tahun 2004 lebih 80% penduduk Sumatera Selatan hanya menamatkan pendidikan SMP kebawah, 16,24% yang menamatkan jenjang pendidikan SMU dan hanya sebagian kecil yang menamatkan jenjang pendidikan tinggi (diploma dan sarjana).

Tingginya angka putus sekolah di Sumatera Selatan antara lain dapat dilihat pada angka putus sekolah di tahun 2004 tingkat SD sebesar 1,22%, tingkat SMP 1,30% dan tingkat SMU 1,36%. Pada jenjang pendidikan SD & SMP angka putus sekolah masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar khususnya untuk tingkat SMP belum memadai. Tingginya biaya pendidikan dianggap sebagai faktor yang paling dominan banyaknya anak-anak usia sekolah (SD dan SMP) yang putus sekolah.

*B.3.4.
Angka Putus
Sekolah*

Belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan antara lain dapat dilihat dari jumlah sekolah yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan dan angka partisipasi sekolah antara daerah pedesaan dan perkotaan. Jumlah sekolah di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan terlebih bagi sekolah-sekolah swasta. Selain itu angka partisipasi sekolah di daerah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.

*B.3.5.
Akses
Pelayanan
Pendidikan*

Diakui selama ini bahwa tenaga pendidik (guru) baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat terbatas. Kualitas tenaga pendidik saat ini masih relatif rendah, hal ini antara lain dapat dilihat dari proporsi guru SD yang tamat pendidikan DII masih relatif kecil. Kemudian proporsi guru SMP yang tamat DIII juga rendah dan proporsi guru SMU yang tamat S1 masih terbatas. Selain itu distribusi tenaga pendidik juga belum merata khususnya untuk jenjang pendidikan SMP/SMU/ sederajat.

Manusia (rakyat) seyogyanya merupakan tujuan utama dari pembangunan di mana kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya partisipasi dan pemberdayaan manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

*B.3.6.
Sumberdaya
Manusia*

4. Perpustakaan

Upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan dapat didukung dan dilakukan melalui penyediaan layanan dan fasilitas serta peningkatan minat baca.

Kondisi perpustakaan umum dan daerah Sumatera Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat dari sisi jumlah, koleksi, pengunjung, dan fasilitas layanan. Sayangnya gambaran data tentang kondisi perpustakaan umum dan daerah baik yang ada di kabupaten/kota maupun Provinsi Sumatera Selatan belum terdata secara lengkap dan menyeluruh. Untuk itu, menjadi tugas ke depan untuk mengatasi masalah ketersediaan data tentang perpustakaan umum, perpustakaan khusus (universitas, sekolah, dan lainnya), koleksi buku, jumlah pengunjung, dan layanan perpustakaan keliling.

*B.4.1.
Kondisi
Perpustakaan*

5. Pemuda dan Olah Raga

Keberadaan pemuda merupakan aset sebagai kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan, namun sekaligus memerlukan keseriusan dan perhatian dalam hal pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan daerah, bangsa dan negara. Eksistensi organisasi yang telah ada perlu ditingkatkan dan dimantapkan lagi semangat kepeloporannya dalam pembangunan terutama dalam menghadapi era globalisasi.

*B.5.1.
Kepemudaan*

Rendahnya pembinaan dan pengembangan pemuda ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan di segala bidang, terbatasnya kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, menurunnya jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan, serta banyaknya pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan napza dan minuman keras.

Kondisi keolahragaan, baik olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat masih membutuhkan perhatian dan pembinaan yang berkelanjutan. Program-program seperti Sumatera Bangkit dan sejenisnya perlu dirancang dengan lebih terencana dan bertahap (gradual) agar dapat memberikan hasil yang optimal.

B.5.2. Keolahragaan

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai agar pembibitan dan pembinaan olahraga dapat meningkat dan merata di seluruh daerah, dimulai dari lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan dan permukiman. Terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun ketika PON yang dilangsungkan di Sumatera Selatan, perlu dipelihara dan diberdayakan pemanfaatannya sebaik mungkin.

6. Kesehatan

Peningkatan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan tetapi merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun beberapa indikator kunci menunjukkan adanya perbaikan namun bila dibandingkan dengan angka secara nasional, indikator kunci di Sumatera Selatan masih tidak lebih baik dibandingkan dengan angka nasional.

Angka harapan hidup di Sumatera Selatan diestimasi akan mencapai 69,2 tahun pada periode 2005-2010. Pada periode 2010-2015, angka harapan hidup tersebut akan mencapai 71,2 dan menjadi 72,7 pada periode 2015-2020. Sedangkan pada periode 2020-2025, angka harapan hidup akan menjadi 73,6. Angka harapan hidup Sumatera Selatan ini relatif sama dengan angka nasional. Kondisi ini mengindikasikan pelayanan kesehatan masih relatif rendah khususnya penanganan terhadap ibu hamil dan balita. Sebenarnya faktor utama penyebab angka kematian bayi dan ibu dapat dicegah apabila kinerja pelayanan kesehatan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dengan standar pelayanan yang baik.

B.6.1. Angka Harapan Hidup

Jumlah fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu pada tahun 2004 masing-masing berjumlah 39 unit, 221 unit, dan 944 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah dokter pada

B.6.2. Pelayanan Kesehatan

tahun 2003 ada 896 orang dan pada tahun 2004 menjadi 746 orang. Sementara jumlah perawat dan bidan selama 3 tahun terakhir sebanyak 5.008 orang, 3.420 orang, dan 5.438 orang.

Disamping itu terdapat perbedaan standar pelayanan kesehatan yang cukup jauh antara unit kesehatan. Pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat jauh berbeda dengan standar pelayanan di Rumah Sakit (RS), antara RS swasta dengan RS pemerintah dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala.

Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis (banyak penduduk miskin yang tinggal didaerah perdesaan/pedalaman) dan adanya kendala biaya. Pemenuhan kepuasan mendapatkan pelayanan kesehatan masih didominasi oleh penduduk berpendapatan tinggi, disamping itu belum adanya jaminan sosial kesehatan bagi penduduk miskin menjadikan kebutuhan ini menjadi relatif mahal.

Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Perkembangan yang terjadi saat ini ada kecenderungan lembaga kesehatan menjadi lembaga bisnis sehingga semakin memperlebar jurang kesempatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Sementara itu, akses masyarakat miskin terhadap rumah sakit menjadi terbatas akibat adanya motif *profit oriented* yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga kesehatan tidak terkecuali pada lembaga milik pemerintah sehingga lembaga kesehatan tidak lagi menjadi *public goods* tetapi telah berubah menjadi *private goods*.

Secara nasional, bangsa ini memang mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Hal ini berlaku pula untuk tenaga dokter spesialis. Disamping itu banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua per tiga dokter spesialis berada di daerah perkotaan khususnya di kota Palembang.

Meningkatnya anggaran kesehatan bisa dijadikan salah satu pertanda adanya upaya perbaikan kesehatan masyarakat meskipun hal ini tidak terjadi secara otomatis. Tidaklah suatu keharusan bahwa anggaran kesehatan yang meningkat berarti keadaan kesehatan masyarakat meningkat.

B.6.3. *Tenaga Kesehatan*

7. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial harus ditempatkan dalam suatu kesatuan yang saling melengkapi.

Berbicara soal pembangunan sosial maka berbicara soal keadilan. Karena dengan adanya aspek keadilan maka anggota masyarakat memiliki cara dan kesempatan memperoleh akses untuk menghasilkan kebutuhan yang memadai bagi diri beserta keluarganya. Akses ini bisa jalur-jalur sosial politik maupun sumber-sumber ekonomi. Dari aspek keberlanjutan maka jaminan sistem perlindungan sosial tidak hanya berlaku secara temporer. Sementara itu dari aspek melibatkan segenap masyarakat untuk mencegah konflik sosial, berarti anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi keluarga, komunitas dan masyarakatnya.

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial menunjukkan gambaran obyektif tentang hasil pembangunan. Wajah pembangunan secara langsung maupun tidak, akan melihat pada persoalan-persoalan ketimpangan sosial, kesempatan kerja yang sempit dan juga potret kemiskinan. Di satu sisi ada sebagian kecil masyarakat yang menguasai sebagian besar pendapatan nasional, sementara di sisi lain mayoritas orang tetap dalam keterbelakangan dan menjadi korban dari beragam bencana akibat praktek pembangunan. Dari keterkaitan antara dua sudut ini, maka gagasan, penjabaran dan sekaligus implemetasi peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial perlu dilakukan.

Dalam menggambarkan keadaan sosial daerah, perlu diketahui banyaknya fasilitas sosial atau sumber-sumber kesejahteraan sosial yang terdapat di daerah tersebut. Jumlah panti asuhan yang dikelola swasta dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir. Begitu pula dengan rasio banyaknya anak asuh terhadap jumlah panti asuhan yang pada tahun 2003 sebesar 45,70 mengalami penurunan menjadi 45,09 pada tahun 2004.

*B.7.1.
Keadaan
Sosial Daerah*

Secara umum, pada tahun 2004 jumlah penduduk yang mempunyai masalah-masalah sosial di Sumatera Selatan menurun dibanding tahun sebelumnya. Beberapa masalah sosial yang perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusi penyelesaiannya oleh pemerintah Sumatera Selatan adalah anak terlantar dan anak nakal, penduduk tuna susila (WTS dan waria), pengemis dan gelandangan, korban penyalahgunaan narkotika, penyandang cacat, bekas penderita penyakit kronis, bekas narapidana, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan, korban bencana alam, dan anak jalanan.

B.7.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sumatera Selatan yang masih belum tertanggulangi menunjukkan bahwa kemiskinan relatif juga adalah persoalan penting untuk diatasi karena akan berdampak pada kerawanan sosial. Anak jalanan, pengamen, pekerja seks komersial, pemalak kendaraan umum, pelaku kejahatan akibat faktor ekonomi, parkir tidak resmi, dan sebagainya, mungkin akan memandang dirinya sebagai orang yang miskin bukan dari ukuran pendapatan minimum. Mereka mengukur kemiskinannya dari indikator sosial yang diperbandingkannya dari orang yang dianggap kaya. Meskipun mereka dinyatakan sebagai penyandang masalah kesejahteraan belum tentu hal itu disebabkan oleh latar belakang kemiskinan keluarga mereka sebelumnya, melainkan hal demikian menggambarkan adanya frustrasi sosial yang melahirkan budaya kemiskinan.

Masalah PMKS selama ini belum ditangani secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih belum akuratnya data mengenai jumlah dan jenis PMKS, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, rendahnya kualitas aparatur pemerintah dalam penanganan PMKS serta kurangnya partisipasi masyarakat secara luas dalam mengatasi masalah PMKS tersebut.

Lemahnya penanganan pasca bencana baik bencana alam maupun bencana sosial seperti kerusuhan dan konflik menunjukkan rendahnya inisiatif aparatur yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penanganan bencana. Kemudian ketidakmampuan mengidentifikasi kebutuhan dalam penanganan bencana menyebabkan proses tanggap darurat menjadi lambat dan bertele-tele. Kebutuhan perahu penyelamat, tenda pengungsi, alat berat, evakuasi korban, personil tim SAR dengan peralatan yang memadai, tim kesehatan, kantong mayat, dan logistik baru terealisasi ketika korban sudah pasrah dan frustrasi dengan nasibnya. Satkorlak penanggulangan bencana menjadi lebih birokratis acapkali menjadi penghambat tersalurnya bantuan masyarakat bagi korban bencana.

B.7.3. Penanganan Bencana

Belum berkembangnya filantropi masyarakat menunjukkan belum adanya lembaga publik yang dapat dipercaya untuk mengelola dana dari kedermawanan sosial (filantropi) masyarakat. Yang selama ini baru terjadi adalah bersifat temporer ketika ada bencana dan umumnya hanya digagas oleh lembaga pers sehingga keberlanjutannya menjadi kurang berkembang. Padahal dana perlindungan dan kesejahteraan sosial tidak dapat dibebankan semuanya kepada pemerintah. Harus ada mekanisme keterlibatan masyarakat khususnya yang mampu (kaya) untuk secara sukarela maupun sebagai suatu bentuk kewajiban yang melekat menyumbang bagi kegiatan sosial. Pengembangan filantropi menunjukkan adanya bukti kongkret dari peran aktif masyarakat dalam pembangunan sosial.

*B.7.4.
Dana
Filantropi*

8. Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan dan daerah miskin (daerah tertinggal) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan betapa krusialnya masalah kemiskinan dalam proses pembangunan.

Karakteristik kemiskinan di Sumatera Selatan secara umum memiliki ciri yang relatif sama, yaitu bahwa bagian terbesar dari kelompok miskin ini terdapat didaerah pedesaan dan umumnya bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki tanah sendiri. Kalaupun dari mereka ada yang memiliki tanah luasnya relatif sempit sehingga hasil produksinya tidak dapat memenuhi standar hidup yang layak. Ciri lainnya adalah bahwa mereka umumnya penganggur atau setengah penganggur. Pekerjaan yang dapat diakses frekuensinya tidak teratur dan terbatas serta tidak menghasilkan pendapatan yang memadai bagi standar hidup yang wajar. Mereka ini terdapat baik diwilayah perkotaan (urban) maupun diwilayah pedesaan (rural).

*B.8.1.
Karakteristik
Kemiskinan*

Banyak dari kelompok miskin memperoleh pendapatan dari berusaha sendiri, yaitu dari apa yang biasanya disebut dengan sektor informal. Sifat usaha mereka adalah kecil dan terbatas dikarenakan ketiadaan modal. Pada umumnya sebagian besar terdapat terutama di wilayah urban, namun juga dapat ditemukan di wilayah rural dalam bentuk sektor informal non pertanian di pedesaan.

Kemiskinan permanen yang dialami oleh penduduk miskin, di samping terjadi akibat kurang terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar (*basic need rights*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, namun dapat juga muncul dalam berbagai dimensi seperti keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterasingan. Dimensi

kemiskinan yang demikian akan memunculkan wilayah (kawasan) yang menjadi kantong-kantong kemiskinan atau daerah-daerah tertinggal baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat bahwa pada tahun 2004 dari 6.798.190 jiwa penduduk Sumatera Selatan terdapat penduduk miskin sebanyak 1.379.106 jiwa atau 20,91 persen. Diantaranya terdapat 584.022 jiwa penduduk yang tergolong fakir miskin (sangat miskin). Sampai dengan tahun 2004 penduduk miskin yang telah difasilitasi pelayanan pemerintah baru tercatat sebanyak 49.619 jiwa atau 29.943 Kepala Keluarga.

B.8.2.
*Penduduk
Miskin*

Adanya daerah di Sumatera Selatan yang masuk dalam kategori miskin atau tertinggal sebanyak 533 desa menunjukkan adanya perbedaan dalam determinasi pengelolaan potensi ekonomi (sumberdaya produktif) baik sumberdaya alam, tenaga kerja, luas wilayah, dan modal. Perbedaan demikian akan menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi rendah dan pendapatannya juga rendah. Dampaknya adalah sumber akumulasi modal dari tabungan menjadi rendah, sehingga investasi produktif yang dapat diciptakan adalah juga rendah. Pada akhirnya kondisi demikian semakin memperparah situasi kemiskinan yang berlangsung.

B.8.3.
Desa Miskin

Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Masalah pertanahan di Sumatera Selatan ditunjukkan oleh semakin sering dan meluasnya sengketa agraria. Sengketa agraria di hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan sering dilatarbelakangi konflik agraria akibat tidak terakomodasikannya hukum dan hak masyarakat adat atas tanah oleh hukum nasional dalam bentuk HPH, HGU dan HTI dan hingga kini belum terselesaikan berdasarkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Data LBH Palembang menunjukkan selama 10 tahun dari tahun 1994 sampai 2004 ada 168 kasus tanah.

B.8.4.
*Masalah
Ketimpangan
Lahan*

Kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi persoalan bagi Sumatera Selatan. Perpindahan penduduk dari desa (*ulu*) ke kota (*ilir*) merupakan refleksi ketidakmerataan pertumbuhan dan ketidakseimbangan fasilitas pembangunan antar daerah. Penduduk dari daerah yang pertumbuhannya rendah dan sedikit fasilitas pembangunannya cenderung pergi ke daerah yang pertumbuhannya tinggi dan banyak fasilitas pembangunannya. Dengan demikian urbanisasi timbul karena pertumbuhan kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan desa. Ditambah dengan kenyataan bahwa fasilitas pembangunan daerah perkotaan jauh lebih banyak daripada di daerah pedesaan.

B.8.5.
*Masalah
Kesenjangan
Daerah*

Dalam konteks ekonomi, masalah utama ketidakmerataan di Sumsel adalah menyangkut kegiatan produksi di sektor pertambangan khususnya minyak dan gas (migas). Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan kategori kesenjangan antar daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Produksi pada sektor migas ternyata sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Adanya kegiatan pertambangan dan industri migas ternyata telah meningkatkan dualisme ekonomi antara sektor tradisional dengan sektor modern.

*B.8.6.
Masalah
Ketidakmerataan
Pembangunan*

9. Kebudayaan

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan budaya akan berdampak pada semakin menurunnya kualitas pengelolaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, sehingga kualitas pelayanannya belum optimal.

*B.9.1.
Pengelolaan
Budaya*

Derasnya arus globalisasi mengakibatkan makin menipisnya batas-batas negara terutama dalam konteks sosial budaya, sehingga tidak ada budaya yang tidak lepas dari pengaruh budaya global. Masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif dibandingkan dengan budaya global yang positif dan produktif, yang ternyata mempengaruhi dinamika sosial dan budaya masyarakat sehingga mampu mengikis nilai-nilai budaya daerah, nilai-nilai solidaritas, keramahtamahan dan rasa cinta pada daerah.

Pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya perlu diusahakan dengan tujuan agar mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, memperkuat jati diri daerah, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni masyarakat memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan seni budaya serta memberikan inspirasi dan gairah membangun. Upaya ini tentu saja perlu didukung oleh iklim serta sarana dan prasarana yang memadai.

*B.9.2.
Pembinaan
Budaya*

10. Agama

Kehidupan beragama di Sumatera Selatan selama ini berlangsung harmonis dan kondusif. Kondisi ini lebih disebabkan oleh adanya rasa toleransi yang tinggi diantara pemeluk agama. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya jumlah tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang majemuk seperti masjid, gereja, vihara, pura, dan sebagainya.

Tingkat kehidupan beragama di Sumatera Selatan perlu di rekam secara lebih lengkap terkait dengan jumlah tempat ibadah, pondok pesantren, ustad, kiai, santri, dan jamaah haji baik yang ada di kabupaten/kota maupun di Provinsi Sumatera Selatan sendiri.

B.10.1. *Kondisi Kehidupan Beragama*

11. Perempuan dan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan kehidupan sumberdaya manusia. Demikian pula halnya dengan kehidupan anak, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya.

Peranan perempuan dalam pembangunan sebenarnya telah mengalami peningkatan. Dibukanya kesempatan pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi perempuan sebenarnya telah menunjukkan hal tersebut. Namun demikian permasalahan yang terkait dengan latar belakang kultural dari ideologi *ibu-isme* yang sebenarnya adalah buatan manusia dan tidak bersifat kodrati ternyata masih mengakar pada sebagian besar masyarakat. Akibatnya masih sering dirasakan permasalahan yang membebani perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, dan bahkan rendahnya peran dalam pengambilan keputusan termasuk di bidang politik.

B.11.1. *Peran dan Kedudukan Perempuan*

Peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, karena pemahaman masyarakat dan program pembangunan yang kurang peka terhadap gender. Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga masih rendah dan peranannya dalam pengambilan keputusan terutama bagi nasib perempuan itu sendiri belum optimal.

Perlindungan anak terutama dari golongan penduduk miskin dirasakan masih belum optimal. Implikasi pembangunan kota yang

menekankan pada aspek fisik spasial telah mendorong munculnya komunitas anak jalanan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Program pemberdayaan anak jalanan ternyata tetap saja tertular wabah virus korupsi. Akibatnya intensitas dan frekuensi anak yang hidup di jalan semakin bertambah dan penanganannya belum menemukan resep mujarab.

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan pengarusutamaan gender dalam kehidupan masyarakat belum berjalan. Data dari *Women's Crisis Centre (WCC)* Palembang mencatat sepanjang tahun 2004 terjadi 233 kasus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di wilayah Sumsel. Terdiri dari 146 kasus perkosaan, 57 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 14 kasus pelecehan seksual, dan 16 kasus lainnya.

*B.11.2.
Tingkat
Kekerasan
terhadap
Perempuan
dan Anak*

Faktor yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah belum adanya perangkat hukum yang mampu mengakomodir kepentingan perempuan korban kekerasan dan berupaya mempersoalkan kasusnya. Undang-Undang tentang KDRT baru disahkan September 2004 dan masih dianggap kontroversial. Sementara UU perlindungan anak telah lebih dahulu berlaku, namun dalam prakteknya UU ini tidak dipandang sebagai *lex specialis* di mana aparat hukum masih menggunakan pasal KUHP terhadap pelaku kekerasan anak yang sanksi pidananya lebih ringan.

Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak termasuk di dalamnya mengenai ketersediaan data mengenai lembaga atau individu yang berkomitmen dalam perlindungan perempuan dan anak. Lemahnya PUG juga dapat dilihat dari hubungan pendidikan terhadap perempuan dan banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

C. Ekonomi

Perkembangan dan kemajuan ekonomi Sumatera Selatan dapat dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk melihat kemajuan ekonomi suatu wilayah diantaranya pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pendapatan per kapita, industri dan perdagangan, investasi, dan kontribusi sektor-sektor ekonomi.

Percepatan pembangunan ekonom Sumatera Selatan melalui upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi secara makro harus pula dapat menciptakan dampak berganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Keuangan Daerah

Banyak keuntungan yang diperoleh dari diberlakukannya Otonomi Daerah pada Tahun 2001, hal ini terlihat dari peningkatan penerimaan daerah di Sumatera Selatan. Penerimaan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2004 tidak seperti tahun sebelumnya yang bertumpu pada penerimaan bagian Dana Perimbangan, namun lebih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada realisasi Pendapatan Daerah (PATDA), tingkat pertumbuhan penerimaan di Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat. Pada tahun 2003, realisasi penerimaan PATDA sebesar Rp. 928.023.425.651,48 sedangkan pada tahun 2004 meningkat sebesar 17,26 % menjadi Rp. 1.088.213.436.390,85. Dari gambaran penerimaan PATDA, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menunjukkan trend peningkatan dalam memberikan kontribusinya terhadap PATDA sebesar 45,32 %. Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoto (PBB-KB) merupakan sumber PAD yang terbesar kontribusinya.

*C.1.1.
Pendapatan
Asli Daerah*

Pada Tahun 2004, PAD ditargetkan sebesar Rp. 614,78 milyar atau sebesar 52,37 persen dari total pendapatan, sedangkan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 559,03 milyar atau 47,63 persen dari total pendapatan. Pada tahun 2002 relaisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota meningkat dari Rp. 2.450,50 milyar menjadi Rp. 2.756,74 milyar (naik 12,50 %). Hal yang sama juga terjadi pada peningkatan PAD dari tahun ke tahun.

*C.1.2.
Pendapatan
Asli Daerah*

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya dapat menimbulkan kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antara lain adalah kekayaan alam, penduduk dan tenaga kerja, barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat.

Secara umum kondisi perekonomian Sumatera Selatan tahun 2004 lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya. Banyak faktor yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan, diantaranya adalah *Agregate demand* domestik yang meningkat, terutama pada Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto melalui sektor bangunan. Pertumbuhan sektor bangunan yang relatif cepat dikarenakan dua hal, yaitu kedudukan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XVI dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Sejauh ini dapat dilihat bahwa Sumatera Selatan telah sukses melakukan otonomi daerah, ini terlihat dari semakin membaiknya perhatian pemerintah setempat dalam memperbaiki dan melengkapi prasarana di kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Di satu sisi dengan terpilihnya Sumatera Selatan sebagai tempat penyelenggaraan PON XVI banyak peluang berkembangnya sektor-sektor lainnya, terutama sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan input, sebagai dampak *backward* dan dampak *forward*, yaitu efek mendorong pertumbuhan sektor lain, dalam hal ini sektor jasa dalam arti luas.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha, mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 pada tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,88 persen. Hal ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan aktifitas-aktifitas ekonomi non-migas pada periode yang sama, tumbuh dengan 6,17 persen dari 5,80 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih baik dari pertumbuhan perekonomian nasional.

Terdapat tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Sumatera Selatan, yaitu Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Bangunan, dan Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan. Dalam perkembangannya Sektor Angkutan dan Komunikasi tumbuh dengan cepat, hal ini terlihat jelas dari tingginya pertumbuhan yang dicapai oleh subsektor Komunikasi, ini didorong oleh pengembangan teknologi berupa teknologi telepon seluler yang semakin beragam.

Di Sektor Angkutan, sumber pertumbuhan berasal dari Subsektor Angkutan Udara. Hal ini dikarenakan semakin murahnya biaya penerbangan pesawat dengan berbagai jurusan penerbangan. Pertumbuhan tidak saja dialami oleh subsektor Angkutan Udara, tetapi juga dialami oleh angkutan rel, jalan raya dan laut walaupun peningkatannya tidak sebesar subsektor Angkutan Udara.

C.2.1. *Angka Pertumbuhan Ekonomi*

C.2.2. *Sektor Pemicu Pertumbuhan*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terpilihnya Sumatera Selatan sebagai tuan rumah PON XVI telah banyak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan wilayah dan pembangunannya, seperti yang terjadi pada sektor Bangunan dimana aktifitas sektor tersebut terus meningkat dengan cepat. Pada tahun 2004 pertumbuhan sektor ini mencapai 7,56 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,69 persen.

Pertumbuhan juga terjadi pada sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, pada tahun 2004 saja sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,12 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,27 persen, hampir semua sektor mengalami pengutan pertumbuhan.

Pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan yang secara perlahan membaik, didukung oleh sektor primer yang banyak memberikan kontribusi yang besar yakni sebesar 45,34 persen pada tahun 2004 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni 44,00 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya peranan sektor pertambangan pada tahun 2004 sebesar 25,85 dari 23,93 persen pada tahun sebelumnya.

Peningkatan terjadi pada subsektor Pertambangan Migas, sedangkan subsektor Pertambangan Non Migas terjadi penurunan yaitu sebesar 2,88 persen menjadi 2,77 persen. Sedangkan sektor Pertanian yang masih tergabung dalam sektor primer, peranannya menurun dari 20,07 persen pada tahun lalu menjadi 19,49 persen pada tahun 2004. Melihat sektor Pertambangan yang memberikan kontribusi paling besar dibandingkan sektor Pertanian dalam sektor primer ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan telah mampu mengolah sumber daya alam yang ada.

Sektor sekunder mengalami penurunan pada Tahun 2004, hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap pembentukan PDRB yang menurun dari tahun sebelumnya, yakni dari 39,39 persen pada tahun 2004, sedangkan pada Tahun 2003 lebih besar yaitu sebesar 40,85 persen. Penurunan pada sektor sekunder ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan kontribusi sektor Industri Pengolahan dari 22,55 persen pada Tahun 2003 menjadi 21,79 persen pada tahun 2004. Kondisi ini juga disebabkan oleh menurunnya kontribusi dari industri Migas dan Non Migas. Hal tersebut terlihat jelas dengan menurunnya peranan industri migas dari 8,98 persen menjadi 8,74 persen. Situasi ini terjadi juga pada sub sektor Non Migas yang mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi terjadi pula peningkatan peranan

yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yang di dorong oleh peningkatan yang terjadi pada sektor Bangunan yaitu sebesar 6,82 persen menjadi 6,90 persen.

Dalam pembentukan PDRB, sektor tersier juga memberikan kontribusi yang cukup berarti, terlihat dari kontribusi yang diberikan pada Tahun 2004 sebesar 15,27 persen, kontribusi yang diberikan oleh sektor ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,14 persen. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB yaitu aktivitas dari sektor Perdagangan dan Sektor Jasa-jasa. Sementara peranan sektor Angkutan dan Sektor Keuangan masih relatif kecil.

Dari ketiga sektor dalam pembentukan PDRB di Provinsi Sumatera Selatan, terlihat bahwa sektor primer yang lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Akan tetapi sektor primer di sini bukan dari sektor Pertanian seperti kebanyakan yang terjadi pada wilayah-wilayah lain di Indonesia, sebuah keistimewaan bagi Sumatera Selatan karena tidak mengandalkan sektor Pertanian dalam pembentukan PDRB tetapi sektor Pertambangan yang jauh lebih menguntungkan karena memiliki nilai jual yang jauh lebih baik dibandingkan sektor Pertanian maupun sektor lainnya.

Dengan memperhitungkan bahwa sektor yang memiliki Rasio Pertumbuhan lebih dari 1 adalah sektor yang memiliki keunggulan dari sisi pertumbuhan (secara relatif lebih dominan dari tingkat nasional), maka sektor dan subsektor yang unggul dari sisi pertumbuhan di Sumatera Selatan adalah :

C.2.3.
Sektor
Unggulan

a. SEKTOR PERTANIAN

- Sub Sektor Tanaman Perkebunan
- Sub Sektor Kehutanan
- Sub Sektor Makanan, Minuman dan Tembakau
- Sub Sektor Tekstik, Barang Kulit dan Alas Kaki
- Sub Sektor Gas

b. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

- Sub Sektor Perdagangan
- Sub Sektor Restoran
- Sub Sektor Angkutan
- Sub Sektor Pengangkutan Jalan Raya

- Sub Sektor Pengangkutan Laut
- Sub Sektor Pengangkutan Udara
- Sub Sektor Jasa Penunjang
- Sub Sektor Bank
- Sub Sektor Adm Pemerintah & Pertahanan

Dengan demikian yang termasuk dalam kategori sektor/sub sektor unggulan dari hasil overlay ini adalah sektor Perkebunan terutama subsektor Tanaman Perkebunan dan Kehutanan, serta subsektor Administrasi Pemerintah dan Pertahanan.

Namun bila diperhatikan, sebagian besar sektor (dan sub sektor) yang termasuk unggulan untuk Sumatera Selatan terkait dengan peran Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan (sektor Pertanian, subsektor tanaman perkebunan, kehutanan dan perikanan), sebagai lumbung energi (sektor Pertambangan dan Penggalian, subsektor Migas, subsektor Penggalian). Selain itu juga terdapat ciri industrialisasi di Sumatera Selatan dimana beberapa sektor dan subsektor juga menunjukkan dominasinya relatif terhadap nasional. Sektor tersebut adalah subsektor Industri Migas, sektor Bangunan, dan beberapa sektor Jasa penunjang lainnya.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran adalah salah satu indikator dari berkembangnya Sektor Pariwisata di suatu wilayah. Disadari betul bahwa sebenarnya aktivitas di Sektor Pariwisata sebenarnya tidak hanya dicatat dalam sektor ini saja, melainkan dapat pula mencakup sektor primer dan sektor sekunder (industri pariwisata).

Walaupun demikian perlu juga kiranya sektor ini mendapatkan perhatian yang lebih proporsional mengingat sektor ini sebenarnya merupakan sektor yang “relatif murah” untuk dikembangkan. Relatif murah maksudnya dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor Pariwisata adalah sektor *non tradable* yang dapat menghasilkan pendapatan daerah (dan masyarakat) bahkan devisa yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan yang lebih berbasis kepada infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia. Tampak bahwa sektor ini menyumbang 12,55 % kepada pembentukan PDRB (hampir menyamai sektor Industri tanpa Migas sebesar 12,85 %).

Sementara bila dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan sektor ini lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional pada Tahun 2004, sehingga menghasilkan rasio pertumbuhan diatas satu. Dengan demikian cukup beralasan kiranya bila

perkembangan Sektor Pariwisata di Sumatera Selatan juga mendapatkan porsi perkembangan dan pembangunan yang cukup tinggi.

Subsektor lainnya yang juga diharapkan mendapatkan perhatian yang cukup tinggi adalah perkembangan jasa bank. Walaupun sub sektor ini hanya menyumbang kurang dari 1% kepada pembentukan PDRB Sumsel, tetapi pertumbuhan bank di Sumsel pada Tahun 2004 mencapai lebih dari tiga kali pertumbuhan secara nasional (rasio pertumbuhan 3,74). Untuk menunjang pembangunan tentu diperlukan investasi baik dari pemerintah, investor dalam negeri maupun luar negeri. Untuk terus menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana masyarakat dengan kebutuhan investasi daerah, bank lah yang memainkan peran untuk mempertemukan keduanya. Dengan demikian pertumbuhan perbankan di Sumatera Selatan perlu juga mendapatkan perhatian yang proporsional.

3. Penciptaan Kesempatan Kerja

Kebijakan makroekonomi diarahkan pada bagaimana pengaruh suatu kebijakan makroekonomi berdampak pada terjadinya penciptaan kesempatan kerja. Kerangka makroekonomi Provinsi Sumatera Selatan adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja agar pertumbuhan dan besarnya angka pengangguran lebih rendah daripada kemampuan perekonomian menyediakan lapangan pekerjaan.

Permasalahan tenaga kerja yang secara umum dialami Indonesia juga terjadi di Sumatera Selatan, yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran terutama diperkotaan. Tahun 2004, angka pengangguran terbuka di Sumatera Selatan sebesar 9,15 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan persentase sebesar itu, secara absolut jumlah pengangguran masih cukup besar yaitu mencapai 303 ribu orang. Tingginya angka pengangguran menunjukkan masih banyak tenaga kerja yang belum tertampung pada lapangan kerja yang tersedia. Seperti terlihat juga pada tabel di atas tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung pencari kerja, maka berakibat pada tingginya angka pengangguran. Permasalahan ini harus menjadi perhatian pemerintah di Sumatera Selatan karena diketahui bahwa tenaga kerja cukup memberikan

C.3.1. Permasalahan Tenaga Kerja

kontribusi dalam pembentukan PDRB ataupun pendapatan daerah lainnya.

Tabel 2. 5.
Tingkat Pengangguran Terbuka penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Daerah tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2004

No	Daerah	2001	2002	2003.	2004
1	Perkotaan Total L+ P	8,42	16,42	19,02	22,03
2	Pedesaan Total L+ P	1,63	7,53	5,99	4,76
3	Total Total L+ P	3,54	10,18	9,65	9,15

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2004

Angka pengangguran terbuka di Sumatera Selatan relatif tinggi yakni mencapai 303.549 orang atau mencapai 9,21 persen dari angkatan kerja tahun 2004. Hal demikian merupakan gejala yang nyata dari masih rendahnya laju pembangunan (pertumbuhan ekonomi) Provinsi Sumatera Selatan.

Tingkat pengangguran tak kentara dapat lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran terbuka. Pengangguran tak kentara sebagian besar berada pada kelompok usia 15 – 24 tahun baik di kota maupun pedesaan. Mereka tidak memiliki penghasilan tambahan ataupun kesempatan untuk meningkatkan pendapatan setingkat dengan pendapatan para pekerja di sektor manufaktur, perdagangan dan jasa.

Salah satu kerangka makroekonomi yang berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja adalah pemantapan ketahanan pangan. Akan tetapi investasi di sektor industri pengolahan yang berbasis pertanian dan padat karya terkendala dengan terbatasnya infrastruktur, ekonomi biaya tinggi, jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kompetisi global antara negara maju dengan negara berkembang tentang aturan perdagangan produk pertanian.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui pembentukan modal dan industrialisasi dapat diindikasikan dari kemampuan Sektor Industri Pengolahan (tidak hanya industri substitusi impor) dalam memperkerjakan 20 – 30 % dari seluruh tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut harus mampu

C.3.2. *Tingkat Pengangguran*

menyediakan lapangan kerja sebesar paling tidak 15 persen per tahun guna menyerap kenaikan angkatan kerja yang meningkat 3 persen per tahun. Angka 3 persen ($0,2 \times 0,15$) ini merupakan proyeksi kenaikan yang didasarkan pada antisipasi tingginya laju pertumbuhan penduduk Sumsel pada periode 1980 – 1990 lalu yang mencapai rata-rata 2,15 persen per tahun.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk membangun proyek-proyek infrastruktur maka diharapkan akan terjadi eksternalitas kegiatan ekonomi yang signifikan. Penciptaan eksternalitas tersebut jelas akan menyerap tenaga kerja baik dalam proyek infrastruktur itu sendiri maupun sektor lain yang terkait seperti di bidang perdagangan, transportasi, persewaan, dan jasa-jasa.

4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan memiliki keterkaitan dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Salah satu sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran. Penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2003 berjumlah 6.518.791 jiwa dan meningkat menjadi 6.798.190 jiwa pada tahun 2004. Sedangkan penduduk miskin Sumatera Selatan pada tahun 2003 sebesar 1.759.715 jiwa atau 26,99 % dan mengalami penurunan sebesar 1.379.346 jiwa pada tahun 2004 atau 21,16 %.

Prospek pengurangan kemiskinan dan pengangguran terbuka sebagai salah satu tujuan kebijakan makro ekonomi pemerintah diharapkan dapat didukung oleh adanya peningkatan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam bidang yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan maka melalui investasi produktif yang mendukung program tersebut diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru yang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 600.000 orang. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang mendorong kenaikan dalam produksi dan meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.

Peningkatan pendapatan masyarakat tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus diikuti dengan pemerataan pendapatan. Dengan demikian diharapkan distribusi pendapatan menjadi lebih merata yang disebabkan oleh peningkatan output dan produktifitas sektor pertanian, tingginya pertumbuhan ekspor manufaktur, turunnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penyediaan barang modal yang ditopang tabungan domestik, tingginya inisiatif penduduk dan SDM (kewirausahaan), dan tingginya produktivitas di segala sektor.

C.4.1. *Pemerataan Pendapatan*

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan masyarakat secara makro dapat diamati dari tingkat perkembangan pendapatan per kapita. Laju kenaikan pendapatan per kapita riil merupakan indikator makroekonomi penting karena ia relatif dapat mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan, baik dalam hal alokasi sumberdaya maupun hasil dari pertumbuhan itu sendiri.

Tingkat pendapatan per kapita yang meningkat akan menaikkan *agregat demand* dan juga mendorong pertambahan output. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi tidak hanya oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga harus berkelanjutan, yakni bagaimana memelihara momentum pertumbuhan. Kemudian juga ditentukan oleh keberhasilan dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Di samping itu sektor pertanian yang dinamis juga dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Walaupun sektor pertanian kontribusinya terhadap PDRB mulai menurun, namun bukan berarti mengalami stagnasi. Perkembangan yang dinamis di Sektor Pertanian diindikasikan dari tingkat kenaikan output (skenario lumbung pangan) dan produktivitas pertanian (produktifitas lahan dan tenaga kerja).

Secara statistik pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2000 -2004 relatif rendah, namun kecenderungan pendapatan per kapitanya relatif tinggi. Keadaan demikian memasukkan Provinsi Sumatera Selatan dalam kategori provinsi dengan pertumbuhan rendah dan pendapatan tinggi (*high income low growth*). Sektor Migas dan Perkebunan ternyata sangat memberi kontribusi pada PDRB sehingga pendapatan tinggi. Sementara, pertumbuhan yang rendah disebabkan terbatasnya investasi baru dan keterbatasan infrastruktur yang dapat mendorong

pertumbuhan pertanian, perdagangan dan industri. Keadaan pertumbuhan rendah dan pendapatan tinggi ini juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Pada Tahun 2004, pendapatan per kapita Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6.037.876 dari 5.883.990 pada tahun sebelumnya dengan migas, lebih rendah dari pendapatan per kapita tanpa migas, yaitu pada tahun 2004 sebesar 4.253.381 turun menjadi 4.079.656.

C.5.1. *Pendapatan Per Kapita*

Tabel 2.6.
Pendapatan Per Kapita Sumsel Tahun 2000-2004
Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dalam Rupiah)

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2000	5.632.436	3.803.841
2001	5.624.717	3.842.073
2002	5.726.084	3.940.006
2003	5.883.990	4.079.656
2004	6.037.876	4.253.381

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2004

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun untuk melihat apakah kue pembangunan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan, masih harus dilihat kembali bagaimana tingkat pemerataan pendapatannya.

6. Industri dan Perdagangan

Dalam beberapa dekade ini peran industri terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDB maupun PDRB Sumatera Selatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 kontribusi sektor ini terhadap PDRB Sumatera Selatan sebesar 17,47 persen, sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,31 persen. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri pada tahun 2004 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114.480 orang atau sekitar 3,7 persen dari total pekerja.

C.6.1. *Kontribusi Sektor Industri*

Namun demikian, pengembangan sektor industri selama ini masih mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan belum optimalnya sektor ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi khususnya pasca krisis ekonomi.

Sedangkan untuk sektor perdagangan juga memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap pembentukan PDRB. Tahun 2004 sektor ini menyumbang sebesar 25,74 persen atau sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2003 yaitu sebesar 0,14 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 438.432 orang atau 14,2 persen dari total pekerja di tahun 2004.

*C.6.2.
Kontribusi
Sektor
Perdagangan*

Neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor-impor Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2004 neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mengalami surplus sebesar 66,45 persen dari Tahun 2003. Artinya sejauh ini laju perdagangan baik ekspor maupun impor berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari ekspor selama periode 2000 - 2004, dimana pada tahun 2004 terjadi kenaikan. Sumatera Selatan memiliki komoditas ekspor yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi seperti karet, minyak dan lemak hewan atau nabati, kayu serta pupuk.

*C.6.3.
Neraca
Perdagangan*

Di sisi impor, Sumatera Selatan menunjukkan penurunan impor setiap tahunnya. Hal ini berarti wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti terlihat pada tahun 2004 nilai impor hanya sebesar 85.8779,9 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 sebesar 101.201,0. dapat dilihat komposisi impor Sumatera Selatan terdiri atas bahan kimia industri dan barang modal seperti mesin dan kendaraan.

Ekspor maupun impor sangat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima dan dikeluarkan oleh wilayah Sumatera Selatan. Hal ini terlihat pada nett ekspor yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya atau dapat dikatakan surplus pada kegiatan ekspor dan impor.

Tabel 2.7.

Neraca Perdagangan Daerah Sumsel Tahun 2004 (000 US \$)

Tahun	Eksport	Import	Nett Eksport
1986	713 016,5	176 301,6	536 714,9
1989	798 874,6	192 897,2	605 977,4
1996	1 274 700,0	206 937,1	1 067 762,9
2000	925 288,2	245 530,4	679 757,8
2001	520 909,4	112 215,7	408 693,7
2002	502 649,3	135 149,5	367 499,8
2003	812 493,2	101 217,0	711 276,2
2004	1 156 241,0	85 877,9	1 070 363,1

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2004

Melihat potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh sektor ini, pemerintah berusaha untuk terus mengembangkan kedua sektor ini sehingga nantinya dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Hal demikian penting karena ekspor Migas tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber penerimaan. Dengan demikian ekspor non Migas terutama hasil industri akan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

7. Koperasi dan UKM

Bidang usaha Koperasi dan (Usaha Kecil dan Menengah) UKM serta sektor informal memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan koperasi dan UKM serta sektor informal yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar dari rakyat Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Peran sektor ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja.

Rendahnya produktivitas koperasi dan UKM dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB yang tidak signifikan. Padahal bila dilihat dari jumlah unit usaha sektor ini meningkat dengan pesat. Kinerja seperti itu berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran dan rendahnya kompetensi kewirausahaan UKM.

*C.7.1.
Produktivitas
Koperasi dan
UKM*

Peningkatan produktivitas UKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan pendapatan, dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.

Permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya akses koperasi dan UKM serta sektor informal terhadap sumber daya produktif tidak terlepas dari lemahnya kualitas SDM pelaku usaha dibidang Koperasi, UKM dan sektor informal. Keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif tersebut antara lain ditunjukkan oleh lemahnya akses dalam permodalan. Faktor utama yang menyebabkan UKM dan sektor informal sulit memperoleh modal usaha dari perbankan, yaitu sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan masih sangat rumit, masih tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan yang diperuntukan bagi UKM dan sektor informal, kurangnya informasi sumber-sumber pembiayaan khususnya dari lembaga-lembaga keuangan alternatif non-bank. Bagi UKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing.

*C.7.2.
Permasalahan
Koperasi, UKM
dan Sektor
Informal*

Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UKM. Sementara kesediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata keseluruh daerah. Selain itu, rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi terlihat dari jumlah unit koperasi di Sumatera Selatan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan koperasi semakin rendah sehingga banyak unit usaha koperasi yang membubarkan usahanya. Diantara koperasi yang aktif tersebut, tidak lebih dari 48 persen yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT). Padahal Rapat Anggota merupakan forum tertinggi dalam pertanggungjawaban kinerja koperasi selama satu tahun. Selain itu, secara rata-rata baru 20 persen koperasi aktif yang memiliki manajer koperasi.

Koperasi dan UKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, diantaranya adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UKM, mahalnya bahan baku bagi kebutuhan produksi UKM disamping prosedur pembayaran bahan baku yang masih secara

tunai sehingga memberatkan pengusaha kecil khususnya dalam aspek permodalan.

Sektor informal saat ini masih dianggap sebagai sektor inferior yang dipersepsikan sebagai sumber kemacetan dan kesemrawutan kota. Sektor informal masih belum dilihat sebagai suatu potensi dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin kota yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

8. Investasi

Peluang investasi penting yang dapat memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan adalah investasi infrastruktur karena merupakan kunci pembuka bagi berkembangnya investasi produktif di bidang lain. Investasi di bidang infrastruktur transportasi dan energi memiliki potensi *return* yang memadai dikarenakan potensi kekayaan alam dan sumberdaya manusia masih belum dikombinasikan secara optimal sebagai faktor produksi bersama dengan faktor produksi modal.

Dana investasi diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Sumatera Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan semakin efisiennya perekonomian. Hal ini dapat di lihat dari ICOR Sumatera Selatan tiga tahun terakhir semakin membaik, hal ini jelas terlihat pada Tahun 2004 sebesar 4,72 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2003 yaitu sebesar 4,49. Nilai ICOR yang semakin baik menunjukkan bahwa investasi di Sumatera Selatan yang cukup kondusif, sehingga pada akhirnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Akan tetapi pemerintah perlu menjaga investor yang telah ada agar dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan.

C.8.1. Nilai ICOR Sumatera Selatan

Tabel 2. 8.

Incremental Capital Output Ratio Tahun 2001 - 2004

Tahun	ICOR
2001	10,71
2002	5,41
2003	4,49
2004	4,72

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2004

9. Pertanian

Kondisi umum wilayah pedesaan di Sumsel menunjukkan adanya tekanan dari pertumbuhan penduduk dan semakin terbatasnya lahan pertanian. Situasi demikian menjadi penyebab yang menurunkan kondisi usaha tani (*deminishing return*) dan menghambat pembangunan pedesaan menuju arah kemandirian. Keadaan pertanian rakyat di pedesaan yang berbentuk usaha tani kecil dengan menanam tanaman pangan dan sedikit hortikultura terutama untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsistence*) ditambah dengan keberuntungan jika mereka memiliki lahan tanaman perkebunan seperti karet atau kopi telah sedemikian rupa mengalami stagnasi sejak krisis.

Pembangunan pertanian yang merupakan kegiatan utama di pedesaan selama ini diarahkan untuk meningkatkan produksi per satuan lahan, bukannya kenaikan produksi per keluarga atau kenaikan pendapatan per kapita. Karena orientasi ditekankan pada penambahan produksi, maka diperlukan program intensifikasi dengan pemakaian input yang makin banyak. Namun demikian, intensifikasi ada batasnya, suatu saat kenaikan produksi total akan terhenti dan *deminishing return* akan berlaku di sektor pertanian. Seharusnya penambahan angkatan kerja yang tak terbatas di sektor pertanian sejak awal dapat diantisipasi. Salah satunya adalah dengan mengusahakan kesempatan kerja non pertanian namun tetap di pedesaan.

Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sebagai daerah pertanian. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), dimana pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Melalui sektor Pertanian banyak terserap tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini. Berdasarkan data Tahun 2004, kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Selatan dengan Migas mencapai 19 persen dari total PDRB.

Potensi lahan lahan atau kawasan budidaya pertanian yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan mencapai 70 persen dari luas wilayah administrasi Sumatera Selatan (8.701.742 ha.). Luas kawasan budidaya pertanian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

C.9.1. Kontribusi Pertanian

C.9.2. Potensi Pertanian

Tabel 2.9.
Luas Kawasan Budidaya Pertanian
Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha.)
1.	Ogan Komering Ulu	72.560
2.	Ogan Komering Ulu Timur	272.514
3.	Ogan Komering Ulu Selatan	389.569
4.	Ogan Komering Ilir	1.375.471
5.	Ogan Ilir	248.709
6.	Muara Enim	499.913
7.	Lahat	324.909
8.	Musi Rawas	734.067
9.	Musi Banyuasin	728.664
10.	Banyuasin	773.228
11.	Palembang	12.656
12.	Prabumulih	20.154
13.	Pagar Alam	49.602
14.	Lubuk Linggau	22.711
Jumlah		5.524.725

Sumber : Sumatera Selatan Dalam Angka, 2004

Sementara itu dari total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6.755.910 jiwa, sebesar 4.117.877 jiwa (65 persen) hidup dengan mata pencahariannya bergerak di sektor pertanian. Dari berbagai komoditas hasil dari sektor pertanian yang ada dan diusahakan di wilayah Sumatera Selatan, ada beberapa komoditi yang merupakan komoditi unggulan yang berasal dari subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung, Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan), Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kopi dan Kelapa), Peternakan (Sapi dan Ayam), Perikanan (Ikan Mas, Nila dan Udang).

C.9.3.
*Komoditi
Unggulan
Pertanian*

Luas areal tanaman padi yang berupa lahan sawah irigasi, sawah pasang surut, sawah lebak dan sawah tadah hujan pada tahun 2004 telah mencapai 513.176 ha, sementara luas panennya baru mencapai 626.831 ha. Hal tersebut secara tersirat mencerminkan sebagian besar lahan sawah tersebut baru dapat digarap satu kali setahun. Tingkat produktivitasnya juga secara rata-rata baru mencapai 3,33 ton gabah kering giling per ha sehingga total produksi padi sawah baru mencapai 2,09 juta ton gabah kering per tahun. Sementara lahan ladang mencapai 275.353 ha dengan

C.9.4.
*Luas Areal
Tanaman
Pertanian*

produktivitas baru mencapai 0,62 ton gabah kering giling per ha per tahun, sehingga total produksi padi ladang sebanyak 169.945 ton per tahun. Target yang ingin dicapai adalah produksi 3,2 juta ton beras per tahun dari tingkat GKG pada tingkat produktivitas 5,1 ton per ha.

Luas areal tanaman jagung telah mencapai 23.859 ha dengan tingkat luas panen yang sama, berarti dalam satu tahun baru dilakukan satu kali penanaman, sedangkan produktivitas 2,73 ton per ha dan tingkat produksi 65,234 ton. Tampak bahwa masih terdapat peluang untuk menambah produksi melalui peningkatan intensitas tanaman dan produktivitas hingga 5 ton jagung pipilan per ha.

Sumatera Selatan juga merupakan penghasil sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah. Luas areal tanaman sayuran dataran tinggi dan dataran rendah 6.608 ha dengan luas areal panen yang sama. Produktivitasnya rata-rata mencapai 5,34 ton per ha sehingga diperoleh produksi 35.270 ton. Dari jumlah produksi tersebut masih ada jenis sayuran yang belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sementara sebagian lainnya pada waktu-waktu tertentu pasokannya berlebihan. Hal ini mengisyaratkan perlunya pengaturan manajemen alokasi ruang dan waktu musim tanam.

Berdasarkan potensi dan kondisi aktual yang ada, masih terdapat peluang untuk meningkatkan produksi dan kualitas sayuran agar mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sayuran dari wilayah lain yang masuk ke pasar lokal. Komoditi hortikultura lain yang juga perlu dikembangkan adalah buah-buahan unggulan seperti duku, durian, manggis, nenas dan jeruk. Bahkan komoditi duku sudah masuk unggulan nasional yang saat ini sedang digarap peta perjalanannya (*road map*) dan RUSNAS oleh Fakultas Pertanian Unsri.

Dilihat dari perimbangan ketersediaan/produksi dan kebutuhan pangan strategis di Sumatera Selatan, pada tahun 2004 terdapat beberapa komoditi yang surplus seperti beras 350.783 ton, jagung 62.445 ton, dan minyak goreng 43.292 ton serta beberapa komoditi yang minus seperti kedelai 25.500 ton, daging 8.135 ton, susu 34.616 ton, ikan 12.194 ton. Sementara itu, produktivitas tanaman pangan pokok seperti padi dan jagung masih di bawah rata-rata nasional. Begitu pula dengan produktivitas buah-buahan masih rendah, kecuali nenas. Hal itu terjadi karena kurang memadainya ketersediaan dan pemakaian sarana produksi dan teknologi pertanian di tingkat petani.

C.9.4. Produksi Pertanian

Skor PPH yang dicapai Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 baru mencapai 73,80 masih dibawah skor nasional sebesar 77,60. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan belum beragam, bergizi, dan berimbang, dimana adanya pangan yang dominan dikonsumsi seperti kelompok padi-padian dan gula, sedangkan kelompok pangan lainnya masih kurang seperti pangan hewani, sayur dan buah. Bila dibandingkan dengan skor ideal yang akan dicapai tahun 2020 yaitu 100, maka konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sedangkan konsumsi beras, gula dan makanan berpati perlu dikurangi sehingga skor PPH dapat meningkat dengan proporsi kelompok pangan yang berimbang.

Permasalahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura diantaranya adalah rendahnya harga produk karena rendahnya kualitas hasil, akses pasar dan persaingan dari pihak lain, permintaan pasar terhadap komoditi yang belum dapat dipenuhi sepanjang tahun atau menurut periode yang diinginkan, dan sebagian besar komoditi masih dihasilkan dalam bentuk produk primer karena belum berkembang dengan baiknya teknologi pengolahan hasil atau usaha agroindustri pada umumnya.

C.9.5. *Permasalahan Pertanian*

Petani umumnya tidak mempunyai agunan yang layak, menjadi masalah klasik. Karena itu pemerintah selalu turun tangan untuk memberikan bantuan ataupun pinjaman modal dengan berbagai model meskipun masih belum menyentuh semua petani. Namun demikian ternyata tingkat kemacetannya cukup tinggi karena berbagai penyimpangan yang dilakukan. Idealnya tentu petani akan dapat dididik dengan baik dan disiplin kalau mendapat pinjaman dari perbankan atau lembaga permodalan lainnya.

Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil diperlukan alat dan mesin pertanian yang mengikuti perkembangan teknologi tepat guna. Akan tetapi sampai saat ini baru sebagian petani yang memperoleh dan/atau menggunakan alat mesin pertanian yang ada.

Masalah ikutan lain yang timbul menyangkut keterbatasan penyuluh sebagai akibat dilikuidasinya lembaga penyuluhan nasional dan diserahkan ke daerah penanganan para penyuluh yang ada, dan oleh daerah mereka ditempatkan pada dinas atau kantor yang tidak relevan dengan bidang keahlian mereka. Hal tersebut berakibat menurunnya pelayanan penyuluhan dan petani mengalami disorientasi dalam mengadopsi ilmu dan teknologi pertanian yang baru. Masalah lain adalah sering tidak sinkronnya antar pelaku agribisnis pada tingkat subsistem.

Ada juga persoalan yang terkait dengan panen padi (pangan pokok) di Sumatera Selatan yang masih terjadi panen raya pada bulan Februari sampai Mei (lebih kurang 70 persen), sehingga pada bulan ini ketersediaan padi surplus. Sebaliknya diluar bulan-bulan tersebut panen padi relatif sedikit/defisit (lebak dan gadu). Panen raya padi di Sumatera Selatan hanya terjadi pada kabupaten sentra terutama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Musi Rawas, sementara kabupaten lain panen hanya dalam jumlah relatif terbatas.

Persaingan harga produk pangan dari daerah lain/impur menyebabkan harga produk pangan sering tidak layak, sehingga monitoring dan penyebaran informasi harga pangan sangat diperlukan. Juga masih banyak produsen, penjual/pedagang dan konsumen yang belum memperdulikan masalah keamanan pangan. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

Faktor intern yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat adalah daya beli yang rendah dan gaya hidup dengan pola pangan ingin cepat saji dan siap santap sehingga menyebabkan rawan pangan.

Perkembangan usaha pengolahan makanan pada tingkat agroindustri kecil, perkembangannya tidak secepat pada agroindustri besar dikarenakan antara lain terbatasnya kemampuan dalam memenuhi tuntutan konsumen dalam jumlah produksi dan mutu.

Masih sangat dirasakan kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang ketahanan pangan oleh aparat dan non aparat baik ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Hal ini disebabkan masih kurangnya pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan tentang ketahanan pangan.

Data aspek-aspek ketahanan pangan masih sulit didapat, belum akurat, tidak tepat waktu, serta sarana prasarana pendukung belum memadai. Sehingga sering bias menggambarkan situasi pangan Provinsi Sumatera Selatan, masih kesulitan dalam penanggulangan secara dini apabila ada daerah yang berisiko terjadi rawan pangan serta masih kurangnya data sebagai acuan perencanaan ke depan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan.

Mutu dan keamanan pangan masih belum terjamin, di mana masih banyak dijumpai pangan di tingkat pedagang/pasar yang mengandung cemaran yang berbahaya atau penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang seperti Borak, Formalin, Rhodamin B dan lain-lain. Dirasakan pula masih kurang dilaksanakannya

sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan di semua lapisan masyarakat baik produsen, penjual/pedagang dan konsumen tentang pangan yang mengandung bahan tambahan yang berbahaya.

Meskipun secara insitusi kedinasan fokus pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah pada peningkatan produktivitas dan produksi, namun dalam konteks pembangunan yang lebih komprehensif fokusnya adalah pada pemantapan sistem dan usaha agribisnis. Untuk itu jelas peran institusi kedinasan dan lintas pelaku lain sangat penting untuk ditingkatkan pula pada masa mendatang.

Pemasaran komoditi dan produk pertanian di Sumatera Selatan saat ini masih kurang lancar, lebih menguntungkan pedagang dan cenderung merugikan petani produsen, dan terhambat oleh kondisi infrastruktur transportasi yang rusak. Belum terdapat sistem distribusi komoditi antar kabupaten/kota yang baik dalam menunjang ketersediaan dan ketahanan pangan wilayah.

Kelembagaan lumbung pangan, tunda jual dan pangan lokal dalam pengembangan usahanya ternyata masih mengalami permasalahan kekurangan modal, kapasitas lumbung yang belum memadai, masih kurangnya kemampuan dalam mengelola usaha dan masih banyak yang belum mempunyai mitra usaha.

Kelembagaan pertanian tidak hanya masalah penyuluhan, melainkan pula meliputi masalah kelembagaan di tingkat petani yang masih harus diperkuat, sistem kemitraan yang kurang berjalan, dan aturan/ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, termasuk sistem pembinaan SDM yang kurang berjalan. Aspek kelembagaan tersebut agak luput dari masalah yang harus dipecahkan, muncul dalam strategi, namun luput lagi dalam upaya pencapaian sasaran/program secara kongkrit.

Meskipun sudah tersedia teknologi siap pakai yang dapat diadopsi dalam pelaksanaan program lumbung pangan, tetap saja diperlukan program penelitian dan pengembangan yang relevan. Justru ketiadaan atau ketidakseriusan pelaksanaannya saat ini masih menjadi kendala bagi upaya percepatan pembangunan pertanian. Terobosan teknologi dan metode kerja di semua subsistem agribisnis harus tetap dikembangkan demi mencapai sukses Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan.

10. Peternakan

Dengan mendasari pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat dan perkuatan perekonomian rakyat, maka pembangunan peternakan ke depan perlu berorientasi kepada penerapan konsep agribisnis baik sub sistem hulu, usaha tani (*on farm*), sub sistem hilir (*off farm*), maupun sistem penunjang.

Penerapan konsepsi agribisnis dimaksud harus berbasis pada iptek yang berwawasan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan berkesinambungan (*sustainable*). Oleh karena itu untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan dalam sub sektor peternakan perlu menerapkan pola usahatani terpadu atau terintegrasi (*integrated farming system*) dengan sub sektor lainnya seperti tanaman pangan dan perkebunan. Hal ini diperlukan sebagai upaya pemenuhan penyediaan pakan ternak secara murah dan berkesinambungan yang berasal dari limbah tanaman pangan dan perkebunan (jerami padi, jerami jagung, limbah sawit, dan lain lain.)

Hasil produksi ternak seperti daging, susu, dan telur di Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, peningkatan hasil produksi peternakan disebabkan oleh keberhasilan usaha intensifikasi dan peningkatan populasi ternak.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa populasi ternak ruminansia pada tahun 2004 adalah sapi (432.666 ekor), sapi perah (250 ekor), kerbau (86.528 ekor), kambing (432.504 ekor), domba (58.273 ekor), babi (33.253 ekor), dan kuda (1.430 ekor). Sedangkan populasi ternak unggas yaitu ayam buras (13.231.000 ekor), ayam petelur (5.863.000 ekor), ayam pedaging (11.705,99 ekor) dan itik (2.101.000 ekor).

Pada tahun 2004 produksi daging adalah sapi (8.704 ton), kerbau (2.024 ton), kambing (1.059 ton), domba (88 ton), babi (1.248 ton), ayam pedaging (11.709 ton), ayam petelur (481.01 ton), ayam buras (18.590), dan itik (763.01 ton). Total produksi daging di Sumatera Selatan pada tahun 2004 adalah 44.663 ton dengan tingkat konsumsi daging mencapai 45.632 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kekurangan sebesar 963 ton (2,12 persen) masih didatangkan dari luar.

Produksi telur di Sumatera Selatan pada tahun 2004 adalah 46.103 ton yang berasal dari perusahaan ayam ras petelur 31.985 ton, peternakan rakyat sebesar 14.118 ton (ayam buras 5.042 ton dan itik

9.076 ton). Sementara total konsumsi telur 28.942 ton, sehingga terjadi surplus produksi telur sebesar 17.161 ton (59.3 persen).

Produksi susu di Sumatera Selatan pada tahun 2004, berasal dari usaha rakyat (sapi dan kerbau perah) sebesar 275 ton yang berasal dari Banyuasin (117 ton), OKI (95 ton), dan Muara Enim (63 ton). Sementara konsumsi susu mencapai 24.625 ton, berarti pemasukan/kekurangan yang harus didatangkan dari luar sebesar 24.350 ton (99 persen).

Beberapa permasalahan di bidang peternakan terkait erat dengan masih rendahnya penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan oleh para peternak, relatif mahalnya harga pakan buatan pabrik, dan belum begitu dikembangkannya atau belum optimalnya produksi pakan ternak alternatif berbasis sumberdaya lokal. Selain itu, faktor penyediaan dan kepastian lahan serta keamanan merupakan kendala yang perlu diatasi untuk menarik investor dalam mengembangkan usaha budidaya dan industri peternakan berskala besar.

Masalah lain menyangkut manajemen budidaya ternak yang masih menggunakan cara tradisional atau konvensional dengan kurang memperhatikan kondisi lingkungan merupakan penyebab tingginya angka kematian ternak, kondisi prasarana dan sarana budidaya, pemotongan dan pengolahan hasil ternak yang ada masih belum sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan, baik untuk kepentingan ternak itu sendiri maupun untuk konsumen, dan tenaga ahli dan tenaga lapang yang terampil pada bidang inseminasi buatan masih sangat terbatas.

Demikian pula ada permasalahan dengan kondisi dimana belum berkembangnya sentra pembibitan ternak atau *breeding farm* (ternak ayam, sapi, kambing) pada setiap kawasan, sehingga belum dikenal istilah kawasan penghasil bibit ayam, sapi dan lain-lain.

11. Perkebunan

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang wilayah dan sesuai Peraturan Daerah tahun 2004 Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan budidaya yang diarahkan untuk budidaya perkebunan sekitar 3,2 juta ha. Areal yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan seluas 1,8 juta ha. Potensi lahan yang masih tersedia untuk pengembangan perkebunan seluas 1,4 juta ha. Dari potensi lahan tersedia tersebut, sudah dialokasikan untuk pengembangan kelapa sawit 1,1 juta ha, karet 250 ribu ha, tebu 21

C.10.1. *Permasalahan Peternakan*

ribu ha dan sisanya untuk pengembangan komoditi perkebunan rakyat lainnya.

Tiga komoditas perkebunan besar di Sumatera Selatan yang menghasilkan produksi perkebunan tertinggi adalah komoditas karet, kopi, dan kelapa sawit. Secara ekonomi, tanamantanaman tersebut mampu memberikan andil cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, dengan kontribusi cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2004, luas areal perkebunan adalah 1.778.647 Ha, sebagian besar (83 persen) diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat, dan sisanya merupakan perkebunan milik negara dan swasta. Komoditi utama perkebunan adalah karet 928.182 ha (52,19 persen), kelapa sawit 488.691 ha (27,48 persen), kopi 272.542 ha (15,32 persen) dan kelapa 50.941 ha (2,86 persen), serta aneka komoditi perkebunan lainnya seperti tebu, lada, teh, kayu manis, nilam, gambir, pinang dan lain-lain seluas 38.291 ha (2,15 persen). Produksi perkebunan tahun 2004 sebesar 2.378.995 ton terdiri dari karet 641.232 ton (karet kering 100 %), kelapa sawit 1.459.722 ton (CPO 1.183.143 ton dan inti sawit/kernel 276.629 ton), kopi 144.163 ton (biji kering), kelapa 67.220 ton (setara kopra), serta aneka komoditi perkebunan lainnya seperti gula, teh, kayu manis, kemiri, nilam, gambir, pinang dan lain-lain 66.658 ton.

Untuk mengolah produksi perkebunan, di Sumatera Selatan terdapat 19 unit pabrik pengolahan karet remah (*crumb rubber*) dengan total kapasitas sebesar 662.400 ton *crumb rubber* per tahun, pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) 38 unit dengan kapasitas 1.890 ton TBS per jam, dan pabrik gula dengan kapasitas 6.000 ton tebu per hari (TCD) serta 1 unit industri hilir pengolahan minyak goreng dengan kebutuhan bahan baku 600 ribu ton CPO per tahun. Sementara itu untuk pengolahan kopi dan produk kopi belum terdapat pabrik besar pengolahan kopi, yang ada hanya sekitar 404 pabrik pengolahan kecil penghasil kopi bubuk yang tersebar di beberapa kabupaten namun terkonsentrasi di daerah penghasil utama kopi.

Perkebunan merupakan sumber lapangan kerja atau mata pencaharian sebagian besar penduduk Sumatera Selatan. Dari areal perkebunan seluas 1.778.647 ha telah memberikan lapangan kerja langsung kepada sekitar 700.000 KK petani pekebun dan sekitar 100.000 KK lagi yang bekerja pada sektor upah dan jasa sebagai karyawan pada perusahaan perkebunan, industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Jika diasumsikan 1 KK menghidupi 4 jiwa, maka sub sektor perkebunan merupakan sumber pendapatan dan penghidupan sekitar 3,2 juta

C.11.1. Produksi Perkebunan

C.11.2. Kapasitas Pengolahan Hasil Kebun

C.11.3. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perkebunan

jiwa atau sekitar 47,8 persen dari total penduduk Sumatera Selatan 5,7 juta jiwa.

Devisa atau nilai eksport komoditi perkebunan tahun 2004 sebesar US \$ 833,242 juta atau 68,89 persen dari total eksport non migas Sumatera Selatan sebesar US \$ 984.6 juta. Devisa tersebut bersumber dari komoditas karet (74,19 persen), kelapa sawit dengan seluruh derivatnya (25,35 persen), kopi serta komoditas lainnya seperti teh, pinang, kayu manis dan lain-lain (0,46 persen). Kontribusi perkebunan terhadap PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2004 (tanpa migas) sebesar 10,61 persen. Terhadap total PDRB sektor Pertanian dan Kehutanan peranannya mencapai 42,97 persen.

*C.11.4.
Devisa Sektor
Perkebunan*

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman, maka yang perlu lebih diperhatikan adalah upaya perbaikan keterkaitan antar subsistem usaha perkebunan, karena saat ini sebenarnya nilai riil komoditi perkebunan telah menurun dan diperkirakan dalam beberapa puluh tahun yang akan datang nilainya akan mendekati nol atau hilang sama sekali. Dengan demikian diperlukan program untuk menaikkan nilai produk primer agar diperoleh nilai tambah yang dapat dinikmati tidak hanya oleh pedagang maupun pengolah, melainkan juga oleh petani kebun.

*C.11.5.
Permasalahan
Perkebunan*

Selain itu diperlukan pula upaya untuk lebih menghidupkan lembaga koperasi petani seperti koperasi petani karet, koperasi kelapa sawit, koperasi kopi, dan koperasi kelapa agar para petani memiliki saham di subsistem bisnis hilir seperti pabrik pengolahan dan pemasaran sekaligus memperoleh nilai tambah produk, dan memperkuat kelembagaan petani yang akan menaikkan kekuatan rebut tawar mereka, sehingga pada akhirnya akan pula meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga para petani tersebut.

Peran investor bertujuan untuk mempercepat investasi bagi pembangunan industri hulu dan industri hilir dengan memberikan kepercayaan kepada investor tentang pembebasan lahan pembangunan (khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet). Selama ini masih menjadi salah satu kendala dalam upaya percepatan dan peningkatan investasi perkebunan. Pembebasan lahan untuk pembangunan perkebunan harus dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, dan sekaligus menjadi alternatif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, karena masyarakat masih merasakan adanya ketidakadilan dalam sistem dan prosedur penyerahan dan pembebasan lahan yang dilakukan oleh investor untuk pembangunan perkebunan. Penyerahan dan pembebasan lahan harus dapat menjamin adanya keamanan investasi dalam jangka panjang bagi investor, dan dapat mendorong terciptanya

situasi yang kondusif bagi kepentingan penanaman modal pada sektor perkebunan di Sumatera Selatan. Dalam rangka otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah Otonom sangat penting untuk memberikan panduan dan arahan yang dapat mempercepat pembangunan daerah untuk mewujudkan kemandirian yang stabil bagi daerah otonom, sehingga dipandang perlu adanya aturan formal dalam sistem dan prosedur pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan perkebunan.

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat pekebun sebagai salah satu tujuan utama revitalisasi perkebunan dapat dilakukan melalui perluasan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan Sumatera Selatan seperti karet dan kelapa sawit yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif baik nasional, regional, maupun global dan dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan serta diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan penerimaan dan devisa negara serta pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Namun bukan berarti komoditi lain diabaikan, melainkan juga dikembangkan sesuai dengan kesesuaian dan kepentingan lokal serta prospek ekonominya.

Produktivitas komoditi utama perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa umumnya masih lebih rendah dari potensinya. Hal ini nampaknya lebih banyak ditentukan oleh teknik budidaya yang belum optimal baik dalam penguasaan maupun penerapannya.

Para petani pekebun umumnya mengalami kesulitan besar dalam menyiapkan atau memperoleh dana untuk investasi awal, peremajaan dan pemeliharaan kebun mereka. Kesulitan ini terkait erat dengan tidak banyaknya kelebihan pendapatan usaha dari pengeluaran rutin rumah tangga mereka selama ini.

Ketersediaan sumber benih unggul komoditi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan masih dirasakan sangat kurang tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan, disebabkan masih sedikitnya usaha penanganan di bidang ini. Kondisi di atas jelas akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas hasil tanam di masa akan datang.

Tingkat kerugian serta kerusakan tanaman perkebunan akibat tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) cukup besar, baik yang terjadi karena serangan eksplosif di areal yang ada atau kegagalan pertumbuhan tanaman di areal pengembangan. Selain itu, kerugian yang cukup besar juga terjadi di tingkat pasca panen yang mengakibatkan turunnya mutu produk hasil sehingga nilai jual produk juga rendah.

Pabrik pengolahan komoditi perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan juga masih kurang, tidak hanya dari sisi jumlahnya tetapi juga dari sebarannya, terutama untuk pabrik pengolahan karet dan kelapa sawit yang sering disebut industri primer. Akibatnya terjadi arus lalu lintas transportasi bahan baku antar kabupaten yang tidak hanya tidak hanya menimbulkan biaya yang tinggi atau inefisien, melainkan juga kerusakan jalan.

12. Kehutanan

Selama hampir empat dasawarsa, sektor kehutanan tumbuh dan berkembang dengan memberikan kontribusi penting bagi proses pembangunan yang tercermin dari kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peran dan kontribusi kehutanan Indonesia dalam berbagai bentuk. Selain dalam bentuk devisa dan pendapatan, sektor kehutanan juga berperan dalam penyediaan dan penyerapan tenaga kerja. Tak hanya itu, sektor kehutanan juga berhasil menjadi pendorong perkembangan sektor-sektor lain, seperti industri pendukung mesin dan peralatan, industri kimia, industri perbankan, asuransi, transportasi, pengemasan, dan industri jasa berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, jasa-jasa pengujian. Terakhir, sektor kehutanan berperan dalam upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman. Ini mendorong sektor kehutanan menjelma menjadi tulang punggung ekonomi regional.

Sumbangan lainnya yang diberikan antara lain dalam bentuk sumbangan infrastruktur di daerah, tersedianya sarana pendidikan di daerah pedalaman, rumah ibadah dan balai desa. Dengan demikian, secara tidak langsung sektor kehutanan telah membantu proses integrasi sosial kultural berbagai komunitas.

Namun demikian dinamika pembangunan masa lalu telah menyebabkan pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan yang ditunjukkan dengan kapasitas industri yang melebihi kemampuan pasok kayu lestari sesuai sistem pengelolaan hutan saat

C.12.1. Peran Sektor Kehutanan

ini. Kerusakan hutan bahkan diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Kondisi tersebut telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari.

Luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan progres pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan adalah 3.784.078 ha, dimana seluas 1.234.480 (33 persen) masih berpenutupan vegetasi berupa hutan produktif dan seluas 2.549.598 (67 persen) berpenutupan vegetasi tidak berhutan. Dari kawasan hutan yang berpenutup vegetasi berupa tidak hutan, seluas 1.277.174 ha berada di dalam kawasan hutan produksi dan telah diberikan ijin untuk melakukan pembangunan hutan tanaman berbasis industri perkayuan seluas 1,2 juta ha. Diperkirakan dalam 20 tahun mendatang, produksi kayu lestari dari hutan tanaman dapat mencapai lebih dari 10 juta m³ per tahun.

Adapun kawasan hutan yang berpenutupan vegetasi tidak berhutan di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi seluas 557.000 ha, yang ada umumnya merupakan daerah tangkapan air pada Daerah Aliran Sungai bagian hulu dari Sungai Musi. Wilayah ini mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pengaturan dan pengendalian terhadap timbulnya proses erosi, sedimentasi, banjir, dan tanah longsor.

Permasalahan yang perlu dicermati dan ditemukan solusinya dalam rangka revitalisasi kehutanan di Sumatera Selatan dapat dikemukakan bahwa sebagian sumberdaya hutan tidak lagi berhutan, masih terbatasnya kemampuan rehabilitasi, masih belum tuntasnya pemantapan kawasan hutan, dan belum terselesaikannya penunjukkan kawasan hutan dan perairan.

Pada sisi lain masalah yang dijumpai mencakup pengelolaan hutan juga masih cenderung berorientasi ekonomi, kualitas SDM aparat dan masyarakat yang belum memadai, aksesibilitas ke wilayah hutan yang relatif masih sulit. Konflik sosial di dalam dan di sekitar hutan, juga masih ada dan terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan dimana masyarakat yang tinggal di dan sekitar hutan masih banyak.

Masalah lain yang masih dihadapi hutan di Sumatera Selatan adalah makin meningkatnya gangguan alam seperti kekeringan dan perubahan iklim, masih berlangsungnya perambahan dan penebangan liar, masih sering terjadinya kebakaran hutan setiap tahun, yang ditambah lagi dengan situasi masih lemahnya penegakan hukum.

C.12.2. Kondisi Hutan

C.12.2. Permasalahan Kebutanan

Selain dihadapkan pada persoalan belum memadai dan belum meratanya penguasaan IPTEK di bidang kehutanan, juga masih dihadapkan pada terbatasnya dana dan belum mendukungnya sistem dan aturan pendanaan untuk investasi sektor kehutanan.

13. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Sumatera Selatan tahun 2003 mencapai 186.904,2 ton. Pada tahun 2004 produksi perikanan turun sekitar 22,43 persen, hingga menjadi 144.983,7 ton. Dari total produksi tahun 2004 tersebut, sekitar 37,27 persen berasal dari produksi perikanan laut, 49,48 persen berasal dari produksi perikanan darat, dan 13,24 % berasal dari produksi tambak. Produksi perikanan laut sebesar 54.041,7 ton tahun 2004 tersebut, meningkat sebesar 1,38 persen jika dibandingkan dengan produksi tahun 2003.

Pembangunan perikanan didasari atas visi terbentuknya sistem agribisnis perikanan yang berdaya saing, oleh karena itu perlu dikembangkan kawasan sentra agribisnis perikanan yang lengkap dari hulu ke hilir termasuk sektor penunjangnya seperti jasa pemasaran, permodalan, penyuluhan, riset dan pengembangan. Dalam hal ini peran perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting. Sektor perikanan dan kelautan terkait erat dengan upaya peningkatan produksi perikanan dan peningkatan keuntungan petani ikan/nelayan serta peningkatan daya saing agribisnis perikanan Sumatera Selatan di tingkat nasional maupun internasional dengan tetap melestarikan lingkungan.

Peningkatan produksi diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan petani/nelayan. Peningkatan keuntungan usaha perikanan akan menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun internasional menjadi faktor penentu keberlangsungan usaha di semua sektor usaha, termasuk usaha perikanan. Bila produk perikanan Sumatera Selatan tidak mampu bersaing di pasar nasional maupun global, maka produk luar akan masuk ke Sumatera Selatan sehingga mematikan usaha perikanan di Sumatera Selatan. Karena itu, efisiensi usaha dan sinergi antar pelaku usaha perlu dilakukan.

Secara umum saat ini posisi petani ikan/nelayan adalah *price taker*. Porsi keuntungan yang lebih besar dalam agribisnis perikanan direbut oleh pedagang. Posisi tawar petani ikan/nelayan yang lemah disebabkan lemahnya persatuan petani yang hanya memiliki skala usaha yang kecil dan jangkauan pemasaran yang sempit.

C.13.1. Kondisi Kelautan dan Perikanan

C.13.1. Permasalahan Kelautan dan Perikanan

Keuntungan petani ikan/nelayan dapat ditingkatkan dengan memangkas rantai pemasaran (menjangkau konsumen secara langsung) dan mencari pasar baru (termasuk ekspor). Diversifikasi produk melalui pengolahan juga akan memperluas pasar. Jalan dan transportasi dibutuhkan untuk dapat membawa produk langsung ke pasar/konsumen.

Pendirian pabrik pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, tepung ikan, ikan beku, bakso ikan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan menimbulkan *multiplier effect*. Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk. Namun, pendirian pabrik pengolahan memerlukan pasokan bahan baku ikan yang kontinyu dan cukup (kuantitas dan kualitas).

Kelompok petani/nelayan bukan saja kumpulan petani/nelayan, tetapi juga merupakan kelompok usaha. Kelompok ini dapat dikembangkan menjadi koperasi atau koperasi syariah. Antar kelompok dapat dibentuk asosiasi. Antar koperasi dapat dibentuk induk koperasi. Pembinaan organisasi petani/nelayan ini memerlukan penyuluhan dan pendampingan. Petani/nelayan umumnya lemah permodalan. Bantuan permodalan dapat merangsang petani untuk berorganisasi. Sumber permodalan yang tersedia adalah kredit mikro dari bank, Baitul Mal wa Tamwil, dana *community development*, APBN/APBD, dana hibah luar negeri, kemitraan dengan swasta. Sumber dana ini perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih.

Pembenahan dan pemantapan struktur organisasi penyuluhan diperlukan. Peningkatan kemampuan para penyuluh juga diperlukan menghadapi semakin kompleksnya dan semakin mengglobalnya usaha agribisnis. Kelemahan penguasaan ilmu manajemen oleh petani/nelayan menyebabkan pendampingan dibutuhkan untuk menjalankan/mengelola koperasi atau organisasi usaha petani/nelayan.

Dukungan data dan teknologi diperlukan untuk peningkatan efisiensi, peningkatan daya hasil, dan *business forecasting*. Sebuah stasiun penelitian yang bertugas memberi suplai teknologi spesifik lokasi, sebagai konsultan bagi petani, mengumpulkan data produksi petani/nelayan dan data pasar sehingga dapat melakukan prediksi pasar. Tenaga ahli dapat dipinjam dari universitas atau lembaga penelitian di Sumatera Selatan.

Jalan/transportasi, listrik, air bersih, komunikasi diperlukan untuk keberhasilan program ini. Efisiensi usaha tani memerlukan konsentrasi tempat produksi. Tahap awal dari pembangunan perikanan ini adalah menentukan kawasan yang terbaik

(keunggulan komparatif) untuk dijadikan prioritas daerah pengembangan. Kawasan pantai Ogan Komering Ilir dan Banyuasin dapat menjadi sentra produksi ikan laut dan tambak. Kawasan Tugumulyo, Belitang, Semendo, Pagaralam, Ranau dapat dijadikan sentra produksi ikan mas dan gurame, yang memerlukan kualitas air tinggi. Kawasan Palembang, Air Batu, Sungai Lilin, Sirah Pulau Padang, dapat dijadikan sentra produksi ikan patin, lele, nila, bawal. Di sentra produksi inilah hulu - on farm - hilir serta jasa penunjang agribisnis tersedia dan bersinergi sehingga menciptakan satu sistem agribisnis perikanan yang efisien, karena itu dapat bersaing di nasional maupun global.

Persoalan yang ada pada bidang kelautan dan perikanan diantaranya pada masalah belum memasyarakatnya usaha perikanan melalui kegiatan budidaya, kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan perikanan, dan belum adanya rencana induk yang terpadu dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta masih terbatasnya SDM bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, juga ada masalah terkait dengan masih terbatasnya benih/benur dan pakan dalam usaha budidaya dan masih rendahnya mutu ikan dan produk olahan hasil perikanan.

Permasalahan lainnya dalam bidang kelautan dan perikanan mencakup kurang optimalnya pengelolaan Suaka Perikanan dan Perairan Umum. Kurang optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menurunnya kualitas wilayah pesisir, dan masih ditemukannya kegiatan penangkapan ikan dengan cara terlarang,

14. Pertambangan

Kegiatan pada sektor pertambangan ini lebih dititikberatkan pada kegiatan penelitian dan inventarisasi bahan-bahan galian / pertambangan. Disamping itu, dalam mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi akan terus dilakukan melalui kontrak karya maupun kontrak bagi hasil dengan para investor asing.

Upaya-upaya untuk memperluas jangkauan cekungan hidrokarbon terhadap sumber minyak bumi terus dilakukan. Barang tambang yang strategis dan vital di daerah Sumatera Selatan meliputi minyak dan gas bumi, timah, dan batubara, sedangkan barang tambang lainnya (bahan tambang golongan C) adalah kaolin, pasir kwarsa, marmer, batu kapur, granit, dan lain sebagainya.

Sektor pertambangan/galian menghasilkan produk yang dipakai oleh sektor industri seperti gas alam untuk bahan baku industri pupuk, bijih timah padat, batubara yang dipakai sebagai bahan baku dalam menghasilkan tenaga listrik seperti di Suaralaya Jawa Barat, dan minyak mentah sebagai bahan baku industri kilang minyak dan sebagainya.

Produksi hasil tambang yang vital dan strategis di Sumatera Selatan tahun 2004 adalah minyak bumi sebesar 17.432.974 BBLS, gas bumi sebesar 9.566 MMSCF, dan batubara sebesar 9.514.443 ton. Berdasarkan potensi cadangan yang dimiliki Sumatera Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu 10 persen dari cadangan nasional. Sedangkan gas bumi telah memproduksi 9 persen cadangan nasional dan diperkirakan diproduksi dengan pertumbuhan 10 persen pertahun dapat bertahan selama 60 tahun. Hal ini juga memberikan kontribusi dalam skala nasional.

C.14.1.
*Produksi
Tambang yang
Strategis*

Sumatera Selatan mempunyai total cadangan minyak bumi sebesar 757,6 MMSTB, yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 448,2 MMSTB, cadangan mungkin sebesar 122,5 MMSTB dan cadangan harapan sebesar 186,9 MMSTB. Rasio total potensi minyak bumi terhadap potensi minyak bumi nasional sebesar 8,78 persen. Namun, bila melihat besar cadangan terbukti, maka rasio cadangan terbukti Sumatera Selatan adalah sebesar 10,7 persen terhadap cadangan terbukti nasional. Sedangkan terhadap cadangan potensialnya, maka cadangan potensial Sumatera Selatan (jumlah cadangan mungkin dan cadangan harapan) adalah sebesar 6,97% terhadap cadangan potensial nasional.

C.14.2.
*Potensi
Minyak
Bumi*

Sumatera Selatan mempunyai potensi gas bumi sebesar 24.179,5 BSCF. Adapun rincian cadangan gas tersebut terdiri dari cadangan terbukti sebesar 10.240,1 BSCF (*associated gas* sebesar 1.439,8 BSCF dan *nonassociated gas* sebesar 8.800,3 BSCF), cadangan mungkin sebesar 4.822 BSCF (*associated gas* sebesar 290,5 BSCF dan *nonassociated gas* sebesar 4.531,5 BSCF), dan cadangan harapan sebesar 9.117,4 BSCF (*associated gas* sebesar 545,1 BSCF dan *nonassociated gas* sebesar 8.572,3 BSCF).

C.14.3.
*Potensi
Gas Bumi*

Rasio total cadangan gas bumi Sumatera Selatan terhadap cadangan gas bumi nasional adalah 13,01 persen. Namun, bila melihat besar cadangan terbukti, maka rasio cadangan terbukti Sumatera Selatan adalah 10,53 persen terhadap cadangan terbukti nasional. Sedangkan terhadap cadangan potensialnya, maka cadangan potensial Sumatera Selatan (jumlah cadangan mungkin dan cadangan harapan) adalah 15,74 persen terhadap cadangan potensial nasional.

Produksi gas bumi Sumatera Selatan sejak tahun 2001 hingga tahun 2003 menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2001, produksi gas alam Sumatera Selatan sebesar 270,75 BSCF dan menurun hingga 125,71 BSCF pada tahun 2003. Walaupun Produksi tahun 2004 meningkat hingga menjadi 294,10 BSCF yang sekaligus merupakan produksi tertinggi sejak 8 tahun terakhir, penurunan produksi perlu diantisipasi agar tidak terjadi kekurangan pasokan gas alam.

Pemakaian gas bumi Sumatera Selatan sebesar 880 MMSCFD, dengan rincian yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi di Sumatera Selatan sebesar 334,3 MMSCFD (37,99 persen) dan sisanya dikirim/suplai ke luar Sumatera Selatan. Pemanfaatan gas bumi di Sumatera Selatan umumnya masih didominasi oleh pemain lama seperti industri pupuk, kilang minyak dan LPG serta pembangkit listrik.

Perkembangan industri tersebut relatif konstan karena berbagai keterbatasan. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan gas alam di Sumatera Selatan juga cenderung konstan. Baru akhir-akhir ini banyak dibangun PLTG yang cukup besar mengkonsumsi gas bumi. Namun demikian secara umum pemanfaatan gas bumi Sumatera Selatan masih kurang dari setengah dari gas alam yang diproduksi. Selain itu infrastruktur gas alam yang ada terbatas dan sebagian besar sudah tua, sehingga peningkatan produksi gas alam terkendala sistem transmisi gas. Penyediaan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang peningkatan produksi dan sekaligus pemanfaatan gas alam.

Gas bumi merupakan energi yang lebih murah dan ekonomis serta ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi. Animo masyarakat untuk menggunakan gas alam di sektor rumah tangga cukup besar, namun hingga saat ini baru sebagian kecil daerah yang sudah memiliki jaringan pipanisasi gas alam untuk sektor rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan konsumsi gas alam untuk sektor rumah tangga sangat kecil.

Untuk dapat memanfaatkan gas bumi pada sektor transportasi diperlukan *converter kit* yang mana harganya cukup mahal. Selama ini masyarakat telah terbiasa menggunakan bahan bakar minyak (BBM) sehingga timbul keengganan untuk beralih ke penggunaan gas alam karena harus membeli *converter kit* tersebut. Kendala tersebut mengakibatkan penggunaan gas alam di sektor transportasi hampir belum ada.

Untuk menunjang pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi tentunya diperlukan stasiun pengisian bahan bakar gas. Hingga saat ini hampir belum ada SPBG yang beroperasi di Sumatera Selatan.

Pengadaan SPBG ini juga erat kaitannya dengan jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas alam.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan seringkali terdapat kesan yang salah di masyarakat, seperti ketakutan akan terjadi ledakan gas dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menggunakan gas alam relatif kecil.

Potensi batubara yang memiliki nilai ekonomis dijumpai di beberapa lokasi, antara lain di daerah Air Laya, Muara Tiga Besar, Bangko (barat, tengah, dan selatan), Bukit Kendi, Kungkulan, Air Serelo, Bukit Bunian, Banjarsari, dan Suban Jeriji (Tanjung Enim–Muara Enim), Pendopo, Lahat, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin (daerah Bayung Lencir dan Sungai Lilin). Endapan batubara yang terdapat pada Formasi Muara Enim telah diketahui secara regional berdasarkan kompilasi data yang diperoleh dari beberapa lapangan batubara di Sumatera Selatan berjumlah sekitar 21 lapisan batubara (*coal seams*).

C.14.4. Potensi Batubara

Berdasarkan potensi batubara Sumatera Selatan memiliki cadangan 22,24 milyar ton atau sebesar 48,45 persen dari cadangan nasional, sedangkan yang diproduksi memberikan kontribusi sebesar 9,3 persen dari produksi nasional (9,5 juta ton). Dari yang ada di Sumatera Selatan, hanya sebagian kecil atau sekitar 0,48 milyar ton yang memiliki nilai kalori > 6.100 kal/gr, sisanya 10,37 milyar ton memiliki nilai kalori 5.100 – 6.100 kal/gr dan sebanyak 11,38 milyar ton memiliki nilai kalori < 5.100 kal/gr. Kandungan abu batubara yang merupakan bahan pengotor dalam pemanfaatan batubara, pada umumnya cukup rendah (< 10,00 persen), demikian juga kandungannya sulfur, yaitu < 1,00 persen.

Kualitas batubara yang rendah mengakibatkan kesulitan dalam memasarkan batubara karena umumnya pengguna batubara menghendaki batubara berkualitas tinggi, sehingga pemanfaatan batubara menjadi terhambat. Selain itu kualitas batubara yang rendah mengakibatkan harga batubara menjadi rendah sedangkan biaya pengangkutan tetap (berdasarkan tonase yang diangkut) hal ini mengakibatkan kondisi keekonomian yang kurang menguntungkan.

Penambangan batubara di Sumatera Selatan saat ini hanya dilakukan oleh PTBA. Peningkatan produksi batubara PTBA terkendala oleh keterbatasan infrastruktur pengangkutan. Sementara perusahaan tambang batubara lainnya belum ada yang beroperasi karena keekonomian batubara belum menggembirakan (karena kualitas rendah).

Produksi batubara Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk men-supply kebutuhan batubara dalam negeri (\pm 75%) dan sisanya digunakan untuk ekspor. Supply batubara di Sumatera Selatan berkisar sekitar 2,7 juta ton per tahun yang digunakan untuk PLTU Batubara Bukit Asam, Pabrik Semen PT. Semen Baturaja, dan industri kecil. Kebutuhan batubara untuk Pembangkit Listrik di Suralaya, sangat tergantung kepada berapa besar jumlah batubara yang dapat diangkut kesana. Saat ini, dengan jalur kereta api yang terbatas kapasitas angkutnya, batubara yang dapat dipasarkan hanya \pm 10 juta ton/tahun.

Upaya diversifikasi batubara saat ini pada umumnya belum sampai pada tahap komersial. Misalnya *Upgrading Brown Coal* (UBC) baru pada tahap demonstration plant, gasifikasi dan likuifaksi masih dalam tahap penelitian. Derivatif batubara yang telah memasuki tahap komersial saat ini adalah briket batubara, itu pun belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Produksi dan sosialisasi briket batubara telah dimulai sejak tahun 1992, namun berbagai kendala masih menghadang sehingga pemanfaatan briket batubara hingga saat ini masih sangat terbatas dan produksinya pun relatif kecil. Pemanfaatan briket batubara juga sangat tergantung pada harga bahan bakar lain, kebijakan subsidi BBM yang begitu besar juga merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan pemanfaatan briket batubara.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan memiliki juga potensi gambut cukup besar, tetapi masih perlu dikembangkan pemanfaatannya. Sebaran gambut paling banyak terdapat di bagian utara dan timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Ketebalan gambut bervariasi. Luasan gambut diperkirakan sekitar 12.503,4 km².

Dalam bidang kelistrikan, gambut sampai saat ini dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik skala kecil (~25 KW). Proyek percontohan (*pilot project*) telah dilakukan di Rasau Jaya (Kalimantan Barat) dengan menggunakan gasifikasi serbuk gambut. Proyek ini telah berhasil memproduksi energi listrik yang dimanfaatkan untuk penerangan di perdesaan dan untuk penggerak sistem pompa pengairan. Sedangkan studi kelayakan untuk penggunaan energi gambut sebagai tenaga listrik skala besar direncanakan akan dilakukan di Pakanbaru (Riau) dan Pangkoh (Kalimantan Selatan).

C.14.5. *Potensi Gambut*

Keberadaan gas metan (CBM) di Sumatera Selatan terkait dengan formasi pembawa batubara. Potensi ini sangat mungkin ditemukan pada Formasi Muara Enim, Formasi Lahat, dan Formasi Talang Akar.

*C.14.6.
Potensi
Gas Metan*

Peningkatan harga gas metan telah mendorong usaha dari beberapa perusahaan gas alam untuk berusaha mengambil gas metan dari lapisan batubara. Selain kedalaman lapisan batubara, kandungan gas metan juga cenderung meningkat dengan bertambahnya *rank* batubara.

Potensi pasir kuarsa di Sumatera Selatan terdiri dari cadangan terukur sekitar 59.350.653 ton, cadangan terindikasi 11.575.000 ton, cadangan tereka 10.772.110 ton dan cadangan hipotetik sebesar 14.951.100 ton. Mutu cadangan pasir kuarsa di Sumatera Selatan adalah 87,54 – 99,68 persen dengan katagori cukup baik sampai baik.

*C.14.7.
Potensi
Pnsir Kuarsa*

Di Sumatera Selatan sebaran batu kapur terdapat di Muara Dua dan Pegagan Kabupaten Lahat dan Baturaja Komiring Ulu. Cadangan tereka untuk seluruh Sumatera Selatan adalah sebesar 48.631 ton.

*C.14.8.
Potensi
Batu Kapur*

Potensi bahan tambang lainnya yang cukup penting adalah bahan galian golongan C. Namun hingga kini masih sering timbul kesulitan yang dialami oleh para pengusaha bahan galian golongan C, khususnya bagi pengusaha kecil, lemah dan perorangan. Kesulitan tersebut meliputi data dan informasi yang tidak lengkap, biaya eksplorasi yang mahal, bantuan dan bimbingan belum merata, perijinan yang kadan-kadang masih melalui jaringan birokrasi yang panjang dan adanya biaya yang tak terduga sebelumnya (umumnya tidak resmi). Kendala lain yang dihadapi oleh para pengusaha, terutama yang tergolong lemah ialah memasarkan hasil produksi sering mengalami jalan buntu.

*C.14.9.
Permasalahan
Galian
golongan C*

Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat terbatas, bahkan umumnya belum dimanfaatkan. Energi terbarukan yang sudah cukup berkembang hanyalah energi air untuk PLTA, itu pun membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Selain itu PLTMH dan PLTS skala kecil (sel surya) juga telah diinstalasikan di Sumatera Selatan, namun jumlah dan kapasitasnya masih sangat kecil dibandingkan sumber energi lain.

Saat ini harga energi terbarukan masih belum dapat bersaing dengan sumber energi lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain teknologi energi terbarukan masih dalam tahap pengembangan dan penggunaan yang belum memasyarakat. Selain itu kebijakan subsidi bahan bakar minyak juga mengakibatkan animo masyarakat untuk menggunakan energi terbarukan masih sangat rendah.

Energi terbarukan sulit dikembangkan untuk skala besar sehingga tingkat keekonomiannya juga menjadi rendah. Pemanfaatan energi terbarukan biasanya bersifat lokal karena energi yang dapat dimanfaatkan juga relatif kecil (kecuali PLTA dan PLTP). Upaya mengirimkan energi tersebut ke lokasi lain akan terkendala biaya transportasi yang besar sehingga pengembangan untuk skala besar relatif sulit.

Pertumbuhan populasi dan industri telah mengakibatkan peningkatan pemakaian energi listrik, terutama di Asia Tenggara. Di banyak negara, sumber energi minyak bumi masih memegang peranan utama dalam pemenuhan energi. Namun demikian, penggunaan sumber energi fosil untuk pembangkit tenaga listrik telah diketahui banyak menimbulkan permasalahan lingkungan.

Panas bumi (*geothermal*) merupakan sumber energi alternatif yang dipercayai lebih ramah lingkungan (*friendly energy resources*) dibandingkan dengan sumber energi fosil minyak dan gas, serta batubara. Pemakaian sumber energi alternatif ini telah memperlihatkan pertumbuhan berkesinambungan (*continual growth*) sepanjang abad ini. Energi panas bumi sebagian besar dipergunakan untuk membangkitkan tenaga listrik.

Konsentrasi sumberdaya panas bumi di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh kombinasi sumber panas magmatis dangkal yang berasal dari aktivitas gunung api Kuartar, dan permeabilitas primer dan sekunder akibat rekahan dan/atau sesar yang terkait dengan sistem sesar Semangko. Berdasarkan pada kedua faktor tersebut, daerah-daerah yang telah diketahui sebagai wilayah prospek sumber energi panas bumi di antaranya Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil eksplorasi pada daerah prospek di Sumatera Selatan memperlihatkan karakteristik sistem panas bumi yang secara regional diperkirakan mencerminkan pula ciri-ciri sistem panas bumi di Pulau Sumatera. Panas bumi sebesar 545 Mwe dan memberikan kontribusi 2,5 persen cadangan nasional.

*C.14.10.
Potensi
Panas Bumi*

Indonesia yang secara geografis terletak di khatulistiwa memiliki penyebaran temperatur permukaan bumi rata-rata di semua daerah relatif sama, berkisar 4-6,5 kWh/m²/hari (Utami, 1999). Tingkat radiasi harian rata-rata ini apabila dimanfaatkan secara keseluruhan akan mencapai 1.203,75 x 10⁶ MW. Dengan demikian wilayah kepulauan ini mempunyai potensi energi surya yang sangat besar, tetapi sampai saat ini pemanfaatannya relatif sangat kecil.

*C.14.11.
Potensi
Energi Surya*

Di Sumatera Selatan, pemanfaatan energi surya untuk penerangan (ketenagalistrikan) telah dimulai sejak tahun 1995, dan sampai sekarang sudah terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebanyak 348 unit yang tersebar di enam Kabupaten yaitu Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan Musi Rawas.

Potensi mikrohidro di Indonesia diperkirakan sebesar 458,75 MW. Dari total potensi tersebut, baru sekitar 4,54 persen telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) untuk daerah perdesaan yang terpencil dengan kapasitas terpasang sampai saat ini sekitar 20,85 MW. Sistem PLTMH di Indonesia masih dalam tahap percontohan, karena masih terkendala oleh pengembangan teknologi PLTMH.

*C.14.12.
Potensi
Tenaga Air*

Kendala yang dihadapi Indonesia termasuk di antaranya peningkatan kemampuan manufaktur lokal untuk peralatan mekanik dan listrik seperti turbin, pengatur beban secara elektronik, sehingga bisa bersaing dengan produk impor dan biaya pembangkit per kWh masih tinggi dibanding PLTA dan PLTD. Di Sumatera Selatan, potensi mikrohidro mencapai 10.238 KW yang tersebar di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pemanfaatan energi biomasa yang dihasilkan cukup luas, antara lain sebagai penghasil arang, penggerak mesin penggilingan padi, pengering hasil-hasil pertanian dan perkebunan, pembangkit tenaga listrik perdesaan dan industri perkayuan serta perkebunan, dan untuk pompa irigasi. Sebagian di antaranya sudah sampai tahap semikomersial dan komersial.

Indonesia diperkirakan memiliki potensi energi biomasa hampir mencapai 50.000 MW. Dari total potensi ini, sekitar 1.800 MW, terutama yang berasal dari residu biomasa, bahan kayu bakar, sisa hasil perkebunan atau pertanian, dan sampah, dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Penggunaan energi biomasa untuk ketenagalistrikan yang tersebar di Sumatera

*C.14.13.
Potensi
Biomasa*

sekitar 500 MW. Namun demikian, jenis energi alternatif ini belum banyak dimanfaatkan di Sumatera Selatan, walaupun potensinya diduga cukup besar dan prospektif untuk dikembangkan pemanfaatannya.

15. Pariwisata

Sumatera Selatan memiliki potensi pariwisata, yang sebenarnya memiliki jual yang tinggi. Potensi tersebut antara lain objek wisata sejarah, objek wisata alam dan objek wisata agro. Sumatera Selatan mempunyai obyek wisata yang dapat diandalkan. Keindahan pesona Danau Ranau dengan Gunung Seminungnya telah banyak diketahui oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Obyek wisata agro di lokasi perkebunan teh Gunung Dempo telah menjadi lokasi favorit para pendaki gunung dari seluruh Indonesia. Belum lagi keindahan kawasan Benteng Kuto Besak di tepi Sungai Musi yang telah banyak dipergunakan untuk berbagai event skala nasional. Juga wisata petualangan dengan menelusuri gua bawah tanah atau arus liar sungai di kawasan pegunungan yang deras.

C.15.1. *Potensi Pariwisata*

Akan tetapi dengan potensi demikian ternyata aktifitas pariwisata dan industri pendukungnya dirasakan belum optimal memberikan manfaat bagi daerah. Padahal beberapa BUMN di Sumsel seperti Pusri telah menjadi *leading* untuk berperan serta dalam memajukan pariwisata daerah namun tetap saja intensitas kunjungan wisatawan mancanegara yang dapat berkontribusi pada devisa daerah relative rendah.

C.15.2. *Permasalahan Pariwisata*

Ketersediaan sarana dasar pada objek wisata di Sumatera Selatan masih sangat kurang sehingga belum dapat mendukung perkembangan industri pariwisata. Kurangnya sarana prasarana ini menyebabkan objek wisata yang ada di Sumatera Selatan belum memiliki daya tarik yang kuat untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara agar tinggal lebih lama.

Promosi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai tempat-tempat wisata. Padahal informasi dan promosi mengenai pariwisata cukup menentukan minat kunjungan.

Ketersediaan SDM pada industri pariwisata sangat penting mengingat SDM merupakan faktor penentu dalam mengembangkan pariwisata. Apabila SDM dibidang ini tidak mendukung maka sulit diharapkan sektor ini mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi yang besar tidak cukup tanpa didukung oleh SDM yang handal. Keterbatasan SDM

pariwisata yang handal di sebabkan karena minimnya lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga-tenaga pariwisata.

D. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan telekomunikasi dan sistem informatika yang mudah didapat dan diakses oleh masyarakat berbagai lapisan. Meski demikian, masih ada keterbatasan dari sisi sumberdaya manusia bidang teknologi informasi di jajaran Pemerintah Daerah baik di kabupaten/kota maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga fasilitas seperti website/SIMDA yang sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi.

Bidang penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan salah satu pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun institusi lainnya. Beberapa kelemahan yang masih dijumpai terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat adalah belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian yang sama / serupa. Situasi ini tentu mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya dan sumber dana serta waktu.

Hasil temuan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat akan sangat bermanfaat sekali dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan apabila terkait dengan teknologi pengolahan pangan dan energi yang bahan bakunya banyak dan mudah didapat di daerah tempat masyarakat tinggal. Untuk itu penting mengupayakan peningkatan teknologi yang berguna dan mengenai sasaran baik secara kuantitas maupun kualitas.

E. Sarana dan Prasarana

Pembangunan infrastruktur daerah adalah bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan

penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan perumahan dan permukiman, beserta prasarana pendukungnya seperti air minum dan sanitasi, dan pengelolaan sampah secara luas dan merata, menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya. Dalam konteks ini, maka dimasa depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk di perhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) outlet/pintu gerbang yang dapat meningkatkan peran Sumatera Selatan dalam konstelasi regional. Keempat outlet (pintu gerbang) tersebut adalah Stasiun Kereta Api Kertapati, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pelabuhan Palembang, dan Terminal Angkutan Penumpang di Palembang.

1. Perhubungan Darat

Dalam sistem transportasi jalan terdapat permasalahan-permasalahan yang akan berpengaruh terhadap efektivitas angkutan orang dan barang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam transportasi jalan adalah sebagai berikut :

- Kondisi infrastruktur jalan nasional yang sebagian besar dalam kondisi rusak berat, yaitu jalan lintas timur sepanjang 405,32 km dan jalan lintas tengah sepanjang 472,35 km.
- Sistem jaringan jalan sebagian terletak pada wilayah dengan kondisi tanah yang labil sehingga diperlukan konstruksi khusus.
- Daya dukung jalan yang masih terbatas yang hanya mampu menahan beban 10 ton.

Masih rendahnya optimalisasi penggunaan sarana jalan. Hal ini disebabkan banyaknya ruas badan jalan yang digunakan tidak untuk peruntukan sebagaimana mestinya seperti pasar tradisional, parkir, pedagang kaki lima dan lain lain, sehingga rawan terjadi kemacetan. Kondisi ini juga diperburuk oleh sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal.

Kerusakan jalan di beberapa ruas jalan disebabkan oleh pelanggaran kelebihan muatan di jalan yang menyebabkan kerugian ekonomi. Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan lebih disebabkan rendahnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan kendaraan, terbatasnya fasilitas rambu keselamatan dan belum optimalnya penegakan hukum berlalu lintas di jalan.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu, perlu di tingkatkan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah di Sumatera Selatan yang memiliki potensi untuk berkembang tetapi belum memiliki akses jalan yang memadai. Seperti pembangunan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti, terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perumahan modern dan lain lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan permintaan terhadap penggunaan jalan. Tetapi disisi lain ketersediaan sarana jalan relatif mengalami perkembangan yang lebih lambat sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan. Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan masalah kemacetan khususnya di daerah perkotaan. Hal ini berlaku pula pada prasarana jembatan, daya dukung jembatan tidak mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang ada. Bahkan banyak jembatan tua dengan konstruksi baja Hamilton yang segera harus diganti.

Belum adanya pelabuhan yang mampu disandari oleh kapal-kapal bertonase besar di Sumsel juga menjadi masalah karena distribusi barang dan hasil alam Sumsel masih mengandalkan transportasi darat. Pelabuhan Boom Baru Palembang sulit dikembangkan karena memiliki keterbatasan seperti alur pelayaran sungai Musi yang semakin sempit dan dangkal, lahan daratan yang padat penduduk sulit dikembangkan, dan terbatasnya draft kapal yang dapat sandar.

Jaringan rel atau kereta api sebagai salah satu moda transportasi darat menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kondisi eksiting jaringan rel kereta api yang saat ini sudah tua dan aus, terutama pada jalur Lubuk Linggau - Lahat sepanjang 66 km yang memerlukan perbaikan.
- b. Wilayah pelayanan dari jaringan rel kereta api masih terbatas pada wilayah Lampung dan Sumsel. Jaringan rel ini memerlukan adanya penambahan jalur dan terintegrasikan dengan ruas

E.1.2. Infrastruktur Kereta Api

Lubuk Linggau-Bengkulu dan Palembang-Jambi perlu segera direalisasi sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor produk antar provinsi se-Sumbagsel (BELAJASUMBA) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

- c. Daya dukung rel yang masih terbatas dimana jaringan rel rawan anjlok.
- d. Jaringan rel kereta api masih berupa *single track*.

Dalam upaya mendukung pengembangan pelabuhan samudera Tanjung Api-api sebagai outlet dalam memasarkan produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, pertambangan, batubara, minyak bumi, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana perkeretaapian yang memadai.

2. Perhubungan Laut dan Sungai

Pergerakan dengan menggunakan transportasi laut saat ini dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru Palembang. Tetapi Pelabuhan Boom Baru memiliki keterbatasan dimana kedalaman ambang luar alur pelayaran maksimum 7000 DWT dengan draft lebih kecil dari 6,5 meter LWS dan panjang sekitar 120 meter. Kapal dengan draft lebih dari 6,5 meter dapat berlayar tetapi dengan muatan yang tidak penuh (*unfull loaded draft*).

E.2.1. Infrastruktur Pelabuhan

Sejalan dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan kegiatan perdagangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu perlu dicari lokasi yang layak bagi pengembangan pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor dan import dari dan ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, lokasi yang dipandang layak untuk dijadikan pelabuhan samudera adalah Tanjung Api-Api. Pelabuhan ini digunakan sebagai outlet untuk memasarkan produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, perkebunan, industri dan pertambangan. Untuk mendukung pelabuhan Tanjung Api-Api ini perlu dibangun jalan akses, yaitu jalan kereta api (*railway track*) dan jaringan jalan.

Meningkatnya permintaan angkutan barang khususnya angkutan minyak dan batubara yang tidak diimbangi dengan ketersediaan armada kapal. Meningkatnya permintaan ini disebabkan peningkatan kegiatan ekonomi di bidang pertambangan karena banyaknya perusahaan yang beroperasi di Sumsel. Tetapi disini lain ketersediaan armada kapal yang mengangkut minyak dan batubara sangat terbatas, banyak dari

perusahaan-perusahaan pertambangan yang menggunakan kapal milik asing.

Permasalahan lain mencakup keterjangkauan pelayanan angkutan yang masih terbatas dalam melayani kebutuhan angkutan sungai dari dan ke wilayah bagian timur Sumatera Selatan yang umumnya daerah transmigrasi dan jarak tempuh layar yang cukup lama (± 12 jam), keterbatasan kapasitas angkut kapal yang di sebabkan oleh keterbatasan kapal yang beroperasi untuk lintas Palembang–Muntok (Pulau Bangka).

*E.2.2.
Infrastruktur
Sungai*

3. Perhubungan Udara

Transportasi udara merupakan transportasi alternatif yang memiliki kelebihan dari segi kecepatan dan waktu tempuh dibandingkan dengan transportasi lainnya (darat dan laut). Pelayanan transportasi udara untuk pergerakan ke luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani oleh Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Rute yang dilayani saat ini, untuk penerbangan domestik adalah Jakarta, Padang, dan Batam. Selain itu rute penerbangan internasional yang dilayani adalah rute ke Singapura.

*E.3.1.
Potensi
Infrastruktur
Udara*

Dilihat dari kapasitas pelayanan udara sampai saat ini masih memadai, dimana load faktor-nya rata-rata berkisar antara 30 sampai 90%. Selain bandara udara Sultan Mahmud Badarudin II, di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa lapangan terbang yang melayani pergerakan lokal, yaitu yang terdapat di Sekayu, Lubuk Linggau, dan Danau Ranau.

Kegiatan bandara memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. Standar jarak bangunan terdekat dari bandara adalah penting untuk keselamatan penerbangan. Akan tetapi seiring dengan penambahan penduduk, maka laju pertumbuhan pemukiman dan bangunan lainnya dirasakan akan menjadi faktor resiko keselamatan. Masih panjangnya rel yang tidak ekonomis karena sudah aus dan tua sehingga rawan terjadi anjlok. Banyaknya perlintasan kereta api yang tidak dijaga sehingga menimbulkan kecelakaan yang banyak menelan korban jiwa.

*E.3.2.
Permasalahan
Infrastruktur
Udara*

4. Permukiman dan Perumahan

Rumah tangga yang belum memiliki rumah masih sangat banyak dan merupakan akumulasi dari kebutuhan tahun-tahun sebelumnya yang belum terakomodasi oleh penyediaan rumah yang dilakukan oleh BUMN dan pengembang swasta. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat miskin, pemerintah berusaha untuk membangun kebutuhan rumah yang setiap tahunnya terus meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan pendanaan yang dimiliki pemerintah, kebutuhan tersebut tidak dengan segera dapat terpenuhi.

Penyediaan sarana dan prasarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk menurunkan harga jual rumah di kawasan tersebut. Diharapkan, masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah memiliki kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta memicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi kawasan perumahan seperti ini pada tahap berikutnya berkembang menjadi kawasan kumuh baru.

Luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan tidak terkendalinya pertumbuhan kota utama (*primacy city*) yang menjadi daya tarik meningkatnya arus migrasi. Meningkatnya laju pertumbuhan kawasan kumuh (dipusat kota maupun pinggiran kota) dapat dipicu oleh keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah (*home improvement*). Hal lain yang juga menjadi pemicu adalah ketidakharmonisan antara struktur dan infrastruktur kota, khususnya jaringan jalan dengan kawasan permukiman yang terbangun. Di pinggir kota hal tersebut yang menimbulkan *urban sprawl* yang membawa dampak kepada kemacetan (*congestion*), ketidak-teraturan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan serta pemborosan energi.

Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalankan fungsi, baik sebagai pembangun (*provider*) maupun

*E.4.1.
Kondisi
Permukiman
dan
Perumahan*

*E.4.2.
Permasalahan
Permukiman
dan
Perumahan*

sebagai pemberdaya (*enabler*). Walaupun peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa masalah perumahan dan pemukiman merupakan tanggung jawab pemerintah daerah namun belum mantapnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman pada semua tingkatan pemerintahan menyebabkan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang terjangkau dan layak huni belum dapat dipenuhi dan menjadi persoalan yang kritis. Pemerintah telah berupaya membentuk BKP4N untuk mengatasi persoalan tersebut tapi hal ini tidak efektif karena badan ini bukan badan operasional, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sulit dikoordinasikan dan ditindaklanjuti.

5. Air Bersih

Dalam lingkup air bersih dan sarana lingkungan suatu permukiman perlu dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pendorong pencapaian kualitas lingkungan yang lebih baik seperti yang juga menjadi sasaran dalam salah satu program *Millenium Development Goals* (MDG's) yang telah dicanangkan PBB, yang sasarannya pada tahun 2015 adalah mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum mendapat pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai baik perkotaan maupun diperdesaan.

Pada umumnya cakupan pelayanan air bersih masih berkisar 40-50 persen jumlah penduduk dan dengan tingkat pelayanan yang rata-rata 30-60 liter per orang per hari. Besarnya tingkat kehilangan air, termasuk juga kebocoran pada jaringan perpipaan turut pula menambah permasalahan yang ada. Termasuk pula yang perlu digaris bawahi adalah ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dari instalasi pengolahan air dengan sistem jaringan distribusi yang ada. Selain itu permasalahan yang juga umum terjadi adalah pada kondisi peralatan yang sudah tua dan perawatannya yang belum maksimal.

E.5.1. Kondisi Air Bersih

6. Drainase

Sistem drainase yang belum tertata dengan baik akan menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Sampah yang dibuang oleh masyarakat kedalam drainase menjadikan kapasitas pengaliran menjadi lebih kecil dan mengganggu fungsi saluran drainase sendiri. Demikian pula dengan kesempatan pengaliran yang rendah pada beberapa saluran

E.6.1. Kondisi Drainase

menimbulkan sedimentasi yang juga menjadi penyebab berkurangnya kapasitas pengaliran.

7. Air Limbah

Minimnya fasilitas pembuangan sampah di beberapa kawasan yang ramai seperti pasar, termasuk yang lainnya, akan memancing masyarakat membuang sampah sembarangan dan bahkan membuang disaluran drainase. Selain itu budaya dan peraturan yang belum diterapkan, fasilitas yang belum begitu diterapkan dan belum sebanding dengan produksi sampah sendiri. Hal ini dapat terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan prasarana yang sudah rusak. Penanganan tempat pembuangan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka masih umum terjadi. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

*E.7.1.
Kondisi
Air Limbah*

8. Sumberdaya Air

Daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Selatan menurut ketetapan pemerintah terdiri dari DAS Musi yang luasnya 59,942 km² dan DAS Sugihan. Disamping itu, daerah Sumatera Selatan memiliki 9 sungai besar yang dikenal dengan batanghari sembilan, yaitu Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lakitan, Sungai Semangus, dan Sungai Batanghari Leko. Sungai-sungai tersebut merupakan potensi sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga.

*E.8.1.
Potensi
Sumberdaya
Air*

Pemanfaatan sumberdaya air untuk menunjang pembangunan pertanian dalam arti luas dikemas dalam bentuk sistem pengairan, yaitu sistem irigasi dan drainase di lahan sawah irigasi, lebak dan pasang surut. Bentuk bangunan irigasi berupa saluran primer, sekunder tersier dan bahan bangunan permanen tembok atau hanya berupa timbunan tanah hasil galian. Untuk daerah lebak dan pasang surut, salurannya hanya berupa galian tanah dengan kedalaman sesuai kelas atau tingkatan salurannya.

Pembangunannya selama ini telah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Dalam perjalanannya ternyata sebagian sumberdaya air yang melalui saluran tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan dan keperluan hidup sehari-hari masyarakat dan media pemeliharaan ikan. Untuk daerah pasang surut juga dimanfaatkan untuk transportasi air.

Mengingat terdapatnya multifungsi dan multiguna dari sistem pengairan yang ada tersebut maka revitalisasi pembangunannya difokuskan pada perbaikan serta peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya air yang ada.

Upaya revitalisasi sistem pengairan dihadapkan pada beberapa masalah seperti adanya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan secara sengaja atau tak sengaja yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan non ekonomi masyarakat dan terjadinya banjir di beberapa kabupaten/kota yang juga terkait dengan rusaknya DAS maupun dampak pembangunan yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan.

Selain itu persoalan pengairan lainnya menyangkut masih kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan rawa pasang surut dan rawa lebak karena terbatasnya dana dan rendahnya partisipasi masyarakat, belum lengkapnya prasarana jaringan rawa pasang surut dan rawa lebak, belum berkembangnya kelembagaan pengelola operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, dan belum tersedianya jaringan irigasi dan drainase di daerah tadah hujan.

*E.8.2.
Permasalahan
Sumberdaya
Air*

9. Listrik

Dalam usahanya menghasilkan listrik, PLN Wilayah IV Sumatera Selatan menggunakan 3 jenis listrik yaitu tenaga diesel, tenaga uap, dan tenaga gas. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan semuanya menggunakan diesel sebagai pembangkit tenaga listrik, sementara PLTU hanya digunakan di Kota Palembang dan Muara Enim.

Jumlah pelanggan PLN di Sumatera selatan selama 5 tahun terakhir (2000-2004) umumnya didominasi oleh rumah tangga dan pelanggan listrik untuk industri selalu paling sedikit. Di tahun 2004, jumlah pelanggan listrik untuk rumah tangga mencapai 97,87 persen dari total pelanggan sebesar 640.163 pelanggan, sedangkan 0,05 persen dari total tersebut adalah pelanggan dari sektor industri.

Jaringan transmisi yang ada di Sumatera Selatan terdiri dari tegangan 150 KV (1.080,72 kms) dan 70 KV (3.395,2 kms), sedangkan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 KV (290 kms) telah dipersiapkan untuk interkoneksi se-Sumatera dan saat ini masih bertegangan 150kV.

*E.9.1.
Kondisi
Kelistrikan*

Dibanding tahun 2003, pertumbuhan listrik tahun 2004 mencapai rata-rata 8,32 persen per tahun. Dilihat dari jumlah pelanggan listrik PLN meningkat 2,43 persen per bulan, dan korelasi jumlah desa yang dialiri listrik menjadi 76 %, daya terpasang listrik PLN semula 462,6 MW menjadi 1.553 MW, daya mampu kelistrikan semula 430 MW menjadi 1.362 MW, beban puncak kelistrikan semula 297 menjadi 1.029 MW, listrik non PLN (*captive power*) mencapai 784 MW, pemasangan listrik PLTS semula 798 unit menjadi 1.053 unit dan pembangunan PLTMH semula 5 unit menjadi 6 unit (240 MW).

Pertumbuhan investasi pembangunan pembangkit tenaga listrik antara lain PLTG Borang (1 x 135 MW), Talang Duku (1 x 35 MW), Simpang I (1 x 50 MW), Gunung Megang (2 x 40 MW), dan Inderalaya (1 x 50 MW), PLTU Banjarsari (2 x 100 MW), Sekayu (2 x 50 MW), Muara Enim (2 x 10 MW), Sungai Malam (2 x 100 MW), dan Sriwijaya Bintang Tiga (2 x 100 MW).

Adapun jumlah pelanggan PLN di Sumatera Selatan umumnya didominasi oleh rumah tangga dan pelanggan listrik untuk industri selalu paling sedikit. Jumlah pelanggan listrik untuk rumah tangga mencapai 94,34 % dari total pelanggan, sedangkan 0,05 % dari total tersebut adalah pelanggan dari sektor industri.

Untuk melayani listrik di pedesaan saat ini telah tersedia 2.387 unit PLTS (131 KW) dan PLTMH berjumlah 6 unit (240 KW). Desa yang telah terlayani listrik berjumlah 1.911 desa (76 persen) dan desa yang belum berlistrik berjumlah 481 desa (24 persen).

Kebutuhan daya listrik di Sumbagsel sampai dengan tahun 2009 diperkirakan mencapai 1.900 MW dengan asumsi penambahan daya listrik rata-rata 7,6 persen per tahun. Pada tahun 2004 pembangkit listrik PLN menghasilkan produksi energi 1.587.307 MWh yang sebagian besar disuplai dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bukit Asam.

Hingga tahun 2004, rasio elektrifikasi di Sumatera Selatan baru mencapai 45,6 persen dengan rasio desa berlistrik sebesar 76,58 persen. Rasio elektrifikasi di Sumatera Selatan masih tergolong rendah yakni sebesar 45,6 persen yang berarti belum sampai setengah dari penduduk Sumatera Selatan dapat menikmati energi listrik.

Jaringan distribusi di Sumatera Selatan yang meliputi tegangan menengah 20 KV dan tegangan rendah 220 Volt yang melayani pendistribusian energi hingga ke konsumen yang letaknya jauh dari gardu induk/pusat pembangkit.

Pada saat ini kondisi kelistrikan wilayah Sumatera Selatan setelah interkoneksi sistem transmisi 275 kV Sumbagsel – Sumbar/Riau dan dengan beroperasinya PLTG Borang, Talang Duku dan Simpang, maka terjadi surplus energi sebesar 267,6 MW yang disalurkan ke Provinsi Lampung, Bengkulu dan Sumbar.

Biaya investasi di sektor ketenagalistrikan sangat besar, yang meliputi investasi pengembangan jaringan. Keterbatasan dana yang ada mengakibatkan pembangunan ketenagalistrikan relatif lamban. Upaya untuk mengundang investor berkiprah di bidang ketenagalistrikan selama ini masih terkendala dengan kondisi non teknis (iklim investasi, keamanan, konflik sosial, dan sebagainya).

Umumnya penghasilan masyarakat pedesaan bergantung pada hasil pertanian/perkebunan. Di Sumatera Selatan sebagian besar penduduk desa mengusahakan kebun/ladang tanaman musiman. Karena panen yang bersifat tahunan, umumnya daya beli masyarakat pedesaan relatif rendah sehingga penjualan listrik dengan harga keekonomian akan mengalami kendala.

Untuk mengalirkan energi listrik ke pedesaan yang terpencil/terisolir dibutuhkan investasi yang besar, semakin jauh dan terpencar desa-desa yang akan dialiri listrik akan mengakibatkan biaya investasi yang semakin besar.

Penggunaan energi listrik yang utama di pedesaan adalah untuk penerangan pada malam hari dan untuk sarana hiburan. Selain itu umumnya jumlah penduduk di pedesaan relatif kecil. Kondisi ini mengakibatkan pelanggan yang sedikit dan kebutuhan energi listrik yang kecil. Hal ini tentunya kurang menguntungkan bila dikaitkan dengan besarnya biaya investasi yang diperlukan. Akibatnya pihak investor kurang berminat untuk mengembangkan listrik pedesaan.

10. Telekomunikasi

Kegiatan telekomunikasi pada publikasi ini meliputi aktivitas jumlah pelanggan telepon di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah yang terlayani telekomunikasi menurut Kandatel Sumatera Bagian Selatan adalah Palembang Ilir, Palembang Ulu, Baturaja, dan Lubuk Linggau.

*E.10.1.
Kondisi
Telekomunikasi*

F. Keamanan dan Ketertiban

Makin maraknya penyalahgunaan narkoba pada saat ini juga telah menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan hidup bangsa, yang ditandai dengan adanya lebih dari dua juta pecandu narkoba yang 90 persennya adalah generasi muda.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar bahkan sudah menjalar sampai ke desa-desa. Kondisi demikian akan berdampak kepada dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

Beragamnya budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan salah satu pencetus timbulnya kriminilitas di masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan Keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat.

F.1. Kondisi Keamanan dan Ketertiban

G. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum dewasa ini masih pada bagaimana mengatasi masalah krusial, seperti belum adanya kesungguhan untuk menegakkan supremasi hukum serta berkurangnya kesadaran hukum bagi aparat dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya tumpang tindih peraturan perundangan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya seperti perda. Permasalahan dari Perda-perda yang dikeluarkan oleh daerah kab/kota terutama berkaitan antara lain dengan kejelasan prosedur seperti standar, waktu, biaya, prosedur, tarif dan lainnya.

Belum berpihaknya penegakan hukum dan kepastian hukum pada sebagian masyarakat dalam bentuk rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan kurang mampu. Hal itu karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara masyarakat masih belum mengerti bagaimana prosedur yang tepat untuk mendapatkan keadilan.

G.1. Kondisi Hukum dan Aparatur

Demikian pula, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap perlindungan dan penghormatan HAM masih belum memberikan dampak yang menggembirakan dalam masyarakat. Merupakan suatu kenyataan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan pemahaman terhadap nilai-nilai HAM belum memengaruhi perilaku setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Salah satu permasalahan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang saat ini berkembang dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah yaitu korban tindak kekerasan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan berusaha, dimana korbannya lebih dominan kepada anak, kaum perempuan dan lanjut usia. Sedangkan untuk mendapatkan data para korban yang mengalami tindak kekerasan tersebut sangat sulit, karena tertutupnya kasus di masyarakat dan masih adanya rasa takut dari para korban itu sendiri untuk melapor akibat dari rendahnya pemahaman terhadap hukum.

H. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi kawasan Metropolitan Palembang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pariwisata, pendidikan dan pelayanan sosial.

Untuk kota-kota yang fungsinya termasuk kedalam Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kota Lubuk Linggau, Baturaja, Kayu Agung, Muara Enim, Inderalaya, Sekayu dan Sungsang. Sedangkan kota-kota yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kota Lahat, Prabumulih, Pangkalan Balai, Muara Beliti, Pagaralam, Martapura dan Muara Dua.

H.1. Pusat Pengembangan Wilayah

Tabel 2.9
Sistem dan Kedudukan Kawasan dalam Sumatera Selatan

No	Nama Kota	Fungsi Kota	Jenis pelayanan
1.	Metropolitan Palembang	PKN	Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Industri, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Pelayanan Sosial
2.	Muara Enim	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pertambangan dan Perkebunan, Jasa Wisata dan Budaya.
3.	Lubuk Linggau	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, Perkebunan, dan Industri.
4.	Sekayu	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pertambangan dan Kehutanan
5.	Kayu Agung	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Perkebunan
6.	Baturaja	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pariwisata
7.	Indralaya	PKW	Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Jasa dan Perdagangan.
8.	Sungsang	PKW	Jasa, Perdagangan, Industri dan Pariwisata

Sumber : RTRW Pulau Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan RTRW Nasional, terdapat tiga Kawasan Andalan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu kawasan andalan Muara Enim, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Metropolitan Palembang. Kawasan Andalan Muara Enim merupakan kawasan unggulan pada sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Kawasan Unggulan Lubuk Linggau dengan sektor andalan pada sektor Pertanian, Perkebunan dan Industri. Kawasan Andalan Palembang dengan andalan pada sektor pertanian, industri, pertambangan, perikanan dan kehutanan.

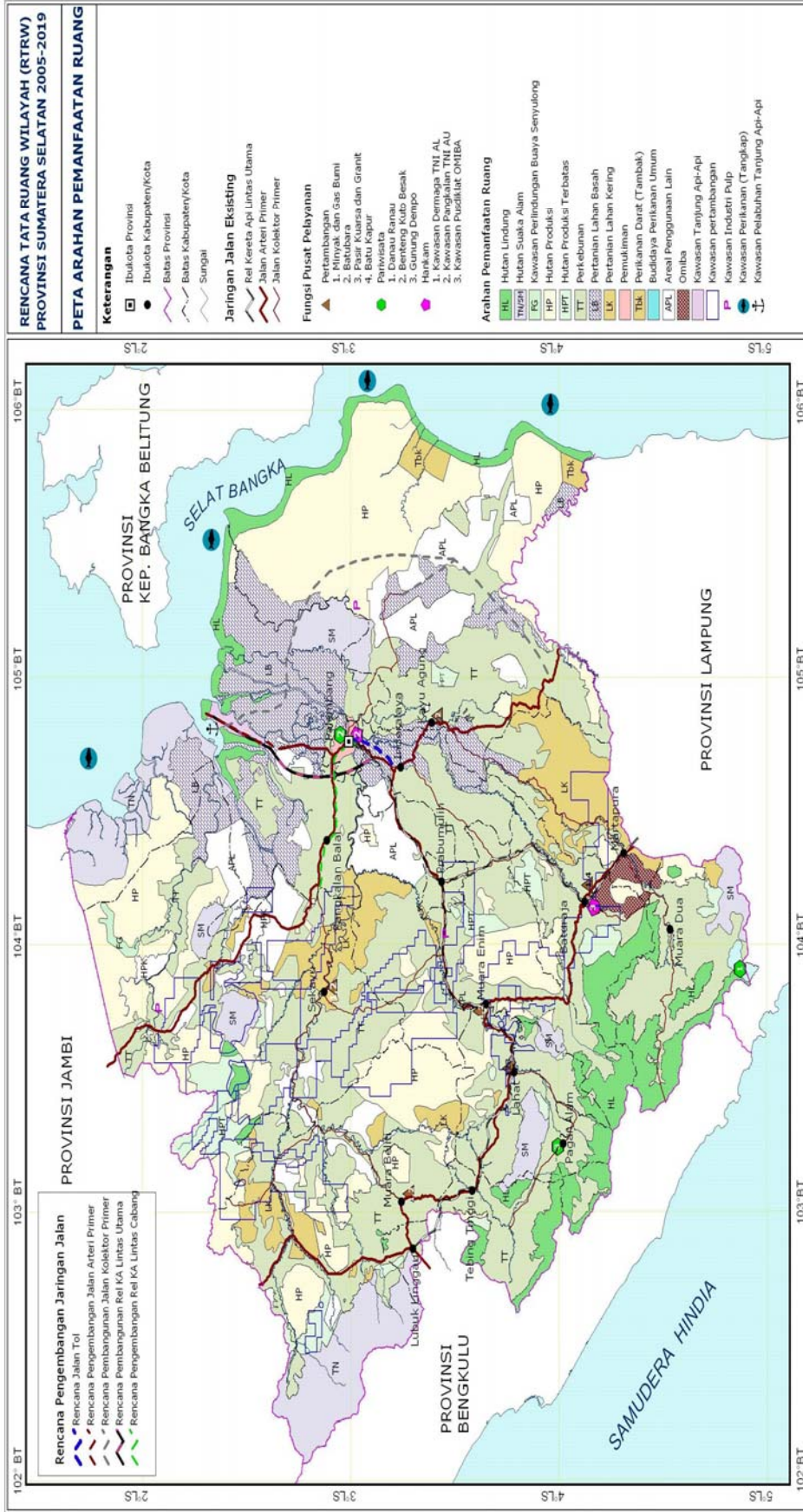
H.2. Kawasan Andalan

Kawasan prioritas merupakan kawasan yang karena kondisinya perlu mendapatkan penanganan yang segera. Kawasan prioritas di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

H.3. Kawasan Prioritas

- Kawasan tertinggal yang meliputi kawasan-kawasan yang memiliki keterbatasan sumber daya alam atau tingkat aksesibilitasnya yang terbatas sehingga tidak dapat memanfaatkan atau menangkap peluang ekonomi yang ada. Kawasan tertinggal ini sebarannya berada di Kabupaten OKI, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Lahat, OKU, Timur dan OKU Selatan.
- Kawasan Lahan Kritis, yaitu kawasan yang karena kondisi geologinya menyebabkan potensi untuk terjadi bencana cukup besar. Kawasan ini terutama pada kawasan dengan tingkat kemiringan lahan yang besar serta daya dukung tanahnya yang labil. Kawasan lahan kritis ini sebarannya berada di Kabupaten Muara Enim, OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Lahat, DAS Musi dan DAS Sugihan-Lalan.
- Kawasan Andalan, merupakan kawasan yang secara ekonomi berpotensi untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Kawasan andalan ini meliputi Kota Palembang, Lubuk Linggau dan Muara Enim.
- Kawasan Metropolitan Palembang - Inderalaya - Pangkalan Balai -Sungsang. Kawasan ini merupakan pengembangan wilayah terpadu antar kota dan wilayah belakangnya.
- Kawasan Tanjung Api-Api yang merupakan kawasan pengembangan pelabuhan laut yang berintegrasi dengan kawasan industri dengan dukungan sarana dan prasarana moda transportasi yang akan menjadi motor penggerak investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Secara tematik, pembagian kawasan berdasarkan tata ruang yang ada di Sumatera Selatan dapat dilihat pada peta arahan pemanfaatan ruang berikut ini.



Gambar 2. 2.
Peta Arahlan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan mendasar yang dapat ditemui di suatu wilayah adalah kesenjangan (ketimpangan/disparitas/gap) antar wilayah. Kesenjangan antara wilayah Sumatera Selatan bagian barat dengan bagian timur secara kasat mata dapat dilihat dari banyaknya atau panjangnya infrastruktur dan kualitas pelayanan infrastruktur di kedua wilayah tersebut.

Keberadaan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung percepatan pembangunan. Wilayah Barat memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah Timur. Dapat dilihat bahwa Wilayah Barat relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Timur. Aksesibilitas dari dan ke beberapa bagian wilayah dapat dilakukan dengan mudah. Distribusi hasil-hasil pertanian dan barang perekonomian lainnya ke pasar berjalan dengan lancar karena didukung moda transportasi yang memadai. Kondisi yang kondusif ini berdampak positif terhadap harga barang kebutuhan sehari-hari.

Sebaliknya Wilayah bagian timur relatif lebih tertinggal dibandingkan dengan wilayah bagian barat. Wilayah yang termasuk kelompok ini antara lain wilayah pesisir Kabupaten Banyuasin dan wilayah pesisir Kabupaten OKI. Ketidakterediaan infrastruktur menjadikan aksesibilitas ke wilayah ini sangat rendah dan pada akhirnya menjadi terisolasi. Beberapa daerah hanya dapat dicapai dengan menggunakan angkutan sungai dengan kapasitas yang terbatas. Akibatnya hasil produksi pertanian sulit diangkut ke pasar. Kalaupun bisa hanya menggunakan moda transportasi yang kecil sehingga jumlah yang diangkut cukup terbatas dan pada akhirnya harganya tidak dapat bersaing.

Kesenjangan wilayah lainnya adalah antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Wilayah perkotaan memiliki berbagai fasilitas dan kemudahan yang jauh lebih lengkap dibandingkan wilayah perdesaan. Peluang berusaha dan mendapatkan penghasilan juga tersedia di wilayah perkotaan. Besarnya daya tarik perkotaan ini menyebabkan banyak tenaga kerja “unskill” (yang sebetulnya lebih dibutuhkan di perdesaan) bermigrasi ke perkotaan untuk mengadu nasib. Akibatnya wilayah perdesaan semakin tertinggal sementara wilayah perkotaan terus berkembang.

Perhatian terhadap wilayah perdesaan memang diakui belum sebesar wilayah perkotaan. Pembangunan fisik di wilayah perkotaan jauh lebih pesat dibandingkan perdesaan. Konsekuensinya pembangunan kota – desa menjadi makin tidak seimbang dan menyebabkan makin tingginya kesenjangan antar perkotaan – perdesaan yang berimplikasi pada munculnya berbagai masalah terkait dengan urbanisasi, dan permasalahan sosial lainnya.

H.4. Permasalahan Aksesibilitas dan Kesenjangan Wilayah

Sementara itu, dalam melaksanakan pembangunan di wilayah-wilayah potensial, strategis, dan cepat tumbuh, keterkaitan dan integrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih tertinggal kurang mendapat perhatian. Akibatnya kemajuan yang berlangsung di wilayah strategis dan cepat tumbuh belum mampu memberikan pengaruh positif kepada wilayah tertinggal di sekitarnya.

Permasalahan pengembangan wilayah dan tata ruang terkait dengan masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan, serta dalam menyediakan pelayanan sarana dan prasarana permukiman perkotaan. Pertumbuhan kota yang kurang terkendali sangat terkait dengan masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang serta belum terwujudnya kelembagaan penataan ruang dan pertanahan yang efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan yang ditemui dibidang Penataan Ruang antara lain sulitnya mengimbangi dan mengantisipasi pertumbuhan pemanfaatan ruang yang dinamis, kurangnya sosialisasi Rencana Tata Ruang, kurang berfungsinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota, kurangnya penegakan hukum terhadap para pelanggar Rencana Tata Ruang, dan masih terbatasnya data spasial baik dari segi tematik maupun skala sehingga informasi yang dapat diketahui tidak mendetail.

H.5. Permasalahan Aksesibilitas

I. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan dalam perekonomian. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun dilain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih mengejar target produksi jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploratif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin terdegradasi.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diseluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan kedalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintah yang baik yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Sumberdaya hutan di Sumsel saat ini sekitar dalam kondisi rusak dan kondisi lahan diluar kawasan hutan banyak yang kritis sehingga potensi keberlanjutan dan daya dukung lingkungannya tidak dapat dimaksimalkan. Saat ini sangat sulit menemukan hutan alami dengan jenis primer dan sekunder bahkan dikawasan konservasi itu sendiri. Ini merupakan gejala tidak sehat di mana dua dekade lalu Sumsel terkenal dengan hutan alam dataran rendahnya.

Menurut Badan Planologi Dephut, Sumatera Selatan memiliki tutupan hutan permanen seluas 4.269.690 ha yang terdiri dari hutan konservasi seluas 822.300 ha, hutan lindung seluas 879.390 ha, hutan produksi terbatas seluas 298.600 ha, dan hutan produksi seluas 2.269.400 ha. Kemudian pada tahun 2001 berdasarkan laporan Bank Dunia mengenai kondisi hutan di Indonesia, maka laju hilangnya hutan (*deforestasi*) di Sumsel mencapai rata-rata 192.824 ha per tahun. Artinya dengan laju deforestasi rata-rata hampir 200.000 ha per tahun tersebut maka pada tahun 2008 tidak ada lagi hutan yang tersisa termasuk di kawasan lindung dan konservasi.

Potensi kehutanan juga sangat besar dimana didalamnya terdapat hasil-hasil hutan bukan hanya berupa kayu, tetapi juga hasil hutan berupa non kayu seperti manau, rotan, bambu, sarang burung walet, serta berbagai hasil hutan lainnya. Sebagian hutan tersebut ada yang berstatus dilindungi dan dilestarikan seperti kawasan hutan lindung, suaka cagar alam, yang perlu dijaga keseimbangan dan kelestarian populasi tanaman dan hewan-

*I.1.
Kondisi
Sumberdaya
Alam dan
Lingkungan
Hidup*

hewan yang berada didalamnya. Khusus mengenai pemanfaatan hasil hutan berupa kayu banyak persoalan muncul seperti adanya *illegal logging* yang sulit untuk diatasi dan memerlukan penanganan yang lebih serius dari seluruh aparat terkait dan masyarakat sekitar hutan.

Sumberdaya manusia, pendanaan, sarana-prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan yang harus di kelolanya. Hal ini mempersulit penanggulangan masalah kehutanan seperti pencuri kayu, kebakaran hutan, pemantapan kawasan hutan, dan lain-lain. Satuan Polisi Hutan yang menjaga hutan jumlahnya sangat terbatas di samping kurangnya kesadaran dari para oknum aparat keamanan untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan Sumatera Selatan.

Rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan juga terlihat dari kebijakan masa lampau yang cenderung obral murah terhadap izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar, tambang, tambak, dan transmigrasi. Pemberian izin tersebut bukannya tidak strategis namun terkesan tidak adanya perencanaan terpadu dan menyeluruh melihat potensi seluruh hutan Sumsel dari berbagai pertimbangan dan sudut pandang

Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan dan memiliki potensi ekonomi belum berkembang seperti yang di harapkan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar dari nilai produk kayunya. Di perkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7 persen dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, obyek penelitian, wisata alam dan sebagainya. Permasalahannya adalah sampai saat ini sistem pemanfaatannya belum berkembang secara maksimal.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan suatu komitmen bagi setiap pelaku pembangunan namun demikian masih terjadi perilaku manusia yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan bahkan mengarah kepada perusakan lingkungan. semua. Perusakan hutan, pertambangan liar (PETI) dan limbah industri berdampak langsung terhadap degradasi alam.

Masih tingginya kasus penebangan liar, pertambangan tanpa izin (PETI) dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri merupakan faktor penyebab kerusakan sumberdaya alam dan degradasi kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan penegakan hukum masih lemah. Lemahnya penegakan hukum dibidang ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas aparatur penegak hukum, rendahnya ketaatan masyarakat terhadap hukum, serta pengawasan yang belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.

Ada anggapan yang terjadi dimasyarakat bahwa sumber daya alam yang ada dapat terus memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa takut sumber daya itu akan habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan. Akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup disekitarnya. Hal ini diperparah dengan persoalan pokok yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan dan keserakahan dalam menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran.

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan tidak dapat dilakukan dengan hanya bergantung pada sumberdaya manusia semata tetapi perlu didukung oleh sarana dan prasarana lainnya seperti laboratorium lingkungan, alat pemantau kualitas air dan udara serta alat uji emisi.

II.2. TANTANGAN

Melihat kondisi yang ada pada saat ini, tantangan 20 tahun ke depan secara umum adalah masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, masih terbatasnya sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, dan belum optimalnya sinergisitas percepatan pembangunan daerah.

Penyebab utama tingginya pengangguran dan kemiskinan adalah karena keterbatasan lapangan kerja dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan/keahlian, dan kompetensi tenaga kerja yang masih rendah.

Penyediaan sarana dan prasarana dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah. Percepatan keseimbangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan

dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang secara nyata akan mempengaruhi perkembangan berbagai sektor pembangunan terutama dalam mendukung pemasaran produk yang dihasilkan dari usaha masyarakat di daerah terpencil. Adanya fasilitas dan sistem transportasi yang baik akan memudahkan arus perekonomian lintas wilayah, regional, dan internasional. Kebutuhan penyediaan prasarana dasar seperti irigasi, telekomunikasi, energi, air bersih dan sebagainya akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan wilayah.

Pemanfaatan sumberdaya alam perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Sumberdaya alam yang kaya dan sumberdaya lahan yang luas yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta pertambangan.

Agar mampu menghasilkan dampak yang lebih besar dan berantai (*multiplier effects*) maka diperlukan sinergisitas dalam mempercepat pembangunan daerah. Peningkatan kinerja dalam pengembangan wilayah dan tata ruang, pengembangan kawasan perbatasan serta kerjasama pembangunan perlu dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang lebih baik dan sinergis.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Sumatera Selatan, maka tantangan yang dihadapi bidang kependudukan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah menata sistem administrasi dan sistem informasi kependudukan yang akurat dan mudah diakses. Melalui kecepatan dan akurasi sistem administrasi dan sistem informasi kependudukan, akan memudahkan penyusunan perencanaan dalam segala bidang, terutama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pemerintahan.

Karena luas lahan yang ada bersifat tetap dan sebagai provinsi ke-8 terbesar penduduknya, maka pengendalian laju pertumbuhan menjadi tantangan ke depan yang penting bagi bidang Keluarga Berencana. Namun demikian, pengendalian ini perlu juga disertai dengan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan pengetahuan tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi.

A.1. Tantangan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Adanya kenyataan dimana terjadinya peningkatan laju pertumbuhan angkatan kerja di Sumatera Selatan, menjadi tantangan ke depan untuk mengimbangnya dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja yang mencukupi di semua sektor.

Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumberdaya alamnya di Indonesia, Sumatera Selatan ditantang untuk dapat menjamin pendapatan pekerja yang ada di wilayahnya mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang layak, dalam arti lebih dari standar minimum. Untuk itu, kebijakan UMR yang sudah di atas KFM/KHM perlu dilanjutkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah Sumatera Selatan kepada rakyatnya.

Masih cukup besarnya angka pengangguran di Sumatera Selatan, menjadi tantangan 20 tahun ke depan untuk menurunkannya baik dalam persentase maupun jumlahnya. Penurunan angka kemiskinan terutama ditujukan pada pengangguran terbuka yang ada di perkotaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di sektor formal. Upaya ini perlu diimbangi pula dengan peningkatan kualitas pekerja baik pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan keterampilannya melalui pendidikan formal dan informal.

Agar mampu menghasilkan masyarakat, termasuk pekerja yang berkualitas, maka tantangan ke depan adalah memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, proses belajar mengajar yang berkualitas, sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai, kurikulum yang tepat, dan kesejahteraan tenaga pendidik yang memadai.

Bagi Pemerintah Sumatera Selatan, kinerja di bidang pendidikan terutama diukur dari indikator angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, dan angka melek huruf. Untuk itu, menjadi tantangan ke depan untuk meningkatkan dan memperbaiki persentase indikator tersebut. Pemerataan kesempatan dan akses terhadap pelayanan pendidikan perlu menjadi perhatian yang serius.

Dalam kerangka penguatan sumberdaya manusia di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan layanan dan fasilitas perpustakaan menjadi tantangan 20 tahun ke depan. Tantangan lainnya adalah upaya peningkatan minat dan budaya baca agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan informasi dan tidak ketinggalan dinamika kehidupan global. Selain itu, diperlukan pula upaya penyediaan data seputar perpustakaan baik yang bersifat umum maupun khusus (universitas, sekolah, dan lainnya) beserta kondisi dan layanan perpustakaan lainnya.

A.2. Tantangan Ketenagakerjaan

A.3. Tantangan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia

A.4. Tantangan Perpustakaan

Tantangan dalam bidang kepemudaan di Sumatera Selatan, dihadapkan pada upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan daerah, bangsa dan negara. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di segala bidang, memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, menaikkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan, dan mencegah pemuda terlibat dalam penyalahgunaan napza dan minuman keras.

A.5.
*Tantangan
Kepemudaan
dan Olahraga*

Dalam bidang keolahragaan Sumatera Selatan, tantangan yang ada adalah bagaimana agar pembibitan dan pembinaan olahraga dapat meningkat dan merata di seluruh daerah baik di lingkungan sekolah, pekerjaan, maupun permukiman sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

Tantangan untuk pelayanan kesehatan adalah bagaimana meningkatkan angka harapan hidup, penanganan terhadap ibu hamil dan balita, penurunan angka kematian bayi dan ibu di Sumatera Selatan. Untuk itu diperlukan pemerataan, keterjangkauan, dan akses pelayanan kesehatan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dengan standar pelayanan yang baik. Upaya ini membutuhkan peningkatan anggaran di bidang kesehatan untuk penyediaan fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan tenaga dokter.

A.6.
*Tantangan
Kesehatan*

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat Sumatera Selatan, tantangan yang perlu dijawab adalah penanganan bencana, baik dalam hal perencanaan, identifikasi, proses tanggap darurat, dan pasca bencana. Kecepatan dan ketepatan dalam penanganan bencana diperlukan untuk membuat sesedikit mungkin korban yang berjatuhan. Selain dibutuhkan peralatan yang memenuhi standar dan mencukupi, juga diperlukan pengumpulan dan pengelolaan dana dari kedermawanan sosial (filantropi) yang efektif.

A.7.
*Tantangan
Perlindungan
dan
Kesejahteraan
Masyarakat*

Tantangan ke depan dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial adalah bagaimana mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sumatera Selatan. Penanggulangan PMKS ini memerlukan akurasi dan update data mengenai jumlah dan jenis, jumlah sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi, berkualitasnya aparatur pemerintah dalam penanganan PMKS serta besarnya partisipasi masyarakat secara luas dalam mengatasi masalah PMKS.

Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan adalah bagaimana memenuhi hak atas kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, bagi seluruh penduduk Sumatera Selatan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan secara lebih merata. Pengelolaan potensi ekonomi (sumberdaya produktif) baik sumberdaya alam, tenaga kerja, luas wilayah, dan modal menjadi sangat penting. Selain itu, diperlukan pemerataan struktur penguasaan lahan dan kepastian pemilikan lahan, serta perkecilaan kesenjangan ekonomi antar daerah di Sumatera Selatan.

A.8.
*Tantangan
Kemiskinan*

Tantangan ke depan di bidang budaya Sumatera Selatan lebih ditunjukkan untuk menumbuhkan daya cipta para seniman, memelihara kearifan lokal dalam peradaban, harkat dan martabat manusia, memperkuat jati diri daerah dan kepribadian masyarakat, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni masyarakat memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan seni budaya serta memberikan inspirasi dan gairah membangun.

A.9.
*Tantangan
Budaya*

Tantangan lainnya terkait dengan meningkatkan nilai moral, budaya dan agama sebagai akibat dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan akses dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi. Kondisi ini perlu disertai dengan penciptaan iklim yang kondusif dan penyediaan sarana, dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas aparat pemerintah melalui pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Di bidang keagamaan, tantangan ke depan lebih dihadapkan pada bagaimana terus menjaga dan memelihara serta meningkatkan kehidupan beragama di Sumatera Selatan agar tetap harmonis dan kian kondusif. Selain itu, ke depan perlu diupayakan terdapatnya secara lebih lengkap segala hal yang terkait dengan potensi, fasilitas dan sarana prasarana, kegiatan, dan permasalahan keagamaan.

A.10.
*Tantangan
Agama*

Untuk menjamin adanya peran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang dan adanya kesetaraan gender serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka tantangan ke depan menciptakan perangkat hukum yang mampu mengakomodir kepentingan perempuan dan anak yang tidak bias gender, tidak diskriminatif, dan peduli terhadap anak.

A.11.
*Tantangan
Perempuan
dan Anak*

B. Ekonomi

Dalam 20 tahun ke depan, tantangan di bidang keuangan daerah terletak pada peningkatan penerimaan daerah di Sumatera Selatan yang lebih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan (Pendapatan Daerah) PATDA memerlukan perluasan (ekstensifikasi) dan peragaman (diversifikasi) sumber yang sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah serta tidak bertentangan dengan hukum.

B.1. Tantangan Pendapatan Daerah

Tantangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam 20 tahun ke depan terletak pada penciptaan peluang berkembangnya sektor-sektor unyang mempunyai keterkaitan input besar dalam memberikan efek mendorong pertumbuhan sektor lain, terutama sektor-sektor ggulan dan sektor-sektor yang terkait dengan jasa. Selain itu diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang terus mengalami peningkatan dengan ditunjang oleh investasi yang juga terus meningkat.

B.2. Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Sumatera Selatan, tantangan dalam penciptaan kesempatan kerja ke depan adalah bagaimana membangun proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendorong eksternalitas kegiatan ekonomi yang signifikan sehingga akan menyerap tenaga kerja baik dalam proyek infrastruktur sendiri maupun sektor lain yang terkait. Untuk mengatasi pengangguran di perkotaan maka perlu diciptakan dan disediakan sektor produktif di perkotaan yang mampu menampung pencari kerja.

B.3. Tantangan Kesempatan Kerja

Dalam hal distribusi pendapatan masyarakat Sumatera Selatan, maka tantangan ke depan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sekaligus diikuti dengan pemerataan pendapatan melalui peningkatan output dan produktifitas sektor pertanian, tingginya pertumbuhan ekspor manufaktur, turunnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penyediaan barang modal yang ditopang tabungan domestik, tingginya inisiatif penduduk dan SDM (kewirausahaan), dan tingginya produktivitas di segala sektor.

B.4. Tantangan Distribusi Pendapatan

Meskipun kecenderungan pendapatan per kapita di Sumatera Selatan relatif tinggi, namun tantangan 20 tahun ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai sektor secara merata melalui upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan investasi dibidang infrastruktur. Bersama dengan itu, sektor pertanian dan industri perlu didorong maju agar dapat menaikkan pertumbuhan dan pendapatan, karena mampu menciptakan nilai tambah yang sangat tinggi.

B.5. Tantangan Pendapatan Per Kapita

Di bidang industri dan perdagangan, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor-impor Provinsi Sumatera Selatan. Artinya laju perdagangan akan diupayakan terus meningkat melalui komoditas ekspor Sumatera Selatan yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi, sementara impor diusahakan bisa menurun.

*B.6.
Tantangan
Industri dan
Perdagangan*

Bagi UKM di Sumatera Selatan, upaya meningkatkan produktivitas UKM untuk mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan pendapatan, dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional menjadi tantangan 20 tahun ke depan. Selain itu, lambatnya perkembangan industri hulu kearah industri hilir, belum efisiennya kegiatan produksi, belum dimilikinya kawasan industri dan lahan peruntukan industri, pergudangan dan kawasan berikat yang sesuai tata ruang, belum efektifnya skim permodalan bantuan pembiayaan, masih rendahnya kemampuan SDM dan aparatur dan pelaku usaha, pembinaan industri yang masih bersifat parsial, terbatasnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana perdagangan yang telah dibangun, terbatasnya kemampuan sarana transportasi dalam pendistribusian hasil, masih terbatasnya kemampuan pengusaha dalam melakukan terobosan dan perluasan pasar, dan terbatasnya informasi permintaan pasar, serta masih terpusatnya pengaturan tata niaga impor barang kebutuhan pokok sehingga menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

Luasnya akses koperasi dan UKM serta sektor informal terhadap sumber daya produktif dengan sumberdaya manusia yang berkualitas juga menjadi tantangan yang perlu dijawab. Kelembagaan dan organisasi koperasi di Sumatera Selatan juga memerlukan pembenahan kualitasnya. Dan agar dapat berkelanjutan maka iklim usaha Koperasi dan UKM perlu dikondisikan menjadi kondusif. Selain itu, sektor informal harus dilihat sebagai suatu potensi dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin kota yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

*B.7.
Tantangan
Koperasi dan
UKM*

Tantangan utama dalam bidang investasi di Sumatera Selatan memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peluang inverstasi infrastruktur. Investasi di Sumatera Selatan yang sudah cukup kondusif, perlu dipertahankan dan diupayakan agar selalu dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

*B.8.
Tantangan
Investasi*

Bidang pertanian di Sumatera Selatan menghadapi tantangan mendorong komoditi unggulan dan menaikkan produktifitas tanaman pokok yang masih di bawah rata-rata nasional melalui ketersediaan dan pemakaian sarana produksi dan teknologi pertanian di tingkat petani, dan menjaga harga produk yang tidak terlalu tergantung pada pasar melalui kualitas hasil yang baik, akses pasar yang lancar dan persaingan dari pihak lain yang sehat.

Komoditi yang dihasilkan diupayakan dapat tersedia dan terpenuhi setiap saat diminta dan bisa dihasilkan dalam bentuk produk olahan yang mempunyai nilai lebih. Untuk itu diperlukan adanya keterkaitan (*connecting*) antara produk primer dengan industri yang mengolahnya (*agroindustry*). Tantangan lain terkait dengan peningkatan produktivitas melalui teknologi mesin dan ketersediaan penyuluh.

Untuk ketahanan pangan Sumatera Selatan, tantangan ke depan terletak pada perlindungan produk pangan, kelembagaan pangan, peningkatan keragaman konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan, kesamaan pemahaman tentang ketahanan pangan, dan ketersediaan data aspek ketahanan pangan. Selain itu mutu dan keamanan pangan perlu terjamin disamping meningkatkan daya beli dan kemudahan untuk mengakses pangan.

Persoalan masih rendahnya penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan oleh para peternak, relatif mahalny harga pakan buatan pabrik, dan optimalnya produksi pakan ternak alternatif berbasis sumberdaya lokal, menjadi tantangan ke depan bagi peternakan di Sumatera Selatan. Tantangan lainnya adalah perlunya penyediaan dan kepastian lahan serta keamanan, manajemen budidaya ternak yang modern, prasarana dan sarana budidaya, pemotongan dan pengolahan hasil ternak yang sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan, dan tersedianya tenaga ahli dan tenaga lapang yang terampil pada bidang inseminasi buatan, serta pengembangan sentra pembibitan ternak.

Bagi bidang perkebunan, tantangan 20 tahun ke depan di Sumatera Selatan mencakup peningkatan produktifitas komoditi utama perkebunan dengan cara penyediaan bibit unggul yang memenuhi kebutuhan dan penggunaan teknologi yang modern dalam budidayanya. Untuk para petani pekebun, kemudahan memperoleh dana untuk investasi awal, peremajaan dan pemeliharaan kebun menjadi sesuatu yang perlu dicarikan solusinya.

B.9. *Tantangan Pertanian*

B.10. *Tantangan Peternakan*

B.11. *Tantangan Perkebunan*

Pada sisi lain, tantangan bidang perkebunan yang perlu dijawab adalah bagaimana mengatasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) cukup besar dan kerugian yang terjadi di tingkat pasca panen yang berdampak pada turunnya mutu produk hasil sehingga nilai jual produk menjadi rendah. Demikian pula halnya dengan penambahan pabrik pengolahan komoditi perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar pada sumber-sumber bahan bakunya.

Pada masa mendatang, persoalan mengatasi sebagian kawasan hutan yang tidak lagi berhutan lagi, meningkatkan kemampuan rehabilitasi, menuntaskan pemantapan kawasan hutan, dan menyelesaikan penunjukkan kawasan hutan dan perairan, menjadi tantangan terberat bagi bidang kehutanan di Sumatera Selatan.

Persoalan lain yang menyertainya adalah pengelolaan hutan juga masih cenderung berorientasi ekonomi, kualitas SDM aparat dan masyarakat yang belum memadai, aksesibilitas ke wilayah hutan yang relatif masih sulit, masih adanya konflik sosial di dalam dan di sekitar hutan, dan belum memadai dan belum meratanya penguasaan IPTEK di bidang kehutanan, serta masih belum mendukungnya sistem dan aturan pendanaan untuk investasi sektor kehutanan.

Tantangan kehutanan yang antisipatif meliputi masalah masih lemahnya penegakan hukum, makin meningkatnya gangguan alam seperti kekeringan dan perubahan iklim, masih berlangsungnya perambahan dan penebangan liar, masih sering terjadinya kebakaran hutan setiap tahun.

Dalam bidang kelautan dan perikanan, tantangan ke depan yang perlu dijawab adalah belum memasyarakatnya usaha perikanan melalui kegiatan budidaya, kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka pembangunan perikanan, belum adanya rencana induk yang terpadu dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta masih terbatasnya SDM bidang kelautan dan perikanan, masih terbatasnya benih/benur dan pakan dalam usaha budidaya, dan masih rendahnya mutu ikan dan produk olahan hasil perikanan.

Tantangan lainnya dalam bidang kelautan dan perikanan adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk Suaka Perikanan dan Perairan Umum, meningkatkan kualitas wilayah pesisir, dan mencegah penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang.

B.12. Tantangan Kebutanan

B.13. Tantangan Kelautan dan Perikanan

Dengan potensi sumberdaya pertambangan yang sangat besar, tantangannya bagi Sumatera Selatan untuk batubara adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dan pemasaran batubara yang berkualitas rendah, peningkatan kapasitas dan infrastruktur pengangkutan untuk menaikkan produksi, dan upaya diversifikasi batubara pada tahapan komersial.

*B.14.
Tantangan
Pertambangan*

Untuk memacu pemanfaatan gas bumi Sumatera Selatan lebih dari setengah dari gas alam yang diproduksi, tantangannya selain terletak pada upaya peningkatan produksi juga pada upaya menjamin keberlanjutan pasokan gas alam secara kontinyu, penyediaan dan peningkatan infrastruktur gas alam termasuk hingga ke tingkat rumah tangga, pengalihan dari bahan bakar lain yang digunakan moda transportasi ke penggunaan gas alam, dan peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan gas alam.

Ke depan, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga air dan energi surya akan menjadi primadona yang akan mampu bersaing dengan sumber energi lainnya. Oleh karena itu, tantangannya di Sumatera Selatan adalah pengembangan dan penggunaan teknologi energi terbarukan yang layak secara ekonomis sehingga dapat digunakan secara massal.

Untuk menjamin lebih dari setengah penduduk Sumatera Selatan dapat menikmati energi listrik, tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif termasuk insentif agar investor mau berkiprah di bidang ketenagalistrikan, terutama untuk desa-desa yang terpencil.

Dengan besarnya potensi pariwisata Sumatera Selatan, maka tantangannya ke depan adalah bagaimana menjadikan bidang pariwisata ini sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah Sumatera Selatan. Untuk itu, ketersediaan sarana dasar pada objek wisata, promosi yang efektif, dan ketersediaan sumberdaya manusia pada industri pariwisata menjadi sangat strategis.

*B.1.
Tantangan
Pariwisata*

C. Sarana dan Prasarana

Untuk transportasi darat, tantangannya terletak pada penyediaan sarana jalan yang secara kapasitas mampu mengimbangi jumlah kendaraan, peningkatan daya dukung jembatan, perbaikan/pemeliharaan/penggantian jalan dan jembatan yang rusak atau sudah melewati umurnya, optimalisasi penggunaan sarana jalan, mengoptimalkan sistem manajemen lalu lintas, penegakan hukum berlalu lintas di jalan dan penindakan

*C.1.
Tantangan
Transportasi
Darat*

pelanggaran kelebihan muatan, peningkatan disiplin pengguna jalan, peningkatan kelaikan kendaraan, penyediaan fasilitas rambu keselamatan yang memadai.

Dalam hal angkutan kereta api, ke depan diperlukan upaya menyambung jalur-jalur yang selama ini masih terpisah menjadi terkoneksi, baik di dalam wilayah Sumatera Selatan maupun dengan provinsi yang berbatasan. Selain itu, perlu diremajakan dan diganti rel-rel yang sudah tidak ekonomis dan tua agar menjamin keamanan dan kenyamanan.

Tantangan untuk angkutan sungai ke depan adalah pada terjangkaunya pelayanan angkutan terutama untuk bagian timur Sumatera, tercukupinya kapasitas angkut kapal yang di sebabkan oleh keterbatasan kapal yang beroperasi, tersedianya armada kapal angkut terutama dalam mengangkut barang hasil tambang.

Untuk meningkatkan transportasi hasil-hasil produksi dan angkutan orang, serta mengembangkan pembangunan regional, maka tantangan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan dan pengembangan pelabuhan samudera Tanjung Api-api perlu direalisasikan. Diperlukannya pelabuhan yang mampu disandari oleh kapal-kapal bertonase besar untuk mendistribusikan barang dan hasil alam di Sumatera Selatan karena bisa lebih efisien daripada mengandalkan transportasi darat.

Untuk transportasi udara, selain meningkatkan kapasitas pelayanan bandara udara Sultan Mahmud Badarudin II, ke depan menjadi tantangan untuk meningkatkan pelayanan pergerakan lokal yang potensial pada kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan.

Bagi bandar udara, tantangan ke depan adalah dalam kerangka menjamin keselamatan penerbangan terutama dengan pengendalian pertumbuhan pemukiman dan bangunan lainnya di sekitar kawasan lapangan terbang.

Pada 20 tahun mendatang tantangan dalam bidang perumahan dan permukiman akan terkait dengan penyediaan kebutuhan akan rumah dan penyediaan sarana dan prasarana dasar oleh pemerintah Sumatera Selatan terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni masyarakat berpendapatan rendah. Tantangan lainnya adalah mengendalikan kawasan kumuh yang tumbuh dan tidak sesuai dengan struktur dan infrastruktur kota dan mengoptimalkan kinerja lembaga penyelenggaraan pembangunan perumahan.

*C.2.
Tantangan
Transportasi
Laut dan
Sungai*

*C.3.
Tantangan
Transportasi
Udara*

*C.4.
Tantangan
Permukiman
dan
Perumahan*

Dalam kerangka memenuhi salah satu sasaran program *Millenium Development Goals* (MDG's) dalam bidang air bersih, tantangannya adalah pengurangan lebih dari separuh dari jumlah masyarakat Sumatera Selatan yang belum mendapat pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai melalui peningkatan pelayanan dan cakupan pelayanan, menekan tingkat kehilangan air, menyeimbangkan kapasitas produksi dari instalasi pengolahan air dengan sistem jaringan distribusi yang ada, dan mengkondisikan peralatan yang memenuhi standar dan layak.

C.5.
*Tantangan
Air Bersih*

Untuk drainase yang ada di Sumatera Selatan, tantangannya berupa penciptaan sistem drainase yang tertata dengan baik agar tidak menimbulkan genangan air. Untuk itu pencegahan agar sampah dan sedimentasi tidak menghambat dan mengganggu fungsi saluran drainase menjadi penting.

C.6.
*Tantangan
Drainase*

Tantangan dalam bidang persampahan di Sumatera Selatan menyangkut pemenuhan fasilitas pembuangan sampah di beberapa kawasan yang ramai, pembiasaan budaya membuang sampah, penerapan peraturan secara tegas, dan penanganan tempat pembuangan akhir sampah yang ramah lingkungan.

C.7.
*Tantangan
Transportasi
Darat*

Bidang pengairan di Sumatera Selatan akan menghadapi tantangan berupa pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan operasi, pemeliharaan, kelengkapan prasarana, dan kelembagaan jaringan rawa pasang surut dan rawa lebak, serta penyediaan jaringan irigasi dan drainase di daerah tadah hujan.

C.8.
*Tantangan
Sumberdaya
Air*

Kebutuhan daya listrik di Sumbagsel ke depan ditantang untuk dapat terus menambah daya listriknya dengan rata-rata 7,6 persen per tahun. Pertambahan daya ini selain untuk mengantisipasi pertumbuhan pelanggan listrik rumah tangga terutama bagi desa yang belum terlayani, diharapkan juga dapat mengantisipasi kebutuhan pelanggan dari sektor industri.

C.9.
*Tantangan
Kelistrikan*

Tantangan ke depan dalam pemenuhan jaringan utilitas telekomunikasi di Sumatera Selatan terkait dengan peningkatan daerah yang terlayani jaringan telekomunikasi. Selain makin maraknya jaringan telepon seluler, penyediaan jaringan tetap (fix line) harus tetap menjadi prioritas terutama untuk daerah-daerah pusat pertumbuhan baru guna menjamin kelancaran aktivitas industri, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan perumahan di Sumatera Selatan.

C.10.
*Tantangan
Telekomunikasi*

D. Ilmu Pengetahuan

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global yang berbasis teknologi. Untuk itu, dalam kerangka menjadikan Sumatera Selatan unggul dan terdepan, perlu membangun dan menciptakan keterpaduan dalam pengembangan iptek yang melibatkan secara aktif dan intensif para pelaku penelitian dari seluruh elemen (perguruan tinggi, perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat umum) agar dapat mengantisipasi globalisasi dan mengatasi berbagai persoalan dasar dalam masyarakat.

D.1. Tantangan Ilmu Pengetahuan

E. Keamanan dan Ketertiban

Bagi Sumatera Selatan, tantangan keamanan dan ketertiban ke depan akan banyak terkait dengan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba terutama oleh generasi muda. Baik yang ada di perkotaan maupun yang sudah merambah hingga ke perdesaan.

E.1. Tantangan Keamanan dan Ketertiban

Upaya lainnya terkait dengan tantangan untuk menjaga agar keragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk tidak menimbulkan kriminalitas di dalam masyarakat sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.

F. Hukum dan Aparatur

Bidang hukum di Sumatera Selatan akan menghadapi tantangan berupa penegakan supremasi hukum yang memenuhi rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama terhadap masyarakat kecil dan kurang mampu, peningkatan kesadaran hukum bagi aparat dan masyarakat, dan sinkronisasi peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

F.1. Tantangan Hukum dan Aparatur

Tantangan lainnya dalam bidang hukum dan aparatur terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) agar mampu memengaruhi perilaku setiap anggota masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan meningkatkan perhatian terhadap tindak kekerasan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan berusaha.

G. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Tantangan utama bagi pengembangan wilayah dan tata ruang adalah pengatasan kesenjangan antara wilayah timur dengan wilayah barat Sumatera Selatan, antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, dan pengutamakan pembangunan di wilayah-wilayah potensial, strategis, dan cepat tumbuh, keterkaitan dan integrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya yang masih tertinggal.

Pemerintah Sumatera Selatan ditantang untuk dapat mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan, menyediakan pelayanan sarana dan prasarana permukiman perkotaan, meningkatkan sistem pengendalian pemanfaatan ruang, dan mewujudkan kelembagaan penataan ruang dan pertanahan yang efektif dan efisien.

Tantangan lain dalam penataan ruang adalah upaya pengimbangan dan antisipasi pertumbuhan pemanfaatan ruang yang dinamis, tersosialisasinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Selatan, berfungsinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota, adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar RTRW, dan pengembangan data base ruang (spasial) yang detil dan lengkap serta akurat.

Pusat-pusat pengembangan wilayah, Kawasan Andalan, dan Kawasan Prioritas perlu difungsikan sesuai dengan peruntukan ruang dan kondisi potensialnya agar dapat memperlancar pergerakan manusia dan barang yang akan menggerakkan pertumbuhan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruangnya, maka tantangan bagi kawasan hutan yang berfungsi lindung di Sumatera Selatan adalah upaya mengendalikan pelanggaran fungsi kawasan sesuai peruntukannya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada kawasan hutan yang arahkan untuk budidaya, maka diperlukan optimalisasi potensi sumberdaya yang ada dalam ruang tersebut agar dapat memberikan nilai lebih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

G.1. Tantangan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

H. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam hal sumberdaya alam dan lingkungan hidup, tantangan terbesar dalam 20 tahun ke depan terkait dengan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan berdampak besar bagi semua kehidupan di bumi. Sumberdaya hutan perlu dijaga perannya tidak hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga secara ekologi dan sosial. Untuk itu peran hasil hutan dan jasa lingkungan yang ternyata jauh lebih besar dibandingkan komoditi kayunya memerlukan penciptaan sistem pemanfaatan fungsi hutan yang memberikan hasil maksimal dengan tetap menjamin kelestarian dan keberlanjutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial serta tetap terjaganya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup.

Penegakan hukum bagi para pelaku pencemar dan perusak lingkungan, perusakan hutan, pertambangan tanpa ijin / liar (PETI) dan pembuangan limbah industri berbahaya, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam, serta melengkapi pengawasan dengan sarana dan prasarana yang mendukung, juga menjadi tantangan dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

H.1. Tantangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

II.3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah Sumatera Selatan adalah seluruh sumber kekuatan di Sumatera Selatan baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara nyata maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Sumatera Selatan dalam kerangka menjadi bagian integral dari pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan kedudukan geografis dan kondisi geopolitikan yang sangat terkendali, maka wilayah pembangunan di provinsi ini sangat layak untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tumpuan strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Provinsi Sumatera Selatan seluas 8.701.742 ha mempunyai potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dan tersedia peluang untuk investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Angka ICOR yang semakin rendah juga menandakan efisiensi perekonomian yang semakin baik, sementara peningkatan

Modal Geografis dan Geopolitikan

Modal Ekonomi

investasi agregat masih dapat terus digalakkan. Surplus neraca perdagangan Sumsel yang konsisten juga merupakan suatu modal pembangunan masa depan yang baik. Keuangan daerah telah memperlihatkan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Selatan mencapai suatu angka yang cukup besar di kawasan barat Indonesia. Struktur perekonomian Sumsel yang bercorak primer didukung pula oleh termasuknya sektor-sektor primer ini ke dalam sektor unggulan bila dibandingkan secara relatif terhadap kondisi nasional. Pendapatan per kapita yang relatif tinggi menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum yang relatif baik.

Adanya gagasan ekonomi menyangkut kelima Provinsi di Pulau Sumater yaitu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Belajasumba) merupakan salah satu faktor strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian semua provinsi termasuk Sumatera Selatan sebagai motor penggeraknya. Dalam kaca mata ekonomi gagasan ini dapat menghasilkan eksternalitas ekonomis kepada setiap provinsi untuk mencapai skala ekonomis pembangunan.

Penduduk Sumatera Selatan tumbuh dengan percepatan yang semakin rendah. Perkembangan jumlah penduduk ini merupakan potensi pembangunan bila kualitas sumberdaya manusia yang ada betul-betul dapat menjadi kapital dalam pembangunan.

*Modal
Sumberdaya
Manusia*

Keberagaman budaya dan etnis yang ada, hidup dan berkembang di Sumatera Selatan yang selama ini hidup harmonis dan kondusif menjadi tambahan modal bagi percepatan dan kelancaran pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu adanya kekayaan budaya Sumatera Selatan seperti kelembagaan lokal, sistem nilai, norma dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada jatidiri budaya lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal, akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi, tanpa harus tercabut dari akar budaya Sumatera Selatan.

*Modal
Budaya*

Kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati menjadi salah satu modal pembangunan penting bagi Sumatera Selatan. Di bidang pertanian, potensi komoditas pertanian tanaman pangan khususnya padi. Ketersediaan komoditi pangan terutama

*Modal
Sumberdaya
Alam*

beras sebagai bahan makan pokok bagi masyarakat tersedia bahkan melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks nasional, Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung padi nasional untuk memenuhi kebutuhan beras terutama di wilayah Sumatera. Selain itu terdapat lahan penghasil komoditi palawija dan hortikultura yang cukup menguntungkan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Dalam bidang perkebunan, potensi Sumatera Selatan berupa areal eksisting yang luas, produksi dalam bentuk produk primer dan olahan yang terus meningkat, maupun potensi areal untuk pengembangan lebih lanjut. Selain kawasan yang telah dimanfaatkan tersebut, masih terdapat kawasan budidaya yang diperuntukan untuk pengembangan perkebunan berikutnya.

Kawasan hutan di Sumatera Selatan seluas 43% dari luas wilayah, cukup potensial untuk dikelola sumberdayanya sebagai penghasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu serta manfaat jasa lingkungan lainnya. Pembangunan hutan tanaman dan kegiatan rehabilitasi pada sebagian arealnya dapat pula dikembangkan budidaya tanaman pangan. Peningkatan potensi hutan akan mendorong tumbuhnya industri hasil hutan, termasuk industri hilmnya. Selain itu di beberapa kawasan hutan konservasi yang memiliki keunikan alam dan ekosistemnya berpotensi untuk pengembangan ekowisata.

Potensi populasi ternak dan produksinya yang terdapat di Sumatera Selatan terus meningkat dengan telah menggunakan teknologi modern dalam usaha pembibitan ternak. Sementara potensi perikanan budidaya masih sangat besar.

Potensi bahan tambang dijumpai tersebar di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Di dalam bumi Sumatera Selatan terdapat kandungan Energi dan Mineral seperti batu bara (40,70% dari cadangan nasional), Minyak bumi (10,00% dari cadangan nasional), Gas bumi (9,02% dari cadangan nasional), Panas Bumi (5,02% dari cadangan nasional), dan Gas Metan (minimal 2 triliyun kaki lebih). Ketersediaan potensi sumber energi primer dan sumberdaya mineral di Sumatera Selatan merupakan potensi daerah yang perlu dikembangkan secara optimal menuju Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional. Tentu saja modal ini akan sangat menguntungkan bagi daerah dan dapat pula dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan energi nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan dengan berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu wujud reformasi, telah membawa perubahan mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan yang terjadi selama ini di Sumatera Selatan telah berdampak positif dan kondusif. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu modal dasar pembangunan.

*Modal
Otonomi
Daerah*

Bab 3

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

*Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah*



Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

3.1. VISI

Visi sebagai refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Dengan visi maka semua kemampuan dan potensi yang dimiliki akan dioptimalkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Bahkan lebih dari itu, sebagai konsekuensinya seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan dalam dua puluh tahun mendatang, baik oleh pemerintah, maupun swasta dan masyarakat harus disinergikan untuk mencapai visi daerah.

Perumusan visi daerah merupakan kristalisasi dari keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan daerah sekaligus menjadi amanah yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan, program dan kegiatan daerah. Visi daerah selain memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, juga mampu menjadi perekat seluruh komponen pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah.

Berdasarkan kondisi Provinsi Sumatera Selatan saat ini dan dengan melihat tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan, maka visi Provinsi Sumatera Selatan untuk dua puluh tahun mendatang (2025) akan ditopang lima pilar utama sebagai berikut:

- **Pertama**, *Sumatera Selatan sebagai provinsi termaju.*
- **Kedua**, *Sumatera Selatan sebagai provinsi yang unggul dan kompetitif dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan,*
- **Ketiga**, *Masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera dan maju.*
- **Keempat**, *Pembangunan Sumatera Selatan berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.*
- **Kelima**, *Keempat pilar utama tersebut di atas akan dilingkup dalam kesatuan tata pemerintahan yang baik (good governance).*

Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan juga terkenal sebagai masyarakat yang memiliki akar sosial budaya yang sangat kuat, kokoh tertanam sejak berabad-abad yang lalu, sehingga pada saat menyongsong arah pembangunan ke depan, Provinsi Sumatera Selatan diyakini memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi

pertumbuhan daerah Sumatera Selatan secara regional dan tumbuh sebagai salah satu Provinsi yang terunggul dan sekaligus serta mampu memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi pertumbuhan secara nasional.

Seluruh potensi sosial budaya dan dukungan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber daya yang berbasis prinsip keberlanjutan harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan dan kualitas masyarakat Sumatera Selatan. Masa depan Sumatera Selatan adalah Provinsi yang maju dan unggul dalam seluruh tatanan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatannya. Untuk itu, visi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah:

“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi.

Sumatera Selatan. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.

Unggul. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

Terdepan. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh kelompok pemangku kepentingan di Sumatera Selatan dalam masa duapuluh tahun mendatang. Misi merupakan tonggak dari perencanaan daerah dalam mewujudkan cita-cita dalam visi yang diinginkan. Adapun misi Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

3.2. MISI

1. Menjadikan Sumatera Selatan sebagai sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional

Melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang didukung oleh percepatan bidang informasi dan teknologi, Sumatera Selatan akan menjadi motor penggerak perekonomian regional dalam upaya menjadi provinsi termaju baik secara regional maupun nasional. Adanya *outlet* di Sumatera Selatan, perdagangan dari dan ke dalam kawasan ini akan memberikan nilai tambah yang besar kepada perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Sektor-sektor yang akan memanfaatkan eksternalitas dari adanya pola pergerakan barang dan jasa yang tercipta adalah sektor jasa itu sendiri, termasuk di dalamnya sektor pariwisata, serta sektor keuangan dan perbankan. Dengan dukungan akses sarana transportasi dan komunikasi yang memadai diharapkan para pelaku usaha di sektor jasa ini dapat terus berkembang.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, untuk itu pemanfaatan sumber daya alam untuk

kepentingan penyediaan energi dan menjamin ketahanan pangan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungannya untuk generasi yang akan datang. Untuk itu pemanfaatan sumber daya tersebut baik pada pemanfaatan potensi batubara, gas alam, panas bumi, dan energi lainnya baik yang baru maupun yang terbarukan harus diarahkan guna menjamin ketersediaan suplai energi baik untuk kebutuhan sekarang maupun dimasa mendatang. Disamping itu Sumatera Selatan yang selama ini merupakan kontributor kebutuhan pangan nasional, produktivitasnya perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan produktivitas pertanian ini akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berkualitas

Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, serta bidang lainnya seperti: penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, pemukiman dan perumahan, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, kependudukan dan keluarga berencana, agama, kesenian dan kebudayaan serta termasuk bidang perempuan dan anak serta pemuda dan olah raga dan ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan

Pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan dalam dua puluh tahun mendatang masih akan memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian kemajuan dan pemerataan pembangunan yang dicita-citakan masyarakat. Dengan demikian penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui perwujudan sistem pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab dengan didukung oleh penegakan hukum yang kuat harus menjadi komitmen bersama. Dalam konsep penguatan kapasitas manajemen pemerintahan ini juga harus diimbangi dengan penguatan partisipasi publik, melalui pendidikan politik lokal yang baik dan penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam seluruh tatanan pengelolaan pemerintahan.

Bab 4

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

*Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah*



Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

BAB IV.

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025



Arah pembangunan daerah merupakan strategi pencapaian visi dan misi daerah yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang. Arah pembangunan ini akan dirumuskan dalam arah pembangunan daerah berikut indikasi sasarannya.

Dari visi serta misi daerah, maka selanjutnya dirumuskan ***empat arah pembangunan daerah***, yang terdiri dari :

- 1. Agenda pemantapan pertumbuhan ekonomi dan penegasan arah pembangunan ekonomi.**
- 2. Agenda peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.**
- 3. Agenda pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.**
- 4. Agenda pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab.**

Terwujudnya Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan Tahun 2025, yang telah menjadi komitmen bersama semua unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, mensyaratkan adanya komitmen yang kuat antara seluruh kelompok pembangunan, baik itu pemerintah daerah, DPRD, kelompok dunia usaha dan seluruh masyarakat terhadap pengembangan ekonomi lokal yang berlandaskan pada pertumbuhan dan sekaligus juga pemerataan, ditopang oleh peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketahanan pangan dan perumahan dan kesejahteraan sosial lainnya yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai.

Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan yang mengacu pada arah pembangunan dengan dilandasi strategi pertumbuhan, pemerataan, keserasian, keseimbangan, dan interkoneksi, serta dinamis. Berdasarkan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui penetapan Arah Pembangunan seperti tertuang di bawah ini.

Strategi bidang pengembangan ekonomi yang dapat dijadikan salah satu landasan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dilakukan dengan “Agenda Pemantapan dan Penegasan Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan”. Strategi bidang ekonomi ini diberi nama demikian mengingat kondisi eksisting perekonomian Sumatera Selatan saat ini telah menunjukkan kinerja yang baik yang telah sejalan dengan upaya Sumatera Selatan yang ingin menjadi sebagai lumbung pangan dan lumbung energi nasional.

4.1.
*Agenda
 Pemantapan
 Pertumbuhan
 Ekonomi
 Dan Penegasan Arah
 Pembangunan
 Ekonomi*

Paling tidak terdapat 7 sasaran yang akan dicapai dalam upaya memantapkan dan menegaskan arah pembangunan ekonomi yang diinginkan. Ketujuh sasaran tersebut adalah (i) Pertumbuhan Ekonomi, (ii) Struktur Ekonomi, (iii) Pemantapan Sektor Unggulan Provinsi, (iv) Pemantapan Surplus Neraca Perdagangan Daerah, (v) Penurunan angka pengangguran, (vi) Kesenjangan Pendapatan, dan (vii) Kualitas sumberdaya manusia. Indikasi yang diharapkan muncul untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Minimal 6,5 % per tahun

Indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah adanya pertumbuhan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adanya pertumbuhan ekonomi berarti tumbuhnya sektor-sektor ekonomi secara agregat yang menggambarkan perguliran roda perekonomian daerah.

Penetapan angka 6,5% mengingat kondisi eksisting pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2004 yang telah melampaui angka 6% (dilihat dari pertumbuhan PDRB Riil tanpa migas) disamping dari angka 6,5% yang diprediksi sebagai target pertumbuhan yang dapat membuka lapangan kerja untuk juga dapat mengurangi angka pengangguran.

Target 6,5% ini diperhitungkan sebagai angka yang cukup moderat dan realistis walaupun tetap menggambarkan semangat peningkatan kinerja perekonomian di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang ditetapkan sekitar 6%.

Indikasi lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ini adalah tingkat investasi sesuai dengan *incremental capital to output ratio* (ICOR) yang saat ini berlaku di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Struktur Ekonomi Primer (Pertanian dan Pertambangan Penggalian) yang didukung oleh sektor Manufaktur dan sektor Jasa

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang ditargetkan harus pula didukung oleh pertumbuhan nilai tambah sektor primer yang sejalan dengan visi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pertumbuhan tersebut juga harus didukung dengan pertumbuhan sektor manufaktur dan sektor jasa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga sektor ini diharapkan tumbuh dengan memperhatikan keterkaitan (*linkage*) diantara keduanya.

3. Pemantapan Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Selatan

Beberapa sektor (dan sub sektor) pertanian dan penggalian dan pertambangan di Sumatera Selatan ternyata bukan hanya dominan dibandingkan dengan sektor lainnya melainkan juga lebih unggul secara relatif dibandingkan dengan kondisi nasional. Kondisi ini harus terus dipertahankan dengan memberikan alokasi APBD yang proporsional terhadap sektor-sektor tersebut serta upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor tersebut.

Ada dua sektor (dan sub sektor) yang tidak terkait langsung dengan peran Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi, yakni sektor pariwisata dan sub sektor jasa perbankan. Sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian yang proporsional karena sektor ini menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan dan juga sebagai sektor yang dapat menghasilkan devisa. Sub sektor jasa perbankan juga perlu mendapatkan perhatian yang proporsional karena sektor ini memainkan peran yang cukup penting sebagai mediator antara masyarakat penghimpun dana, dengan investor yang perannya dibutuhkan dalam proses pembangunan.

4. Pemantapan Surplus Neraca Perdagangan Daerah

Surplus neraca perdagangan daerah telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan dan diharapkan akan terus terjadi dalam perkembangan ekonomi Sumatera Selatan kedepan. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan pola investasi daerah dan kecenderungan kenaikan ekspor yang lebih besar daripada kecenderungan kenaikan impor Sumatera Selatan.

5. Penurunan Angka Pengangguran

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah Sumatera Selatan seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya adalah upaya menurunkan angka pengangguran (terutama pengangguran terbuka, juga pengangguran terselubung). Upaya membuka lapangan kerja perlu diperhatikan dengan juga memperhatikan pola investasi yang berkembang yang sedapat mungkin memberikan kesempatan bagi sektor-sektor yang banyak menyerap lapangan kerja.

6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan

Selain dari angka pengangguran, angka kemiskinan semakin mendapat perhatian yang serius karena juga memberikan gambaran sebaik apa kinerja perekonomian suatu daerah. Penurunan angka kemiskinan ini harus mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

Selain itu angka kemiskinan relatif yang muncul dalam ukuran kesenjangan pendapatan juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Walaupun target pertumbuhan ekonomi dapat dilampaui, maka pertanyaan lanjutannya adalah seberapa besar kue pembangunan itu dapat dinikmati oleh mereka yang berpendapatan rendah. Indikasi dari sasaran ini adalah membaiknya Indeks Gini yang dapat dicapai pula dengan memberikan perhatian yang lebih kepada perkembangan usaha kecil menengah dan Koperasi (UKMK) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

7. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

Tujuan akhir dari suatu pembangunan ekonomi adalah membaiknya kualitas manusia yang ada di daerah tersebut. Sejalan dengan indikator yang digunakan oleh banyak negara (dan juga nasional) adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dengan demikian sasaran ini dapat dicapai dengan indikasi semakin membaiknya aksesibilitas masyarakat terutama golongan menengah-bawah terhadap pendidikan, kesehatan serta daya beli.

Tabel 4.1
Agenda Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi dan
Penegasan Arah Pembangunan Ekonomi

No	Sasaran	Indikasi
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah minimal 6,5 % per tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat • Investasi yang meningkat sejalan dengan ICOR
2	Struktur Ekonomi Primer (Pertanian dan Pertambangan Penggalian) yang didukung oleh sektor manufaktur dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tambah Sektor Primer tumbuh dan meningkat • Nilai Tambah Sektor Manufaktur tumbuh dan meningkat • Ada saling keterkaitan (linkage) yang erat antara sektor primer (pertanian), sekunder (industri) dan tersier (jasa)
3	Pemantapan Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi APBD yang proporsional untuk sektor-sektor potensial • Produktivitas Sektor meningkat • Sektor Pariwisata dan Jasa Bank tumbuh dan memberi kontribusi yang signifikan.
4	Pemantapan Surplus Neraca Perdagangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi bertambah • Daya saing meningkat • Efisiensi berjalan dengan baik • Ekspor Daerah cenderung meningkat • Impor Daerah cenderung menurun
5	Penurunan Angka Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja yang bekerja meningkat • Investasi yang tumbuh dapat menyerap banyak tenaga kerja
6	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk Miskin berkurang • Indeks Gini menurun • UKMK berkembang dengan baik
7	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pendidikan meningkat • Indeks Kesehatan meningkat • Indeks Daya Beli meningkat

Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan akses pemerataan dan mutu pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung lahan dan lingkungan. Perhatian terbesar akan diberikan kepada kelompok masyarakat miskin.

1. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan

Pembangunan pendidikan diarahkan pada dukungan kebijakan dan bantuan untuk peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memberi perhatian besar pada pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kesetaraan gender dan kemudahan akses pendidikan terutama kelompok masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan dan pedesaan.

Upaya yang dilakukan melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu dan tepat lokasi, pengembangan kurikulum, bahan pelajaran dan model pembelajaran yang lebih mengacu pada standar nasional dan internasional sesuai dengan perkembangan iptek, budaya dan seni. Selain itu peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan serta pengembangan manajemen pelayanan pendidikan.

2. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada mempercepat proses difusi dan pemanfaatan iptek bagi peningkatan produktifitas dunia usaha dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, unggulan dan strategis serta menumbuhkembangkan mekanisme intermeditasi peningkatan kemudahan akses terhadap fasilitas penyediaan iptek. Prioritas dukungan kebijakan dan bantuan diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dasar dalam bentuk pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih fokus di bidang pangan, energi dan manufaktur. Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing dan

kemandirian dunia usaha, prioritas pembangunan iptek diarahkan pada upaya penciptaan iklim inovasi dalam bentuk skema intensif bagi terbangunnya penguatan kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan.

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan diarahkan pada dukungan kebijakan dan bantuan untuk upaya peningkatan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan lainnya, termasuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta penduduk di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan. Untuk itu prioritas pembangunan bidang ini diarahkan pada peningkatan lingkungan sehat, upaya kesehatan masyarakat, perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan perbaikan gizi masyarakat, upaya peningkatan tersebut didukung oleh meningkatkan lagi promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, juga peningkatan mutu pemerataan tenaga dan pemberkalan kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan, termasuk system pengembangan informasi kesehatan serta perintisan dan penguatan bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.

4. Permukiman dan Perumahan

Untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan yang layak huni, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, pembangunan permukiman dan perumahan diarahkan pada dukungan kebijakan dan bantuan dalam upaya penyediaan dan pengembangan sumber daya pembiayaan jangka panjang yang berkaitan dengan: pembangunan perumahan dan kepemilikan rumah; pembangunan rumah sederhana sehat; pemberdayaan komunitas pemukiman yang mendorong pembangunan perumahan swadaya; perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; penataan kawasan kumuh; pembangunan kawasan tertinggal; revitalisasi serta peremajaan kawasan tertentu.

5. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat rentan lainnya, melalui dukungan kebijakan serta pemberian bantuan dan jaminan kesehatan sosial serta pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pengembangan system perlindungan sosial yang sifatnya lebih permanen serta mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penduduk miskin dan rentan lainnya.

a). Perempuan dan anak

Pembangunan bidang perempuan dan anak diarahkan pada dukungan kebijakan serta bantuan peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, sedangkan pembangunan anak diprioritaskan pada dukungan kebijakan serta bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk hak-hak anak terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum dan ketenagakerjaan.

b). Agama dan kebudayaan

Pembangunan agama dan kebudayaan diarahkan pada dukungan kebijakan serta bantuan dalam upaya peningkatan sarana dan fasilitas keagamaan dan mendorong semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dalam bidang kebudayaan pembangunan di arahkan pada dukungan kebijakan serta bantuan dalam upaya menumbuhkembangkan kehidupan budaya dan kearifan lokal yang harus tumbuh sejalan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

c). Pemuda dan olah raga

Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan dukungan kebijakan serta bantuan dalam upaya peningkatan kualitas pemuda melalui pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak dan disiplin. Sedangkan pembangunan olahraga diprioritaskan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani dan mental masyarakat, membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

d). Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan dan KB diarahkan pada dukungan kebijakan tertib administrasi kependudukan dan bantuan dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan kualitas pelayanan KB, pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, penyerasian kebijakan kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

6. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan dalam konteks keseimbangan antara hubungan tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah. Perlindungan hak-hak buruh baik yang berada di sektor formal maupun informal serta keseimbangan daya tarik investasi wilayah yang terkait dengan ketenagakerjaan, akan bermuara pada kelembagaan diantara pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan.

Tabel 4. 2
Agenda Peningkatan Kemandirian dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran	Indikasi
1	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Sertifikasi Guru bertambah baik • Rasio Sekolah bertambah baik • Rasio Guru bertambah baik • Angka Melek Huruf (AMH) meningkat • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat • Angka Partisipasi Kasar/ Murni (APK/ AKM) meningkat
2	Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas terhadap IT (Internet) lebih mudah • Jumlah Lembaga Riset meningkat • Publikasi Hasil Kajian meningkat • Implementasi Hasil Riset bertambah banyak
3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kematian Bayi menurun • Angka Kematian Ibu Melahirkan menurun • Rasio Paramedis bertambah baik • Rasio Sarana Kesehatan bertambah baik
4	Permukiman dan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Perumahan Sederhana Sehat bertambah • Kawasan Kumuh berkurang • Prasarana Permukiman (Air Bersih, Drainase) bertambah dan berfungsi baik

5	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Gender bertambah baik • Perlindungan Perdagangan Anak dan Pekerja Anak terjamin dengan baik • Aktivitas Keagamaan berjalan baik dan Sarana Keagamaan bertambah dan baik • Aktivitas Kebudayaan berjalan baik dan Sarana serta Kelembagaan Kebudayaan berfungsi baik • Seni dan budaya lokal tumbuh dan berkembang baik • Rasio Organisasi Pemuda bertambah baik • Kelembagaan Kepemudaan berfungsi • Sarana dan Prestasi Olah Raga meningkat dan berkualitas • Kelembagaan dan jaringan KB berfungsi baik dan bertambah • Akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) lebih mudah • Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial semakin meningkat
6	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • UMR makin tinggi dan lebih baik serta mencukupi kebutuhan hidup • Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Informal terjamin dengan baik • Hubungan Industrial Buruh, Pengusaha dan Pemerintah makin baik dan harmonis • Kelembagaan Buruh berfungsi lebih baik

Dalam melakukan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan maka diarahkan pada pengelolaan energi dan lingkungan hidup yang optimal, benar, dan berkesinambungan, pengembangan tata ruang yang adil dan seimbang, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, pengembangan dan pembangunan jaringan infrastruktur yang merata, dan optimalisasi pertanian dan tanaman pangan.

*4.3.
Agenda
Pembangunan
yang
Berorientasi
pada
Pemanfaatan
Sumberdaya
yang
Berkelanjutan*

1. Pengelolaan Energi dan Lingkungan Hidup

Potensi sumberdaya energi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan sangat besar. Potensi tersebut berupa sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak bumi dan gas bumi, serta sumberdaya energi nonfosil seperti panas bumi, air, dan biomasa. Potensi sumberdaya energi tersebar di Sumatera Selatan antara lain di Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU, Kabupaten OKI, dan Kabupaten Muba.

Sumberdaya energi fosil dan nonfosil dimanfaatkan antara lain untuk bahan bakar industri, transportasi (kendaraan bermotor dan kereta api), rumah tangga dan komersial, serta bahan baku industri. Kegiatan eksplorasi dan produksi (kegiatan hulu) sumberdaya energi fosil dan nonfosil selain memberikan kontribusi terhadap pasokan energi dan nilai tambah daerah ataupun nasional. Akan tetapi, apabila tidak diusahakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan meliputi aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial, ekonomi, budaya, serta kesehatan masyarakat.

Upaya yang dilakukan perlu diarahkan pada optimalisasi pendayagunaan potensi berbagai sumberdaya yang berkelanjutan berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing Sumatera Selatan terhadap pasar regional, nasional, dan internasional. Upaya tersebut dijalankan untuk mencapai kondisi ideal lingkungan di Sumatera Selatan yaitu terpeliharanya keseimbangan dan keserasian, antara upaya memacu pertumbuhan perekonomian dan upaya pelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara produktif berkelanjutan.

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka salah satunya adalah mengangkat potensi energi kelistrikan dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat umum dan masyarakat industri serta untuk menunjang percepatan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Rencana induk pembangunan bidang energi dan Sumber daya mineral Sumatera Selatan pada hakikatnya adalah rencana pengembangan potensi bahan galian secara efisien dan optimal, dengan tetap memperhatikan azas-azas dasar dalam Sumber daya mineral dan energi yaitu:

- Bahwa bahan galian/bahan tambang adalah milik negara
- Bahwa bahan galian adalah salah satu sumberdaya alam yang harus diambil manfaatnya dengan tetap memperhatikan keselarasannya dalam lingkungan hidup
- Bahwa bahan galian harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

Untuk itu, rencana induk pembangunan dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program berikut ini:

1. Mendayagunakan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral, minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, dan air bawah tanah, serta energi yang dihasilkan berkelanjutan.
2. Meningkatkan upaya diversifikasi, intensifikasi, dan konservasi energi dalam rangka penyediaan energi nasional yang optimal dan berkelanjutan.
3. Menerapkan teknologi pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif termasuk tenaga nuklir.

Konsep pengembangan energi dan sumber daya mineral secara praktis akan mencakup bidang perencanaan/penataan, pengelolaan/pengusahaan dan pengawasan. Dengan demikian akan ada satu kebijaksanaan dasar dalam pengembangan Sumber daya mineral dan energi. Selain itu untuk menghindari benturan dari berbagai kepentingan, maka perlu kesepakatan bersama tentang tata ruang Sumatera Selatan, hal ini perlu digaris bawahi karena ketika tata ruang Sumatera Selatan dicanangkan, data di bidang energi dan Sumber daya mineral khususnya golongan C sangat terbatas.

Rencana induk pembangunan bidang energi dan Sumber daya mineral dalam prakteknya haruslah mengacu pada tujuan pokoknya yaitu mengoptimalkan bahan galian untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian maka rencana pengembangan energi dan sumber daya mineral adalah:

- a. Penyiapan atau perencanaan wilayah energi dan Sumber daya mineral diarahkan pada daerah yang mempunyai status bahan galian sangat prospek di masing-masing daerah.
- b. Satuan Wilayah Pembangunan yang telah ditetapkan kegiatan bidang energi dan Sumber daya mineral agar mengoptimalkan promosi bahan galian unggulan untuk menarik investor.
- c. Satuan Wilayah Pembangunan yang tidak ditetapkan sebagai kegiatan bidang energi dan Sumber daya mineral tetapi mempunyai potensi bahan galian sangat prospek yang melimpah, sebaiknya diajukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah Sumatera Selatan.
- d. Daerah yang berpotensi besar, tetapi karena tidak ada data kuantitatif tentang mutu dan jumlah cadangan hendaknya secepat mungkin dilakukan pemetaan tingkat keprospekan

wilayah energi dan sumber daya mineral secara regional maupun detail.

- e. Daerah yang berpotensi besar, tetapi aksesibilitas daerah rendah hendaknya mendapat prioritas pembangunan fisik seperti sarana jalan dan jembatan.

Dalam pengusahaan bahan tambang, perijinan SIPD diusahakan sistem satu atap, sehingga deregulasi dan debirokratisasi benar-benar terlaksana di lapangan.

Dari sisi pengawasan kegiatan pertambangan, diarahkan pada terdatanya pengusaha dan perusahaan serta produksi bahan tambangnya untuk kepentingan pemantauan dan perencanaan, terjaganya produksi bahan galian antar daerah agar tidak merugikan pihak pengusaha yang pada akhirnya mengakibatkan harga jual “jatuh”, dan terpantaunya produksi sehingga kuota produksi bisa ditetapkan sebelum terjadi kelebihan produksi.

Secara umum, pengembangan energi dan lingkungan diarahkan dengan cara:

- a) Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Aspek Fisik dan Lingkungan

Sumatera Selatan yang memiliki potensi Sumberdaya alam yang berlimpah harus dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal guna mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan bahwa pembangunan harus terus berlanjut tanpa menimbulkan kerusakan dan degradasi terhadap lingkungan. Dengan kata lain pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin kelanjutan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat terus menerus meningkat dengan ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan demikian pembangunan yang dimaksud adalah supaya melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya. Sehingga disamping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat juga bermanfaat bagi generasi mendatang. Pada dewasa ini konsep pembangunan yang sesuai adalah yang bersifat proaktif yaitu mencegah, memperbaiki dan mengurangi kerugian-kerugian dan dampak lingkungan yang muncul.

Pemerintah Indonesia menyadari perlunya kebijakan dan perangkat peraturan yang tepat untuk mengendalikan pencemaran dan degradasi kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Dalam hal melaksanakan fungsi-fungsi Negara di bidang konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Dalam menghadapi pembangunan, konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan tersebut diperlukan kesiapan informasi geologi lingkungan. Melalui geologi lingkungan akan mampu dilihat tatanan bumi secara utuh dengan pendekatan sistem bahwa segala sesuatu yang terdapat di bumi ini bersifat dinamis dan proses yang satu memberi akibat kepada yang lain dalam hubungannya baik secara sederhana maupun kompleks.

Adanya suatu rencana kegiatan pembangunan baik pada skala proyek, kawasan, multi sektor, maupun regional, juga akan membawa perubahan pada penggunaan lahan dan tata ruang *eksisting* maupun yang masih dalam rencana. Penggunaan lahan akan terkait dengan kegiatan yang mengambil manfaat atas sumber daya dan kendala pada lahan yang bersangkutan.

Dalam rangka semangat otonomi daerah, saat ini kegiatan pembangunan disegala bidang sedang giat dilaksanakan di Wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat sejahtera. Kegiatan pembangunan di berbagai bidang tersebut selain menempati daerah aman ditinjau dari aspek geologi lingkungan, namun juga telah meluas ke daerah rawan bencana alam geologi, seperti daerah rawan longsor, gempa bumi, letusan gunung api, banjir dan sebagainya. Untuk itu eksploitasi sumber daya alam perlu diarahkan secara terencana dan terkendali agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berujung pada mewariskan kemiskinan kepada generasi mendatang.

Penataan ruang suatu daerah berorientasi ke masa depan, agar dapat memanfaatkan dan menyelamatkan lingkungan alam bagi kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam bersifat terbatas tidak bisa diperbaharui dan bila eksploitasinya tidak terkendali seringkali menimbulkan dampak lingkungan negatif. Seringkali pula suatu penggunaan lahan terbatas oleh adanya konflik. Untuk alasan itu, secara komprehensif, semua keputusan penataan ruang lokal maupun regional

hendaknya didasarkan kepada temuan hasil penelitian dan klasifikasi lingkungan fisik.

b). Pengembangan Sumber Daya Energi

Pada dasarnya, pembangunan sumber daya mineral dan energi merupakan pengembangan sumberdaya mineral/bahan galian untuk dimanfaatkan secara optimal, dalam rangka menyejahterakan kehidupan manusia dan tidak dibiarkan tanpa memberi manfaat apapun. Dengan demikian, pengembangan sumberdaya tersebut menjadi modal nyata ekonomi melalui upaya pengusahaan dan pemanfaatan. Oleh karena itu, tugas pencapaian pembangunan Sumber daya mineral dan energi dilaksanakan melalui perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan teknis dan operasional, pemberian izin, bimbingan, pembinaan dan pengawasan, berikut sistem kelembagaan serta pengelolaan pengusahaan yang sesuai dengan perkembangan.

Dalam pengelolaan sumberdaya yang terkendali secara bijaksana, pengembangan Sumber daya mineral dan energi ditujukan untuk dapat menjamin ketersediaan komoditi di masa depan, memaksimalkan nilai tambah, menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan negara dan devisa, meningkatkan pengusahaan teknologi, mendorong pengembangan wilayah melalui memandirikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan usaha, baik usaha Sumber daya mineral dan energi dan industri penunjangnya maupun industri lain yang terkait, termasuk penyesuaian struktur kelembagaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, dalam Rencana Induk pembangunan Nasional sub sektor Sumber daya mineral dan energi dan Energi sebagai salah satu penunjang pokok dalam mendukung upaya modernisasi, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.

Dalam mengembangkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional berdasarkan potensi sumberdaya energi yang dimilikinya perlu didukung oleh strategi-strategi yang tepat, sehingga peranan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional dapat tercapai dalam kurun waktu yang direncanakan. Strategi-strategi tersebut mencakup berbagai aspek yang kesemuanya mendukung

pada pencapaian tujuan dari pengembangan Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi fokus dari strategi tersebut adalah sumberdaya energi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pengelolaan dari energi yang dihasilkan serta iklim usaha yang perlu untuk dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu, infrastruktur merupakan aspek penting yang juga turut memberikan peranan besar bagi pengembangan provinsi ini sebagai lumbung energi nasional. Sumberdaya manusia sebagai pelaksana dari pembangunan perlu didukung oleh strategi yang tepat untuk pengembangannya.

Aspek teknologi merupakan hal penting juga bagi pengembangan lumbung energi nasional, maka perlu pula didukung strategi yang baik, khususnya berkaitan dengan penguasaan teknologi yang digunakan. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah adanya suatu upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan peranan melalui kebijakan di tingkat daerah yang dapat mendorong dan memberikan daya percepatan bagi pengembangan Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

Berdasarkan kondisi di atas dan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu ketetapan berkaitan dengan strategi-strategi yang diperlukan, sehingga menjadi kebijakan yang akan mendukung pengembangan Provinsi yaitu:

- Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan.
- Menerapkan sistem pengelolaan energi yang optimal.
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- Mengembangkan infrastruktur.
- Mengembangkan sumberdaya manusia yang handal.
- Mengembangkan teknologi.
- Menyusun kebijakan energi daerah.

Ketujuh kebijakan tersebut perlu dijabarkan secara lebih terperinci hingga tingkatan program, pelaksana, serta sumber pembiayaan.

Aktivitas penambangan sumberdaya energi fosil maupun nonfosil pada umumnya menimbulkan dampak, baik positif ataupun negatif terhadap lingkungan fisik dan/atau nonfisik (misalnya dampak sosial). Dalam perspektif lingkungan hidup, dampak negatif harus diupayakan seminimal mungkin, sedangkan dampak positif diusahakan seoptimal mungkin.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota). Untuk pelaksanaan kewenangan ini dan dalam hubungannya dengan Agenda tersebut, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota perlu untuk membangun sistem informasi administrasi pemerintah, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembangunan sistem informasi lingkungan ini pada dasarnya akan melibatkan berbagai pihak secara luas dan terbuka sehingga penyebaran informasi dapat dilaksanakan secara optimal yang dituangkan dalam bentuk buku Laporan Status Lingkungan Hidup (*State of The Environment Report*) melalui pelaksanaan *e-governmant* Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*Good Environmental Government*) dan secara khusus untuk mengimplementasikannya melalui peningkatan Tata Praja Lingkungan Hidup, Warga Madani dan peningkatan kerjasama antar instansi secara terpadu, maka informasi mengenai lingkungan hidup perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik dalam ikut berperan menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian dalam era otonomi daerah dan era globalisasi ini diharapkan pembangunan dapat lebih diarahkan secara terpadu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini sangat penting, karena pada dasarnya pembangunan merupakan upaya sadar untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan.

Pengelolaan lingkungan yang diterapkan tergantung dari jenis kegiatan pemanfaatan sumberdaya energi. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus didasarkan pada pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional perlu diikuti dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur sebagai penopang tumbuhnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini maka arah pembangunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus sejalan dengan pengembangan tata ruang yang adil dan seimbang.

2. Pengembangan tata ruang yang adil dan seimbang

a). Arahan pengembangan tata ruang internal

- (1) Pemantapan sistim pusat-pusat permukiman internal Provinsi Sumatera Selatan melalui :
 - Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Metropolitan Palembang (Palembang-Betung-Indralaya atau Patungraya) yang merupakan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai pusat pertumbuhan utama di Provinsi Sumatera Selatan.
 - Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) secara seimbang dan hirarkis, sebagai pusat pertumbuhan sekunder dan tersier, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pengembangan kawasan-kawasan produktif sebagai penggerak ekonomi wilayah, yaitu :
 - Pengembangan kawasan andalan
 - Pengembangan kawasan budidaya, baik budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian.
- (3) Pemantapan konservasi kawasan lindung sebagai mekanisme pembangunan yang berkelanjutan

b). Arahan Pengembangan Tata Ruang Eksternal

- (1) Pengembangan kawasan kerjasama regional BELAJASUMBA (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung), dengan memantapkan pusat pengembangan regional Metropolitan Palembang yang didukung oleh sistim transportasi regional (darat, laut dan udara) serta infrastruktur wilayah (prasarana energi dan telekomunikasi).
- (2) Meningkatkan keterkaitan secara regional sistem kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terutama dengan pusat –pusat pengembangan nasional (PKN) maupun Regional (PKW) di wilayah sekitar Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pengembangan Sistem Transportasi

Dalam upaya mendukung visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, maka program penanganan transportasi darat khususnya di bidang jalan raya diarahkan kepada meningkatkan kapasitas dan daya dukung lalu lintas, membangun jalan tol pada Lintas Timur dan Lintas Tengah, Jembatan layang (fly over) dan jalan lingkar kota.

Prioritas pengembangan perkeretaapian ini adalah melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jaringan rel Palembang-Tanjung Api-Api.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem transportasi untuk 20 tahun ke depan diarahkan pada:

- a) Pengembangan prasarana transportasi sebagai gateway Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah luarnya (provinsi lain dan luar negeri) untuk melayani angkutan orang dan barang, melalui jaringan transportasi darat (terutama jaringan jalan dan kereta api), transportasi laut (terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai pelabuhan samudera), dan transportasi udara (terutama untuk angkutan orang/penumpang) secara terintegrasi.
- b) Pengembangan jaringan transportasi internal yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman (sistem kota-kota) maupun yang menghubungkan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sistem transportasi multi moda yang terintegrasi.

4. Pembangunan Jaringan Infrastruktur

- a) Pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, khususnya di kawasan andalan Muara Enim dan sekitarnya, kawasan andalan Lubuk Linggau dan sekitarnya, serta kawasan andalan Palembang dan sekitarnya.
- b) Pengembangan infrastruktur wilayah yang melayani pusat-pusat permukiman perkotaan (PKN, PKW, PKL dan kota-kota kecamatan) dan pusat-pusat permukiman perdesaan.

5. Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Potensi Sumatera Selatan dibidang pertanian dalam arti luas masih sangat terbuka untuk ditingkatkan dengan melaksanakan revitalisasi pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan-arahan teknis dan non teknis. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat mendayagunakan lahan tanpa adanya pengaruh-pengaruh yang dapat merusak lingkungan.

Adapun arahan teknisnya adalah menerapkan teknologi supaya lahan-lahan tersebut bisa didayagunakan dan mempengaruhi peningkatan kesuburannya. Sedangkan arahan non teknisnya meliputi upaya-upaya yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan peningkatan kualitas lahan melainkan yang berkaitan dengan tindak lanjut yang akan terjadi terhadapnya.

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, perlu ditingkatkan usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi terhadap lahan yang tersedia secara terpadu, serasi dan merata sesuai dengan kondisi tanah, air dan iklim dengan tetap memelihara kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah produsen utama produk-produk pertanian memiliki peran strategis yang harus terus dijalankan dan dikembangkan secara dinamis. Hal itu tidak lain untuk memajukan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku ekonomi terkait lainnya. Peranan Sumatera Selatan sebagaimana daerah luar Pulau Jawa lainnya semakin penting dalam menghasilkan produk-produk pertanian yang meliputi komoditi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tolok ukur (*benchmark*) pengembangan wilayah dengan potensi pertanian yang paling sering digunakan adalah konsep pengembangan agropolitan. Pengembangan agropolitan adalah salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pertanian dengan membentuk masyarakat/*stakeholder* yang tangguh dalam mengelola pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian yang maksimal.

Pengembangan agropolitan juga pada dasarnya upaya untuk menggali potensi kegiatan sektor pertanian terutama sub sektor unggulan yang telah ditentukan, berdasarkan kriteria tertentu antara

lain produknya mempunyai daya saing yang cukup besar. Pada pengembangan agropolitan perlu adanya kawasan pusat produksi yang menjadi andalan untuk menghasilkan komoditi unggulan dan yang lainnya adalah kawasan pusat pelayanan bagi berkembangnya kawasan agropolitan.

Dengan demikian, pengembangan kawasan agropolitan mempunyai visi terciptanya Kota Pertanian yang tumbuh dan berkembang melalui Sistem dan Usaha Agribisnis. Sedangkan misinya adalah membangun ekonomi berbasis pertanian di kawasan Agribisnis yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi sumberdaya yang ada.

Dalam upaya mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan kalau dikaitkan dengan upaya revitalisasi pembangunan pertanian dan pedesaan secara nasional akan sangat relevan apabila diaplikasikan dengan pendekatan pengembangan agropolitan atau Kota Pertanian dan Kawasan Agropolitan. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan daerah-daerah sentra produksi pertanian menjadi suatu kawasan kota pertanian yang berisikan pusat kota pertanian dengan fasilitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk pusat agribisnis hulu, hilir dan penunjang untuk melayani kawasan sentra produksi yang menjadi *hinterlandnya*.

Sehubungan dengan itu, program Sumatera selatan sebagai lumbung pangan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan seta kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka system dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/atau mengentaskan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah mengkondisikan iklim usaha dan prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit-unit usaha di bidang pangan, termasuk melakukan intervensi pasar agar tercipta pasar komoditas pangan yang berkeadilan dengan pelaku yang bertanggung jawab. Pemerintah juga bertugas memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi ketahanan pangannya secara mandiri. Peran pemerintah yang cukup luas ini diaktualisasikan dalam kebijakan dan program pada berbagai unit kerja sektoral, antara lain Pertanian, Kelautan dan Perikanan,

Perkebunan, peternakan, Industri, Perdagangan dan sektor-sektor lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.

Dalam melaksanakan peran tersebut maka lembaga pemerintah yang bertugas mengelola bidang ketahanan pangan harus senantiasa memantau dan memahami kinerja system ketahanan pangan dari waktu ke waktu, serta melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang mengganggu ketahanan pangan.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan dari waktu ke waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, kondisi yang dikehendaki adalah *“terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”*.

Mengacu pada pernyataan tersebut maka pemantauan senantiasa dilakukan terhadap : (i) ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup; (ii) distribusi pangan yang menjamin keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat; (iii) kemampuan setiap keluarga mengakses pangan dan mengelola konsumsi untuk mencukupi kebutuhan gizi seluruh anggotanya; (iv) mutu, gizi dan keamanan pangan yang memadai untuk menunjang pertumbuhan fisik, kesehatan dan produktivitas masyarakat. Informasi yang diperoleh dari pemantauan dapat dianalisis untuk mengetahui secara terukur situasi ketahanan pangan, selanjutnya dapat dilakukan evaluasi dengan acuan pembandingan kondisi yang diinginkan.

Tujuan pembangunan pertanian di Propinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan melalui pemantapan ketahanan pangan dan pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri. Tujuan tersebut dapat dituangkan dalam konsepsi antara lain :

- a) Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan pencapaian kebutuhan pangan nasional;
- b) Meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi;
- c) Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat guna memenuhi gizi yang baik dan menghindarkan diri dari ketergantungan pada satu jenis pangan;

- d) Pemilihan dan penerapan teknologi tepat guna baik untuk prapanen maupun pascapanen yang sesuai dengan kondisi alam dan masyarakat.
- e) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agribisnis yang lebih terarah pada peranan usaha agroindustri;
- f) Meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dan ekspor;
- g) Pembangunan dan pengembangan usaha pertanian mikro, kecil dan menengah di kawasan sentra produksi pertanian;
- h) Pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan agribisnis berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, RPJP bertujuan untuk merumuskan rencana dan program pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan potensi seluruh sumberdaya yang dimiliki serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dalam mewujudkan wilayah ini sebagai lumbung pangan yang tidak hanya menghasilkan produksi berbagai produk pertanian yang surplus, melainkan pula dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lainnya serta masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya.

Pembangunan pertanian dilakukan dalam rangka meningkatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat pelaku agribisnis. Pelaku agribisnis adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah maupun usaha besar. Pelaku agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan agribisnis itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian diterjemahkan ke dalam proses produksi. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis tersebut. Pengembangan usaha agribisnis diarahkan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan peluang pasar.

Arah pengembangan atau peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan dalam program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan khusus untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, sayur dan buah), peternakan (sapi dan ayam), dan perikanan (udang, ikan mas dan nila) adalah untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan dan konsumsi domestik pada lokalita yang lebih kecil. Untuk komoditas perkebunan (karet, kelapa sawit, kopi, kelapa) dan kehutanan (kayu, pulp) sebagai andalan

ekspor wilayah, surplus yang selama ini telah dicapai perlu terus ditingkatkan untuk perolehan devisa yang lebih besar.

Dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah dikemukakan, maka dirumuskan sasaran-sasaran pembangunan pertanian sebagai berikut :

- (1). Meningkatnya produksi pangan sumber karbohidrat dan karbohidrat alternatif yang berakar dari sumberdaya dan budaya lokal, protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,
- (2). Terjadinya diversifikasi pola pangan masyarakat Sumatera Selatan yang dihasilkan dari sumberdaya lokal dengan kandungan gizi yang baik,
- (3). Meningkatnya produktivitas usaha pertanian, industri pengolahan hasil pertanian dan ekspor produk-produk pertanian,
- (4). Berkembangnya usaha pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian,
- (5). Meningkatnya pendapatan petani dari usaha pertanian dan nilai tambah produk pertanian,
- (6). Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor,
- (7). Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis, khususnya agroindustri yang dapat memajukan perekonomian di pedesaan, dan
- (8). Terpeliharanya produktivitas sumberdaya alam, berkembangnya usaha pertanian dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Dari uraian diatas dapat disarikan bahwa dalam rangka mewujudkan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan ada beberapa sasaran yang harus dijadikan prioritas dalam pencapaiannya. Sasaran tersebut adalah :

a. Revitalisasi Pertanian

Propinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah produsen utama produk pertanian jelas memiliki peran strategis yang harus terus dijalankan. Hal itu tidak lain untuk memajukan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku ekonomi terkait lainnya. Peran Sumatera Selatan sebagaimana daerah luar Pulau Jawa lainnya semakin penting dalam menghasilkan

produk-produk pertanian pangan, selain komoditi perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang selama ini menjadi andalan utamanya. Semakin berkurang atau menyempitnya lahan pertanian pangan terutama untuk padi di Pulau Jawa, sementara permintaan beras terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, maka pemenuhannya harus mengandalkan pada produksi dari luar Pulau Jawa selain dari impor yang semakin mahal harganya. Oleh karena itu dengan potensi lahan dan SDM yang ada, surplus produksi padi yang selama ini dialami Sumatera Selatan dapat lebih dan terus ditingkatkan untuk dapat berkontribusi lebih nyata terhadap kebutuhan pangan nasional. Hal itu dapat diwujudkan dengan melakukan revitalisasi pertanian dengan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sarana dan fasilitas pertanian yang ada.

b. Pemantapan Sistem Agribisnis

Sistem dan usaha agribisnis yang telah diimplementasikan selama ini, pada masa mendatang perlu lebih dimantapkan dan dikembangkan dengan tetap dalam koridor empat karakteristiknya yaitu (1) berdaya saing, (2) berkerakyatan, (3) berkelanjutan, dan (4) desentralistis. Pemantapan sistem agribisnis mengandung arti pemantapan keterkaitan atau sinergisme, kerjasama, dan koordinasi antar sub sistem agribisnis untuk lebih meningkatkan kinerja sistem. Pemantapan usaha agribisnis mengandung arti lebih dikembangkannya usaha rumah tangga bidang pertanian yang berupa usaha tani keluarga, industri rumah tangga, koperasi, usaha kelompok, usaha kecil dan menengah serta usaha besar yang bergerak pada sub sistem agribisnis hulu hingga hilir. Pemantapan dan pengembangan usaha agribisnis juga bermakna sebagai peningkatan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri dan memanfaatkan peluang pasar hingga dapat memainkan peran yang dominan dalam perekonomian daerah dan nasional.

c. Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan

Telah banyak kelembagaan yang terbentuk di lingkup pertanian dan perdesaan yang bertujuan untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengakselerasi pelaksanaannya untuk mencapai pembangunan. Tetapi pada akhirnya peran kelembagaan tersebut menjadi semu karena indikator-indikator keberhasilan pembangunan tidak mencerminkan keberhasilan pembangunan dari kacamata masyarakat.

Kelembagaan yang ada di pedesaan tersebut seringkali pembentukannya bersifat dadakan sehingga mengurangi bahkan mengebiri ciri demokratis (musyawarah mufakat) masyarakat pedesaan.

Sebagai imbas dari pendekatan top-down yang dilakukan pada masa lalu banyak kelembagaan yang ada terutama di pedesaan yang kehilangan peran dan mengalami erosi nilai-nilai tradisional yang dianutnya, tetapi kelembagaannya sendiri sebagai norma-norma yang disepakati masyarakat masih terwujud dalam interaksi keseharian masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan pemantapan kelembagaan pengelola pertanian (kelompok tani, nelayan, peternak dan pekebun; koperasi; perkumpulan petani pemakai air; dan lain-lain) dengan upaya-upaya rekonstruksi dan revitalisasi kelembagaan yang telah ada dengan nilai-nilai dan norma-norma baru baru yang tidak bertentangan dengan tujuan program pemerintah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pembinaan diiringi dengan Pendampingan,
- b. Penguatan dan Pemberdayaan (*Empowerment*),
- c. Pemerataan akses dan Penyetaraan Peran,
- d. Pengembangan kelembagaan dengan mendahulukan aspek kulturalnya
- e. Mewujudkan kearifan lokal dalam kelembagaan.

Tabel 4. 3
Agenda Pembangunan Yang Berorientasi
Pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan

No	Sasaran	Indikasi
1	Pengelolaan energi dan Lingkungan a. Inventarisasi dan pemutahiran data aspek fisik dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya kawasan lindung geologi (resapan air, rawan bencana, karst, dan lain lain). • Teridentifikasinya kawasan budidaya secara geologis.

	b. Pengembangan sumber daya energi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Sumberdaya Energi yang berwawasan lingkungan (tingkat polusi dan dampak lingkungan). • Sistim pengelolaan energi yang optimal (terkendalinya supply-demand energi) • Teknologi energi tumbuh dan berkembang baik • Kecukupan cadangan energi terjamin dan berkesinambungan • Ekspor energi dapat memberikan nilai tambah yang besar • Berkembangnya sumberdaya energi alternatif berbasis komoditi pertanian
2	<p>Pengembangan Tata Ruang yang Adil dan Seimbang</p> <p>a. Sistim kota-kota yang hirarkis dan memiliki keterkaitan fungsional dan spasial</p> <p>b. Pengembangan Kawasan Budidaya dan Pemantapan kawasan lindung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pola lokasi kota-kota terpetakan dengan jelas • Distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan • Distribusi fungsi kota mampu diterjemahkan sesuai dengan potensinya • Keterkaitan fungsional mampu menjamin percepatan pertumbuhan • Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan peruntukan, fungsi dan potensinya • Pelestarian kawasan lindung terjamin baik • Pengembangan kawasan kerjasama regional berjalan harmonis dan saling menguntungkan
3	Pengembangan Sistim Transportasi	
	<p>a. Sistim Transportasi Internal</p> <p>b. Sistim Transportasi eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio panjang jalan terhadap luas daerah meningkat • Akses antar pusat-pusat permukiman lebih mudah dan baik • Akses ke kawasan sentra produksi lebih mudah dan baik • Wilayah pelayanan moda transportasi semakin bertambah • Intregrasi antar moda berjalan baik dan efektif • Variasi moda gateway meningkat • Kapasitas prasarana gateway bertambah besar • Akses ke wilayah sekitar semakin mudah dan baik
4	Pembangunan jaringan infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah teritorial pelayanan (jumlah desa terlayani) semakin meningkat • Penduduk terlayani semakin banyak
5	Pertanian dan Tanaman Pangan	

<p>a. Revitalisasi Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan areal produksi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) yang cukup signifikan • Penataan dan pengembangan jaringan distribusi agro-input • Pemetaan dan penataan kawasan (<i>cluster</i>) komoditi unggulan <p>b. Pengembangan dan pematapan sistem agribisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan keterkaitan antar sub sistem agribisnis • Pembangunan dan pengembangan usaha agribisnis <p>c. Pengembangan dan pematapan institusi dan kelembagaan pengelola pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pertanian • Pembinaan dan pemberdayaan institusi dan kelembagaan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tanam dan luas panen meningkat • Populasi ternak (sapi dan ayam) meningkat • Areal (luas) tambak meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, obat-obatan, dll) makin mudah diperoleh • Produktivitas pertanian meningkat • Terciptanya kawasan-kawasan komoditi unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya sinergisme, kerjasama dan koordinasi antara sub sistem produksi, sub sistem distribusi dan sub sistem pemasaran) • Adanya peningkatan kuantitas, kualitas manajemen dan usaha mandiri di bidang pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya institusi dan lembaga-lembaga pertanian yang kuat dan mandiri • Makin profesionalnya institusi dan lembaga pertanian dalam mata rantai produksi dan distribusi produk pertanian
--	--

Untuk mendukung tercapainya pembangunan Sumatera Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pula sasaran pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan penyelenggaraan negara dimana terciptanya tata pemerintahan yang jujur, adil, dan bersih dari KKN, meningkatnya kualitas layanan masyarakat, serta terciptanya kepastian hukum dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

4.4.
Agenda
Pembangunan
Pemerintahan
Yang
Jujur,
Adil,
Bersih dan
Bertanggung-
Jawab

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemda

Diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan (*Institutional capacity building*) yang ada, meliputi lembaga Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum

Peningkatan fungsi dan peran pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menerapkan system pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Upaya tersebut ditempuh melalui

- Pembangunan SDM aparatur yang professional dengan peningkatan kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayanan prima.
- Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disesuaikan dengan ISO, serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- Pengembangan etika kepemimpinan birokrasi dan administrasi negara

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Pembangunan kapasitas keuangan pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah termasuk penguatan institusi daerah dalam mengelola dana APBD, serta dalam menggali potensi sumber keuangan daerah.

4. Peningkatan Peran serta masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

5. Keterbukaan Informasi dan Komunikasi

Pengembangan informasi komunikasi dan media massa untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi, kedewasaan dan kebebasan media pers dan media masa sejalan dengan undang-undang dan tata peraturan daerah yang berlaku.

6. Pembangunan Politik Lokal

Arah pembangunan politik diprioritaskan pada proses penyempurnaan dan penguatan lembaga politik baik lembaga politik baik pada lembaga politik penyelenggara negara/daerah maupun lembaga politik kemasyarakatan termasuk hubungan antar lembaga politik tersebut.

7. Hukum dan Tata Peraturan Daerah

Arah pembangunan penegakan hukum dan tata peraturan daerah diprioritaskan pada penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah sebagai instrumen penguatan hukum di Daerah.

8. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Arah perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana diprioritaskan pada penguatan fungsi kelembagaan lokal dalam bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

9. Pemantapan Ketertiban dan Keamanan Daerah

Pembangunan daerah perlu didukung aspek keamanan dan ketertiban daerah guna menjaga perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 4. 4
Agenda Pembangunan Pemerintahan Yang Jujur, Adil, Bersih
dan Bertanggung Jawab

No	Sasaran	Indikasi
1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Sistem semakin menguat • Kapasitas Organisasi semakin menguat • Kapasitas Individu semakin menguat
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM aparatur meningkat • Standar Pelayanan Minimal diterapkan dengan benar • SOP diterapkan dengan benar • Pemimpinan Birokrasi makin beretika
3	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Anggaran makin kuat dan baik • Anggaran makin efisien • Anggaran makin efektif • PAD makin meningkat dan beragam
4	Peningkatan Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam Proses Perencanaan Daerah meningkat • Pengawasan Masyarakat makin meningkat • Pengaduan oleh Masyarakat tersalurkan dan ditindaklanjuti • Organisasi Kemasyarakatan / LSM berperan dan berfungsi baik
5	Keterbukaan Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya informasi dan komunikasi • Terjaminnya transparansi dan keterbukaan informasi • Adanya kebebasan media yang bertanggung jawab • Adanya peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan komunikasi
6	Pembangunan Politik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin baik

		<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas kelembagaan Organisasi dan Partai Poilitik semakin baik • Pendidikan Politik Masyarakat berjalan baik • Etika Politik Lokal berjalan baik
7	Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan Perda lebih optimal • Pelanggaran Perda ditindaklanjuti dengan benar • Tata Peraturan Daerah lebih efektif • Ada dan diakuinya Kesetaraan (equality)
8	Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana semakin kuat dan berfungsi • Kerawanan sosial dapat teratasi • Penanggulangan bencana dapat teratasi
9.	Pemantapan Ketertiban dan Keamanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat makin profesional • Pelayanan masyarakat semakin meningkat • Peranserta masyarakat dalam keamanan lingkungan makin besar dan meningkat

5.5 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAH DAERAH

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, maka diperlukan tahapan dan skala prioritas yang akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu duapuluh tahun kedepan. Mengingat pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

Tahapan dan Skala Prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Ketujuh sasaran yang ditetapkan tersebut dapat dituangkan kedalam tahapan jangka menengah agar dalam jangka panjang arah pembangunan tersebut dapat direncanakan secara konsisten. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut dapat dituangkan sebagai berikut :

1. Menetapkan target pertumbuhan ekonomi (PDRB tanpa migas) sebesar minimal 6,5% sebagai acuan setiap sektor dalam perekonomian Sumatera Selatan pada tahap pertama, dan peningkatan target mencapai diatas 6,5% pada tahap kedua dan berikutnya dengan memperhatikan tumbuhnya sektor manufaktur yang mendukung perkembangan sektor primer. (Sasaran 1)
2. Peningkatan upaya realisasi penanaman modal (PMDN dan PMA) sebesar Rp 75 trilyun untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal 6,5% pada tahap pertama, dan peningkatan secara bertahap pada tahap selanjutnya. Untuk meningkatkan PMDN di Sumatera Selatan, pertumbuhan perbankan juga perlu terus ditingkatkan dalam tugasnya menjadi mediasi antara masyarakat penghimpun dana dengan investor. (Sasaran 1,2, 3).
3. Upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) dengan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pada tahap pertama, dan pengintegrasian dengan pengembangan manufaktur (*forward linkage*) pada tahap berikutnya.
4. Pengembangan sektor pariwisata perlu juga terus diupayakan mengingat banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan lapangan kerja bahkan hingga perolehan devisa.(Sasaran 1, 2,3,5).
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan membuka keran investasi dengan pemberian insentif pajak dan non pajak di bidang infrastruktur, serta alokasi APBD yang menyertainya. Setelah infrastruktur udara dan jalan kemudian disusul dengan infrastruktur kereta api dan laut/sungai untuk mengintegrasikan kawasan Belajasumba dengan Sumatera Selatan sebagai motor penggeraknya. (Sasaran 1, 4)

6. Penurunan angka pengangguran terbuka dengan memperhatikan alokasi investasi yang lebih padat tenaga kerja. Tahap awal diprioritaskan pada penurunan angka pengangguran di perkotaan hingga dibawah 10%, dan pada tahap berikutnya pada angka pengangguran terbuka keseluruhan hingga dibawah 10%. (Sasaran 5, 6)
7. Mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) sebagai wadah ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat. Target yang ditetapkan untuk Sumatera Selatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah 33.000 unit usaha baru pada tahap pertama, serta peningkatan kualitasnya pada tahap berikutnya.(Sasaran 5,6)
8. Alokasi APBD dan upaya mengundang peran pihak swasta dalam peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan (daya beli diasumsikan telah dicapai secara tidak langsung oleh rencana tindak yang lain) dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahap awal diupayakan alokasi APBD diupayakan mencapai 20% yang setara dengan amanat UU Sisdiknas pada APBN, dan upaya menarik minat swasta untuk berperan dalam sektor pendidikan dan kesehatan pada tahap berikutnya. (Sasaran 7).

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun seperti di bawah ini.

5.5.1. RPJMD TAHAP PERTAMA

Rencana pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berorientasi pada perbaikan dan perluasan usaha pencapaian target pembangunan yang diarahkan pada upaya mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional, Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan, kesejahteraan rakyat, dan Sumatera Selatan bersatu teguh yang mencakup tahapan sebagai berikut:

- 5.5.1.1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada :

1. Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah tetap diatas 6,5 persen per tahun melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata.
2. Pembangunan struktur ekonomi primer (pertanian, pertambangan, dan penggalian) yang didukung oleh sektor dan sekunder melalui peningkatan nilai tambah sektor primer, manufaktur, dan jasa yang memiliki keterkaitan erat.
3. Perluasan sektor unggulan daerah melalui penggalian sektor-sektor baru yang berpotensi dan memiliki nilai tambah.
4. Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui peningkatan investasi, peningkatan daya saing, peningkatan ekspor komoditi unggulan yang mampu bersaing, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan produk lokal.
5. Pengurangan Angka Pengangguran di perkotaan hingga bisa mencapai dibawah 10%, melalui peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan padat karya.
6. Pengurangan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui pemberdayaan penduduk miskin, pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha, dan peningkatan pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru.
7. Perbaiki kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

5.5.1.2 Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada:

1. Perbaiki kualitas dan pelayanan pendidikan melalui pemerataan guru yang bersertifikasi, pemerataan pelayanan, fasilitas, dan jumlah sekolah dan guru, dan pemerataan kesempatan belajar dan bersekolah yang disertai dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar 20 persen.
2. Perbaiki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemerataan kesempatan dan akses terhadap informasi dan teknologi, pemberdayaan

lembaga penelitian, dan penyebarluasan hasil dan implementasi penelitian.

3. Perbaiki derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, peningkatan fasilitas melahirkan, dan pemerataan ketersediaan paramedis beserta sarana kesehatannya.
4. Perbaiki kualitas permukiman dan perumahan melalui pemerataan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta air limbah, dan perbaikan kawasan kumuh.
5. Perbaiki pembangunan kesejahteraan sosial melalui peningkatan peran gender, perbaikan penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, pemerataan aktivitas keagamaan, kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut perbaikan dan pemerataan sarana dan prasarannya, dan pemerataan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta perbaikan UMR, perlindungan terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah.

5.5.1.3 Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, yang berfokus pada :

1. Perbaiki pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan melalui pengidentifikasian kawasan lindung geologi dan kawasan budidaya secara geologis, perbaikan sistem pengelolaan energi dan teknologi energi, dan pemenuhan kecukupan cadangan energi.
2. Perencanaan dan penerapan tata ruang yang adil dan seimbang melalui penetapan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya.
3. Perbaiki sistem transportasi melalui peningkatan panjang jalan, pemerataan akses antar pusat-pusat permukiman dan akses pada kawasan sentra produksi.
4. Perluasan pembangunan jaringan infrastruktur udara dan jalan melalui perluasan dan pemerataan pelayanan teritorial dengan membuka keran investasi dengan pemberian insentif pajak dan non pajak serta alokasi APBD yang menyertainya.

5. Revitalisasi pertanian, perbaikan sistem agribisnis, dan perbaikan institusi dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal tanam dan ternak, perbaikan sarana produksi, peningkatan produktifitas, perbaikan sistem produksi, pemasaran, dan lembaga pertanian.

5.5.1.4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dengan fokus pada :

1. Perbaikan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kapasitas sistem, organisasi, dan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perbaikan kualitas pelayanan umum melalui peningkatan kompetensi SDM aparatur, penerapan Standar Pelayanan Minimum dan Prosedur Operasional Standar, dan penciptaan kepemimpinan birokrasi yang beretika.
3. Perbaikan kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan struktur anggaran yang lebih efektif dan efisien, dan penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
4. Perbaikan peran serta masyarakat melalui peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
5. Keterbukaan informasi dan teknologi melalui perluasan penyebaran informasi dan teknologi, perluasan keterbukaan dan transparansi informasi, dan terciptanya kebebasan media yang bertanggung jawab, serta tersedianya peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan teknologi.
6. Perbaikan pembangunan politik lokal melalui peningkatan kapasitas lembaga legislatif daerah, organisasi dan partai politik, dan perluasan pendidikan politik masyarakat yang disertai juga dengan peningkatan etika politik lokal.
7. Perbaikan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah melalui peningkatan pendayagunaan peraturan daerah, termasuk penerapan dan penindakan pelanggaran dengan prinsip adanya kesetaraan perlakuan di depan hukum.
8. Perbaikan perlindungan masyarakat dan penganggulangan bencana melalui peningkatan fungsi dan peran lembaga perlindungan masyarakat dan

penanggulangan, pengatasan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana.

9. Perbaiki aspek ketertiban dan keamanan daerah melalui peningkatan profesionalitas aparat, perbaikan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan peranserta masyarakat dalam masalah keamanan lingkungan.

5.5.2. RPJMD TAHAP KEDUA

Dalam tahap kedua, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian tahap pertama, pembangunan Sumatera Selatan tahap selanjutnya diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas pengelolaan sumber daya.

- 5.5.2.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah diatas 6,5 persen per tahun melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata dengan menciptakan integrasi antar dan inter sektor.
2. Pengembangan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sektor sekunder dan sektor tersier melalui peningkatan nilai tambah sektor primer yang berbasis industri, pengembangan manufaktur, dan perluasan jasa yang potensial.
3. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah melalui penggalian sektor-sektor baru yang berpotensi dan memiliki nilai tambah.
4. Pengembangan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui pengembangan investasi dan daya saing, perluasan ekspor komoditi unggulan yang lebih berkualitas, dan pengurangan jumlah impor yang digantikan dengan produk berbasis lokal.
5. Penurunan Angka Pengangguran terbuka hingga bisa mencapai dibawah 10%, melalui perluasan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan padat karya.
6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui peningkatan kemampuan dan

keahlian penduduk miskin, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, dan percepatan pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru.

7. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

5.5.2.2 Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada:

1. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui peningkatan guru yang bersertifikasi, peningkatan pelayanan, fasilitas, dan jumlah sekolah dan guru, dan peningkatan kesempatan belajar dan bersekolah yang disertai dengan alokasi anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 20 persen.
2. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kesempatan dan akses terhadap informasi dan teknologi, pemberdayaan lembaga penelitian, dan penyebarluasan hasil dan implementasi penelitian.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, peningkatan fasilitas melahirkan, dan pemerataan ketersediaan paramedis beserta sarana kesehatannya.
4. Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan melalui peningkatan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta air limbah yang memenuhi standar, dan pengurangan kawasan kumuh.
5. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial melalui peningkatan peran gender, peningkatan penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, peningkatan aktivitas keagamaan, kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut peningkatan sarana dan prasarannya, dan peningkatan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta peningkatan UMR, perlindungan terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah.

5.5.2.3 Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, yang berfokus pada :

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan sistim pengelolaan energi dan teknologi energi, dan pemenuhan kecukupan cadangan energi pemberian nilai tambah ekspor energi, dan pengembangan sumberdaya energi alternatif berbasis komoditi pertanian.
2. Penerapan tata ruang yang adil dan seimbang melalui pengembangan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya.
3. Pengembangan sistem transportasi melalui peningkatan panjang jalan, peningkatan akses antar pusat-pusat permukiman dan akses pada kawasan sentra produksi.
4. Peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur kereta api dan infrastruktur laut/sungai melalui peningkatan pelayanan teritorial dengan membuka keran investasi dengan pemberian insentif pajak dan non pajak serta alokasi APBD yang menyertainya.
5. Revitalisasi pertanian, pengembangan sistem agribisnis, dan pengembangan institusi dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal tanam dan ternak, peningkatan sarana produksi, peningkatan produktifitas, pengembangan sistem produksi, pemasaran, dan lembaga pertanian.

5.5.2.4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dengan fokus pada :

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah melalui pengembangan kapasitas sistem, organisasi, dan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan umum melalui pengembangan kompetensi SDM aparatur, pengembangan Standar Pelayanan Minimum dan Prosedur Operasional Standar, dan pengembangan kepemimpinan birokrasi yang beretika.
3. Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui pengembangan struktur anggaran yang lebih efektif dan efisien, dan perluasan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

4. Pengembangan peran serta masyarakat melalui pengembangan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
5. Keterbukaan informasi dan teknologi melalui peningkatan penyebaran informasi dan teknologi, peningkatan keterbukaan dan transparansi informasi, dan berjalannya kebebasan media yang bertanggung jawab, serta berfungsinya peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan teknologi.
6. Peningkatan pembangunan politik lokal melalui pengembangan kapasitas lembaga legislatif daerah, organisasi dan partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat yang disertai juga dengan peningkatan etika politik lokal.
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah melalui peningkatan pendayagunaan peraturan daerah dan berjalannya penerapan dan penindakan pelanggaran dengan prinsip adanya kesetaraan hukum.
8. Peningkatan perlindungan masyarakat dan penganggulangan bencana melalui pengembangan fungsi dan peran lembaga perlindungan masyarakat dan penanggulangan, pengatasan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana.
9. Pengembangan aspek ketertiban dan keamanan daerah melalui pengembangan profesionalitas aparat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pengembangan peranserta masyarakat dalam masalah keamanan lingkungan.

5.5.3. RPJMD TAHAP KETIGA

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari tahap pertama dan tahap kedua diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang terutama yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Sumatera Selatan yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, kondusifitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat yang dilakukan mencakup upaya sebagai berikut :

5.5.3.1. Menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada :

1. Penguatan laju pertumbuhan ekonomi daerah diatas 6,5 persen per tahun melalui penguatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata dengan menciptakan integrasi antar dan inter sektor.
2. Penguatan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sektor sekunder dan sektor tersier melalui penguatan nilai tambah sektor primer yang berbasis industri, penguatan bidang industri, dan penguatan bidang jasa yang potensial.
3. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah melalui pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi dan memiliki nilai tambah.
4. Penguatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui penguatan investasi dan daya saing, pengembangan ekspor komoditi unggulan yang lebih berkualitas, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan produk berbasis lokal.
5. Pengurangan Angka Pengangguran terbuka hingga bisa mencapai dibawah 10%, melalui pengembangan dan penguatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan padat karya.
6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui pengembangan dan penguatan kemampuan dan keahlian penduduk miskin, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, dan percepatan pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru.
7. Penguatan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

5.5.3.2 Menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada:

1. Penguatan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui pengembangan guru yang bersertifikasi, pengembangan pelayanan, fasilitas, dan jumlah sekolah dan guru, dan peningkatan kesempatan belajar dan bersekolah yang disertai dengan alokasi

anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 20 persen.

6. Penguatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan kesempatan dan penguatan akses terhadap informasi dan teknologi, penguatan lembaga penelitian, dan pengembangan hasil dan implementasi penelitian.
7. Penguatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, pengembangan fasilitas melahirkan, dan peningkatan ketersediaan paramedis beserta sarana kesehatannya.
8. Penguatan kualitas permukiman dan perumahan melalui pengembangan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta air limbah yang memenuhi standar, dan pengurangan kawasan kumuh.
9. Penguatan pembangunan kesejahteraan sosial melalui penguatan peran gender, penguatan penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, pengembangan aktivitas keagamaan, kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut penguatan sarana dan prasarannya, dan penguatan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta penguatan UMR, perlindungan terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah.

5.5.3.3 Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, yang berfokus pada :

1. Penguatan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan melalui penguatan sistim pengelolaan energi dan teknologi energi, dan terjaminnya pemenuhan kecukupan cadangan energi pemberian nilai tambah ekspor energi, dan penguatan sumberdaya energi alternatif berbasis komoditi pertanian.
2. Penguatan tata ruang yang adil dan seimbang melalui penguatan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya, serta pengembangan kawasan budidaya dan pelestarian kawasan lindung.

3. Penguatan sistem transportasi melalui peningkatan panjang jalan, peningkatan akses antar pusat-pusat permukiman dan akses pada kawasan sentra produksi.
4. Penguatan pembangunan jaringan infrastruktur pelabuhan udara, laut, jalan raya, dan kereta api melalui penguatan pelayanan teritorial, penambahan wilayah pelayanan moda transportasi, penciptaan integrasi antar moda, peningkatan variasi moda dan kapasitas kawasan prasarana gateway.
5. Revitalisasi pertanian, penguatan sistem agribisnis, dan penguatan institusi dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal tanam dan ternak, pengembangan sarana produksi, penguatan produktifitas, dan penguatan sistem produksi, pemasaran, distribusi dan lembaga pertanian.

5.5.3.4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dengan fokus pada :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah melalui penguatan kapasitas sistem, organisasi, dan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penguatan kualitas pelayanan umum melalui penguatan kompetensi SDM aparatur, penguatan Standar Pelayanan Minimum dan Prosedur Operasional Standar, dan penguatan kepemimpinan birokrasi yang beretika.
3. Penguatan kapasitas keuangan daerah melalui penguatan struktur anggaran yang lebih efektif dan efisien, dan penguatan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
4. Penguatan peran serta masyarakat melalui penguatan peranserta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
5. Keterbukaan informasi dan teknologi melalui peningkatan penyebaran informasi dan teknologi, penguatan keterbukaan dan transparansi informasi, dan berfungsinya kebebasan media yang bertanggung jawab, serta optimalnya penerapan peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan teknologi.
6. Penguatan pembangunan politik lokal melalui penguatan kapasitas lembaga legislatif daerah, organisasi dan partai politik, dan penguatan

pendidikan politik masyarakat yang disertai juga dengan penguatan etika politik lokal.

7. Penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah melalui penguatan pendayagunaan peraturan daerah dan berfungsinya penerapan dan penindakan pelanggaran dengan prinsip adanya kesetaraan hukum.
8. Penguatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana melalui penguatan fungsi dan peran lembaga perlindungan masyarakat dan penanggulangan, pengatasan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana.
9. Penguatan aspek ketertiban dan keamanan daerah melalui penguatan profesionalitas aparat, penguatan pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan peranserta masyarakat dalam masalah keamanan lingkungan.

5.5.4. RPJMD TAHAP KEEMPAT

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga diarahkan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul, dan terdepan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mencakup tahapan sebagai berikut :

- 5.5.4.1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada :
 1. Pemantapan laju pertumbuhan ekonomi daerah diatas 6,5 persen per tahun melalui pemantapan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata dengan menciptakan integrasi antar dan inter sektor.
 2. Pemantapan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sektor sekunder dan sektor tersier melalui penguatan dan pemantapan nilai tambah sektor primer yang berbasis industri, pemantapan bidang industri, dan pemantapan bidang jasa yang potensial.

3. Pemantapan sektor-sektor unggulan daerah melalui penguatan dan pemantapan sektor-sektor baru yang berpotensi dan memiliki nilai tambah.
4. Penguatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui penguatan investasi dan daya saing, penguatan ekspor komoditi unggulan yang lebih berkualitas, dan penurunan jumlah impor yang digantikan dengan produk berbasis lokal.
5. Penurunan Angka Pengangguran terbuka hingga bisa mencapai dibawah 10%, melalui penguatan dan pemantapan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan padat karya.
6. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui pemantapan kemampuan dan keahlian penduduk miskin, pengembangan kesempatan bekerja dan berusaha, dan percepatan pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru.
7. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan dan pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli.

5.5.4.2 Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada:

1. Pemantapan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui penguatan dan pemantapan guru yang bersertifikasi, penguatan dan pemantapan pelayanan, fasilitas, dan jumlah sekolah dan guru, dan pengembangan kesempatan belajar dan bersekolah yang disertai dengan alokasi anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 20 persen.
2. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan kesempatan dan pemantapan akses terhadap informasi dan teknologi, pemantapan lembaga penelitian, dan penguatan dan pemantapan hasil dan implementasi penelitian.
3. Pemantapan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan bayi, pemantapan fasilitas melahirkan, dan pemantapan ketersediaan paramedis beserta sarana kesehatannya.
4. Pemantapan kualitas permukiman dan perumahan melalui penguatan penyediaan perumahan sehat sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serta

air limbah yang memenuhi standar, dan pengurangan kawasan kumuh.

5. Pemantapan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemantapan peran gender, penguatan penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, penguatan aktivitas keagamaan, kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut pemantapan sarana dan prasarananya, dan pemantapan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta penguatan UMR, perlindungan terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah.

5.5.4.3 Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, yang berfokus pada :

1. Pemantapan pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan melalui pemantapan sistim pengelolaan energi dan teknologi energi, dan terjaminnya pemenuhan kecukupan cadangan energi pemberian nilai tambah ekspor energi, dan pemantapan sumberdaya energi alternatif berbasis komoditi pertanian.
2. Pemantapan tata ruang yang adil dan seimbang melalui pemantapan pola lokasi kota-kota, distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan, dan distribusi fungsi kota yang sesuai dengan potensinya, serta pemantapan kawasan budidaya dan pelestarian kawasan lindung.
3. Pemantapan sistem transportasi melalui peningkatan panjang jalan, penguatan dan pemantapan akses antar pusat-pusat permukiman dan akses pada kawasan sentra produksi.
4. Pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur pelabuhan udara, laut, jalan raya, dan kereta api melalui penguatan dan pemantapan pelayanan teritorial, peningkatan wilayah pelayanan moda transportasi, penguatan dan pemantapan integrasi antar moda, peningkatan variasi moda dan kapasitas kawasan prasarana gateway.
5. Revitalisasi pertanian, pemantapan sistem agribisnis, dan pemantapan institusi dan kelembagaan pengelolaan pertanian melalui peningkatan luas dan areal tanam dan ternak, penguatan dan pemantapan

sarana produksi, pemantapan produktifitas, dan pemantapan sistem produksi, pemasaran, distribusi dan lembaga pertanian.

- 5.5.4.4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dengan fokus pada :
1. Pemantapan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah melalui pemantapan kapasitas sistem, organisasi, dan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Pemantapan kualitas pelayanan umum melalui pemantapan kompetensi SDM aparatur, pemantapan Standar Pelayanan Minimum dan Prosedur Operasional Standar, dan pemantapan kepemimpinan birokrasi yang beretika.
 3. Pemantapan kapasitas keuangan daerah melalui pemantapan struktur anggaran yang lebih efektif dan efisien, dan pemantapan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 4. Pemantapan peran serta masyarakat melalui penguatan dan pemantapan peranserta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
 5. Keterbukaan informasi dan teknologi melalui penguatan penyebaran informasi dan teknologi, pemantapan keterbukaan dan transparansi informasi, dan berfungsi optimalnya kebebasan media yang bertanggung jawab dan penerapan peraturan perundangan yang menjamin keterbukaan informasi dan teknologi.
 6. Pemantapan pembangunan politik lokal melalui pemantapan kapasitas lembaga legislatif daerah, organisasi dan partai politik, dan pemantapan pendidikan politik masyarakat yang disertai juga dengan pemantapan etika politik lokal.
 7. Pemantapan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah melalui pemantapan pendayagunaan peraturan daerah dan berfungsi optimalnya penerapan dan penindakan pelanggaran dengan prinsip adanya kesetaraan hukum.
 8. Pemantapan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana melalui pemantapan fungsi dan peran lembaga perlindungan masyarakat dan

penanggulangan, pengatasan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana.

9. Pemantapan aspek ketertiban dan keamanan daerah melalui penguatan profesionalitas aparat, pemantapan pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan peranserta masyarakat dalam masalah keamanan lingkungan.

Bab 5

Penutup

*Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah*



Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

BAB V

PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Sumatera Selatan selama 20 tahun ke depan bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders).

Implementasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan secara berkesinambungan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan. Sementara oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Provinsi Sumatera Selatan sebagai program perencanaan lima tahunan SKPD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan ini juga menjadi acuan didalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang berdimensi 5 (lima) tahunan dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang berdurasi tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025" akan sangat tergantung pada komitmen dan peran aktif stakeholders pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, keberpihakan pembangunan kepada rakyat, peranserta seluruh lapisan masyarakat, dan antisipatif dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan pembangunan daerah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


SYAHRIL OESMAN

One Team, One Vision and One Goal

Sekretariat

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Ade Irma Nasution No. 10 Palembang.

Telp. (0711) 356118.

facsimile. 0711. 356118.

Website: www.bappedasumsel.go.id

Email : bappeda@bappedasumsel.go.id